



**KEDUDUKAN BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL
PEMBERI FIDUSIA DINYATAKAN PAILIT**

Tesis

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Ign. EDDY SANTOSA
NIM: B4A. 099 073

Hukum Ekonomi dan Teknologi

**PROGRAM PASCASARJANA, MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL
PEMBERI FIDUSIA DINYATAKAN PAILIT

Tesis

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh:

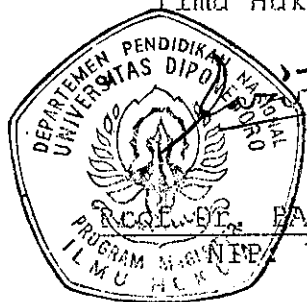
Ign. EDDY SANTOSA
NIM: B4A. 099 073

Hukum Ekonomi dan Teknologi

Semarang, Desember 2002.

Mengetahui
Ketua Program Magister
Ilmu Hukum Undip

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. HARDA NAWAWI, SH
NIP: 130 350 519

Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH
NIP: 130 368 053

PROGRAM PASCASARJANA, MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

ABSTRAK

Perjanjian Jaminan Fidusia lahir menyertai dan mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang, dimana Benda Jaminan Fidusia secara yuridis beralih hak kepemilikannya dari Pemberi Fidusia (debitor) selaku pemilik benda jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia (kreditor pemegang jaminan fidusia), padahal secara fisik benda tersebut masih dikuasai dan dapat dipergunakan oleh debitor. Jika debitor cidera janji, maka benda jaminan fidusia dapat dieksekusi untuk memperoleh pelunasan utang. Dalam hal Pemberi Fidusia dinyatakan pailit, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas, antara lain bagaimana kedudukan benda jaminan fidusia, bagaimana kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia yang dalam kenyataannya secara fisik masih dikuasai oleh debitor dan apakah Penerima Fidusia mempunyai hak menuntut terhadap benda jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh debitor kepada pihak ketiga.

Metode pendekatan dalam penelitian ini normatif empiris dengan wilayah penelitian daerah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan subjek penelitian meliputi mereka yang pernah menangani perkara kepailitan. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan fidusia dan kepailitan. Data lapangan diperoleh dengan wawancara beberapa Pejabat yang berwenang dan praktisi hukum untuk mendukung pemahaman

penerapan perundang-undangan tersebut dalam praktek atau pada kasus nyata.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa syarat-syarat kepailitan ada dua atau lebih kreditor terhadap debitor, utang telah jatuh tempo dan secara sederhana dapat dibuktikan. Akibat kepailitan kreditor yang memegang jaminan fidusia dapat langsung mengeksekusi benda jaminan fidusia milik debitor yang dinyatakan pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan dengan prosedur eksekusi dilakukan setelah penangguhan eksekusi berakhir yaitu selama dua bulan sejak dimulai *insolvensi* dengan persetujuan Kurator dan ijin Hakim Pengawas.

Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya asas publisitas mewajibkan Perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, maka Benda Jaminan Fidusia tidak dapat dimasukkan dalam boedel pailit dan Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia dapat mengajukan pembatalan/pemisahan Benda Jaminan Fidusia dari boedel pailit serta dapat mengajukan pembatalan atas perbuatan pengalihan Benda Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh debitor kepada pihak ketiga (pembeli).

ABSTRACT

Fiducia agreement is a sub agreement made in conjunction with a main agreement called loan agreement. Ownership of the object mentioned in the fiducia agreement, is legally transferred from. Fiducia giver (debtor) as owner of the object to fiducia receiver (kreditor). However the debtor is still having. The right to physically keep and use the object. When debtor is breaching the agreement, the object can be physically taken and considered as a payment to the loan. In the case that the debtor is in a bankrupt position by law there are a few topics can be used. What will be the position of the object fiducia, what will be the position of the creditor as a fiduciary holder, because the object is still physically with debtor and does the fiducia receiver has the right to claim the object which has already been used as a guarantee by the debtor to another third party.

Approach method of this study is empiric normative with research area of Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga and Subject Study includes those who have dealt with bankruptcy cases. Primary and Secondary data is collected through books study related to current law in fiducia and bankruptcy field data is collected by interviewing some government authorities and law practitioners to support the understanding in implementing the law/regulation in real cases.

Based on the qualitative analysis it is known that a bankruptcy sentence would need conditions where there has to be a minimum of two creditors against a debtor and it should be able to be easily proven that the loan payment had been come to a past due.

As a consequence of the bankruptcy sentence, the creditor as a fiduciary holder can execute the fiduciary object from the debtor who has been sentenced as bankrupt. As if there was no bankruptcy, with execution procedure done after the end of the execution postponing, which is two months after the insolvency with approval from curator and Hakim Pengawas.

The result of the analysis shows that with the existence of publicity base it requires fiducia agreement to be registered to the Fiduciary Registration Office. With the registration, the fiduciary object can not be held by the creditor who holds the fiducia can claim a cancellation/separation of the fiducia object from the estate of bankruptcy and also can claim a cancellation of the act of transferring fiduciary object done by debtor to a third party.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"KEDUDUKAN BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL PEMBERI FIDUSIA DINYATAKAN PAILIT"**.

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak, penulisan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono, SH yang telah dengan sabar membimbing kami.
2. Moch. Dja'is, SH, CN, MHum, selaku pembimbing kedua.
3. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan staf, yang telah membantu kami memberikan rekomendasi dan data-data secara lengkap dan bermanfaat bagi penulisan tesis ini.
4. Ketua dan Hakim-hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang telah memberikan data-data maupun informasi yang bermanfaat bagi penulisan tesis ini.
5. Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang dan staf, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang sangat berguna bagi penulisan tesis ini.
6. Prawoto, SH, Kurator Balai Harta Peninggalan Semarang yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukkan dengan semangat dan wawasannya yang sangat berarti bagi penulisan tesis ini.

7. Masih banyak pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terutama teman-teman Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP Kelas sore HET Angkatan Tahun 1999.
8. Tidak ketinggalan pula isteri tercinta yang telah banyak berkorban memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Kami menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena sempitnya wawasan dan kemampuan kami dalam menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini. Untuk itu koreksi maupun kritik yang bersifat membangun dari para pembaca sangat kami harapkan.

Semarang, Desember 2002

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	hal i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Berpikir	9
F. Metode Penelitian	32
1. Metode Pendekatan	32
2. Metode Spesifikasi	33
3. Metode Pengumpulan Data	34
4. Metode Analisa Data	35
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Jaminan	37
1. Arti Pentingnya Lembaga Jaminan ..	
Pada Umumnya	37
a. Pengertian Hukum Jaminan	37
b. Macam-macam Lembaga Jaminan ...	42
1) Gadai	42
a) Pand (KUHPer) dan Boreg .	
(Hukum Adat)	42

b) Gadai Pada Perusahaan	
Umum Pegadaian	44
2) Fidusia	46
3) Hipotik	48
4) Credietverband	50
5) Oogstverband	51
6) Hak Tanggungan	53
7) Cessie/Eigendom Untuk	
Jaminan	53
2. Sistem Hukum Jaminan	60
a. Pengertian Sistem	60
b. Sistem Hukum Jaminan Nasional .	65
c. Sistem Hukum Jaminan	68
3. Hak Jaminan dan Pengaturannya	71
a. Pengertian Hak Jaminan	71
b. Asas-asas Yang Berlaku Bagi ...	
Pemegang Hak Jaminan	78
c. Jenis-jenis Hak Jaminan	81
1) Jaminan Yang Lahir Karena ..	
Undang-undang dan Jaminan ..	
Yang Lahir Karena Perjanjian	81
2) Jaminan Umum dan Jaminan ...	
Khusus	86
3) Jaminan Benda Bergerak dan .	
Jaminan Benda Tak Bergerak .	89
4) Jaminan Hak Kebendaan	90
B. Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia .	91
1. Pengertian Lembaga Fidusia	

Menurut UU Fidusia	91
2. Asas-asas Jaminan Fidusia	95
3. Objek Jaminan Fidusia	100
a. Objek Fidusia Yang Bertentangan Dengan Hak Tanggungan	103
b. Fidusia Sebagai Lembaga	
Jaminan Atas Tanah	106
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	110
5. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga	112
6. Eksekusi Jaminan Fidusia	114
a. Praktek Peradilan Berkaitan Dengan Lembaga Fidusia	114
b. Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti	127
C. Akibat Kepailitan Bagi Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia	133
1. Pengertian Kepailitan	133
2. Kepailitan Harus Dinyatakan Dengan Putusan Hakim	139
3. Akibat Putusan Kepailitan	146
a. Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan	146
b. Kedudukan Separatis Kreditor ... Pemegang Hak Jaminan Dalam UU Kepailitan	153
c. UU Kepailitan Memperkosa Hak ... Kreditor Pemegang Hak Jaminan .. Dalam Mengeksekusi Hak Jaminan .	155

d. Pasal 56 A UU Kepailitan	
Bertentangan Dengan UU Fidusia, ..	
Hak Gadai Dan UUHT	158
4. Siapa Yang Berhak Melakukan Penjualan	
Barang-barang Yang Dibebeani Hak	
Jaminan Fidusia	161
BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
A. Hasil Penelitian	163
1. Jumlah Perkara Kepailitan Pada ...	
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ...	163
2. Kedudukan Benda Jaminan Fidusia ..	
Dengan Paillitnya Pemberi Fidusia .	
Yang Dalam Kenyataannya Secara ...	
Fisik Masih dikuasai Oleh Debitor	171
3. Kedudukan Penerima Fidusia/	
Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia	
Dengan Paillitnya Pemberi Fidusia .	
Yang Dalam Kenyataannya Secara ...	
Fisik Masih dikuasai Oleh Debitor	188
4. Hak Penerima Fidusia/Kreditor	
Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap	
Pihak Ketiga Dalam Hal Pemberi ...	
Fidusia Dinyatakan Paillit	205
B. Pembahasan	212
1. Jumlah Perkara Kepailitan Dengan .	
Jaminan Fidusia Pada Pengadilan ..	
Niaga Jakarta Pusat	212
2. Kedudukan Benda Jaminan Fidusia ..	

Dengan Pailitnya Pemberi Fidusia . . .	
Yang Dalam Kenyataannya Secara . . .	
Fisik Masih dikuasai Oleh Debitor . . .	227
3. Kedudukan Penerima Fidusia/	
Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia . . .	
Dengan Pailitnya Pemberi Fidusia . . .	
Yang Dalam Kenyataannya Secara . . .	
Fisik Masih dikuasai Oleh Debitor . . .	271
4. Hak Penerima Fidusia/Kreditor	
Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap . . .	
Pihak Ketiga Dalam Hal Pemberi . . .	
Fidusia Dinyatakan Pailit	284
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	294
B. Saran-saran	297

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Perkara Kepailitan Pada Pengadilan	
Niaga Jakarta Pusat	163
Tabel 2: Jumlah Perkara Kepailitan Dengan Jaminan	
Fidusia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat . . .	167

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan para pelaku ekonomi ada yang mampu membiayai kegiatan usahanya dengan dananya sendiri, dan ada pula yang tidak mempunyai dana cukup untuk membiayai kegiatan usahanya sehingga membutuhkan sumber dana dari pihak lain.

Di dalam praktek bisnis, setiap usaha investasi yang dilakukan di suatu tempat sangat membutuhkan dana. Dana yang dimaksud ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Lembaga tersebut bersifat *financial intermediaries* (perantara keuangan) yaitu perantara dari pemilik dana dengan peminjam dana.

Oleh karena uang tersebut dipinjamkan kepada peminjam dana, maka demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut diikat dengan Hak Jaminan. Tanpa pembiayaan kredit dari lembaga tersebut untuk

kegiatan usaha para pengusaha, roda ekonomi tidak bisa berjalan seperti yang dialami selama ini.

Untuk mendorong para kreditor agar bersedia mengucurkan dana-dana pembiayaan kepada debitor, maka diperlukan peraturan yang menjamin perlakuan yang adil di antara para kreditor dalam hal debitor tidak dapat membayar seluruh hutangnya dalam suatu peraturan jaminan fidusia adalah penting, perlu dan tidak dapat diabaikan.

Jaminan Fidusia "*fiduciaire eigendoms overdracht*" atau disingkat "*FEO*", adalah pengalihan hak milik secara kepercayaan. Lembaga Jaminan FEO ini timbul berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "*KUHPer*") yang mengatur tentang gadai. Ketentuan gadai menentukan bahwa gadai hanya sah apabila barang bergerak yang dibebani gadai itu diserahkan kepada kekuasaan kreditor pemegang gadai. Sedangkan ketentuan gadai tersebut, pada masa sekarang kiranya tidak efektif lagi terutama dari aspek ekonomi, sehingga dibutuhkan sistem jaminan lain yang lebih fleksibel,

misalnya peraturan yang mengatur bahwa barang jaminan tersebut tetap dikuasai dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh debitor. Lembaga baru tersebut adalah Lembaga "Fidusia".

Di dalam praktek perkreditan perbankan, barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak milik debitor yang memperoleh kredit dari bank hampir selalu dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia. Hak Jaminan Fidusia memberikan secara hukum hak kepemilikan kepada kreditor atas barang-barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu ada pada debitor.

Dalam rangka mengantisipasi globalisasi ekonomi dan perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya dunia usaha akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan. Disinilah letak pentingnya lembaga jaminan itu. Bentuk jaminan yang ada adalah jaminan hipotik, gadai, dan hak tanggungan. Timbulnya bentuk jaminan fidusia ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan.

Pemberian kredit tidak saja dapat dilakukan oleh dunia perbankan, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak lain, yang umumnya diawali dengan menandatangani perjanjian utang-piutang antara kreditor di satu pihak dan debitor di pihak lain. Setelah terjadinya perjanjian itu maka kreditor berkewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor dan berhak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktu yang telah diperjanjikan, sedangkan debitor mempunyai hak dan kewajiban sebaliknya dari hak dan kewajiban kreditor.

Untuk mendapat kepastian pengembalian uangnya dari debitor, umumnya kreditor dapat meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan, yaitu perjanjian jaminan, yang menunjuk benda tertentu baik bergerak maupun benda tetap kepunyaan debitor sebagai jaminan yang memberikan hak preferen dalam pelunasan utangnya.

Di dalam perjanjian kredit yang diikuti dengan perjanjian jaminan, debitor selalu memerlukan benda jaminan itu untuk dipakai dalam kegiatan hidupnya

sehari-hari, salah satu bentuk lembaga jaminan itu adalah lembaga jaminan fidusia.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "UU Fidusia") pada tanggal 30 September 1999, fidusia menurut UU Fidusia adalah hak milik beralih kepada Penerima Fidusia.

Jika debitor wanprestasi terhadap kewajibannya yang timbul dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau jika debitor mengalami pailit, maka Penerima Fidusia berhak menagih dan menahan benda yang menjadi jaminan, karena benda jaminan tersebut berada di luar boedel kepailitan. Benda jaminan tersebut lalu dijual oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan utangnya, kemudian setelah diperhitungkan dengan piutangnya sisa uang dari penjualan dikembalikan kepada debitor.

Suatu perusahaan dalam pertumbuhannya tidak selalu berjalan dengan baik, seringkali perusahaan menderita kerugian. Untuk perkembangan usahanya, setiap perusahaan pasti mempunyai utang. Bagi perusahaan,

utang tidak merupakan suatu hal yang buruk asalkan masih dapat membayar kembali.

Perusahaan yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut dengan perusahaan yang "solvable", artinya perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya perusahaan yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut "insolvable", artinya tidak mampu membayar.

Sebuah perusahaan yang terus menurun pertumbuhan usahanya, ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu keadaan "berhenti membayar", yaitu suatu keadaan dimana pengusaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Jika terus menerus dalam keadaan "berhenti membayar" tersebut benar-benar terjadi maka Hakim akan menjatuhkan pailit pada perusahaan yang bersangkutan. Lembaga ini disebut Lembaga "Kepailitan".

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana yang diikuti dengan perkembangan pemberian fasilitas kredit, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan yang belum pernah diatur dalam hukum tertulis karena masih bersumber pada yurisprudensi, sampai akhirnya dibentuknya UU Fidusia untuk memenuhi kebutuhan hukum, menjamin kepastian hukum, serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

UU Fidusia menegaskan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak mendahulu (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila Pemberi Fidusia dinyatakan pailit yang dalam kenyataannya secara fisik benda jaminan tersebut masih dikuasai oleh debitor ?
2. Bagaimana kedudukan Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya yang dalam kenyataannya secara fisik benda jaminan tersebut masih dikuasai oleh debitor ?
3. Apakah Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia berhak menuntut pihak ketiga (pembeli) yang beritikad baik, yang membeli benda yang telah difidusiakan oleh debitor yang dinyatakan pailit tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Kedudukan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang secara fisik masih dikuasai debitor.

2. Dapat/tidaknya, Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia dengan pailitnya Pemberi fidusia untuk mempertahankan benda jaminan tersebut.
3. Dapat/tidaknya, Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia menuntut pembeli beritikad baik yang membeli benda yang telah difidusiakan.

D. Manfaat Penelitian

Teoritis, Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, yaitu Hukum Perdata khususnya berkenaan dengan Lembaga Jaminan Fidusia dan Lembaga Kepailitan.

Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

E. Kerangka Berpikir

Hukum Jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut *The Economic Law* (Hukum Ekonomi), *Wirtschaftrecht* atau *Droit de*

Economique yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya, sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang (UU) perlu diprioritaskan.¹

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang kreditor terhadap debitornya.² Hukum Jaminan merupakan bagian dari Hukum Benda yang diatur dalam Buku II KUHPer, yang pada dasarnya mengatur tentang Benda dan hak kebendaan. Buku II KUHPer ini pada dasarnya menganut sistem tertutup, artinya bahwa di luar yang secara limitatif ditentukan di sana tidak dikenal lagi hak-hak kebendaan lain. Para pihak pada pokoknya tidak bebas untuk memperjanjikan atau menciptakan hak kebendaan yang baru. Namun dalam praktek juga mengenal adanya lembaga fidusia, yang mempunyai ciri-ciri hak kebendaan seperti yang dianut Buku II KUHPer.³

¹ Djojo Muljadi, *Pengaruh Penanaman Modal Asing Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Vennootchapsrecht) Dewasa ini*, Majalah Hukum dan Keadilan No. 5/6 tahun 1972.

² J Satrio, *Hukum Jaminan : Hak-hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 1-2.

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga Jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditor guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan oleh debitor dengan kreditor.

Hukum hak jaminan di Indonesia diatur pertama kali dalam KUHPer. Pengaturan umum tentang Lembaga Jaminan ini ada di dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPer ;

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KUHPer ;

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Jadi, Pasal 1132 KUHPer membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan

yang diberikan oleh debitor kepada pihak berpiutang (kreditor), yaitu :

1. Jaminan yang bersifat *konkruen*, ialah jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor di mana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditor yang satu dengan kreditor lainnya ;
2. Jaminan yang bersifat *preferen*, ialah jaminan yang diberikan oleh debitor kepada satu kreditor di mana kreditor tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditor lainnya.

Kreditor yang mempunyai piutang preferen disebut kreditor preferen, sedangkan kreditor yang mempunyai piutang konkuren disebut kreditor konkuren. Kreditor preferen mempunyai hak preferensi/hak istimewa/hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Sebetulnya tidak setiap pelunasan piutang membawa persoalan yang menyangkut preferensi. Apabila pendapatan lelang atas kebendaan milik si debitor telah mencukupi tidaklah menimbulkan persoalan, karena

semua kreditor akan memperoleh pelunasan piutangnya. Persoalan baru timbul apabila semua kreditor melakukan *verhaal*, sedangkan hasil pelelangan ternyata kurang untuk melunasi seluruh utang-utangnya.

Dalam keadaan ini kekurangan akan dibebankan pada tagihan kreditor konkuren tanpa menghapus hak kreditor-kreditor tersebut mengajukan tagihan guna menutup kekurangannya.⁴

Hukum hak jaminan merupakan bagian dari hukum benda. Apabila dilihat dari sistem hukum hak jaminan nasional, semua perangkat hukum nasional harus mengacu pada sejumlah asas sebagai berikut :⁵

1. Asas filosofis yaitu Pancasila ;
2. Asas konstitusional yaitu UUD 1945 ;
3. Asas politik yaitu TAP MPR ; dan
4. Asas operasional yaitu Undang-undang.

Disamping itu, Hukum hak jaminan juga mengacu pada hak kebendaan sebagai asas organik yang bersifat umum konkrit, terdiri dari :

1. Asas sistem tertutup ;

⁴ Van Oven, *Byzondere deel, Tweede Stuk, Zekerheidsrechten*, Zwolle, 1974, hlm. 2-3.

⁵ Jurnal, *Hukum Bisnis*, volume 11, 2000, hlm.12.

2. Asas absolut ;
3. Asas hak mengikuti benda ;
4. Asas publisitas ;
5. Asas spesialis ;
6. Asas totalitas ;
7. Asas asensi perlekatan ;
8. Asas konsistensi ;
9. Asas pemisahan horisontal ; dan
10. Asas perlindungan hukum.

Jaminan yang diatur di dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia secara garis besar mempunyai sejumlah asas yang ditentukan sebagai berikut :

1. Benda yang menjadi objek jaminan adalah benda bergerak maupun benda tak bergerak ;
2. Mempunyai sifat hak kebendaan (*real right*) sebagaimana di atur dalam Pasal 528 KUHPer. Sifat daripada kebendaan ini sendiri yaitu *absolut* (dapat dipertahankan pada setiap orang), *droit de suite* (hak kebendaan mengikuti benda pada siapa pun dia berada) ;

3. Memiliki hak *accessoir* yaitu suatu hak yanghapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya (*accessorium*), seperti perjanjian kredit ; dan
4. Adanya hak preferen yaitu hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain (Pasal 1133, 1134, dan 1198 KUHPer).

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan yaitu :

1. Jaminan perorangan (*Borgtocht/Personal Guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*). Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPer. Pada perkembangannya, jaminan perorangan juga dipraktekkan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan lainnya. Bank dalam hal ini sering menerima jaminan serupa, yang sering disebut *Corporate Guarantee*.

2. Jaminan kebendaan (*Zakelijke zekerheid, Security Right in rem*) adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan acara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitor maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*). Jaminan kebendaan ini menurut sifatnya dibagi menjadi: jaminan dengan benda berwujud berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan jaminan dengan benda tak berwujud yang dapat berupa hak tagih (*cessie*).

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut "UUHT"), di Indonesia dikenal sejumlah bentuk hak jaminan yaitu:

1. Hak Tanggungan, yang diatur dalam UUHT ;
2. Hipotik, diatur dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut "KUH Dagang"), Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang

- Pelayaran beserta PP No. 23 Tahun 1995 (selanjutnya disebut "UU Pelayaran") bagi Hipotik Kapal, dan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut "UU Penerbangan") bagi hipotik Pesawat ;
3. Gadai (*pand*) diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPer ;
 4. Fidusia, diatur dalam UU Fidusia ;
 5. Jaminan pribadi (*Borgtocht/Personal Guarantee*), diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPer.

Di luar dari jenis hak jaminan tersebut di atas, dikenal juga hak jaminan yang terselubung (*Quasi Jaminan/Contractus Sui Generis*). Maksudnya adalah bahwa hak jaminan ini terdapat dalam atau secara implisit terdapat dalam perjanjian yang dilakukan. Hak-hak jaminan yang terselubung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Sewa Beli, ketentuan tentang sewa beli ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian, ketentuan tentang perjanjian ini diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Pasal 1519 KUHPer), kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang telah dijual dengan mengembalikan harga pembelian asal dengan memberi penggantian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1532 KUHPer. Jangka waktu untuk membeli kembali tersebut tidak boleh lebih lama dari 5 (lima) tahun. Bila lebih maka harus dikurangi sampai 5 (lima) tahun.
3. *Letter of Comfort*, perjanjian jaminan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sistem *Common Law*. Biasanya pihak kreditor mendapat jaminan dari pihak ketiga bahwa dia akan mengusahakan agar pihak debitor mematuhi kewajibannya selama jangka waktu perjanjian kredit. Namun biasanya isi perjanjian ini dibuat tidak mengikat dan hanya sebagai kewajiban moral saja sehingga keberadaan perjanjian ini masih perlu ditanyakan keefektifannya.

Sebelum lahirnya UU Fidusia, lembaga fidusia diatur dalam yurisprudensi. Fidusia mempunyai istilah asing *fiducia eigendoms overdracht*⁶, merupakan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, ini mempunyai pengertian janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditor, bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditornya sebagai jaminan untuk utangnya, dengan kesepakatan bahwa debitor tetap menguasai secara fisik benda yang dijadikan jaminan tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor bilamana utangnya sudah dilunasi.

Menurut Subekti, perkataan fidusia ini berarti "secara kepercayaan" ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbang balik oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya kedalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu hutang⁷.

⁶ A. Hamzah, & Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1987), hlm. 24.

⁷ R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 1982, hlm. 76.

Pada jaman Romawi dikenal dua bentuk fidusia, yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiducia*, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Pada bentuk yang pertama, seorang debitor menyerahkan suatu barang dalam pemilikan kreditor, kreditor sebagai pemilik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu kepada debitor apabila debitor sudah memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Sedangkan *fiducia cum amico* terjadi bilamana seorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain untuk diurus. Dalam bentuk ini, berbeda dengan *fiducia cum creditore*, kewenangan diserahkan kepada pihak pemberi atau dengan perkataan lain penerima menjalankan kewenangannya untuk kepentingan pihak pemberi.⁸

Lembaga jaminan fidusia sebagaimana kita kenal sekarang dalam bentuk "*fiduciaire eigendoms overdracht*" atau "*FEO*" (pengalihan hak milik secara kepercayaan) timbul berkenaan dengan adanya ketentuan

⁸ Assar's - Beekhuis, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijkrecht, 2e deel - Zakenrecht*, WEJ Tjeenk Willink, Zwolle, 1957, hlm. 329.

dalam Pasal 1152 Ayat (2) KUHPer tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya. Hambatan tersebut diatasi dengan mempergunakan lembaga FEO yang kemudian diakui oleh yurisprudensi 1929. yang dikenal dengan nama "BIERBROUWERIJ-ARRESR". Di Indonesia lembaga FEO tersebut diakui oleh yurisprudensi berdasarkan Arrest Hooggerechtshof tanggal 18 Agustus 1932 (BPM vs CLYNETT).

Dalam Pasal 1 UU Fidusia antara lain dimuat definisi atau batasan pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak

dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pengalihan hak kepemilikan dalam hal jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia "**Pemberi Fidusia**".⁹ Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia seperti tersebut di atas dilakukan dengan cara *Constitutum Possessorium* (*verklaring van houderschap*), artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa Pemberi Fidusia seterusnya akan menguasai benda

⁹ lihat, Pasal 1 Butir 1 UU Fidusia.

dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia
"Penerima Fidusia".

Pengalihan hak kepemilikan tersebut berbeda dari pengalihan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 jo. Pasal 612 Ayat (1) KUHPer. Dalam hal jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan/agunan bagi pelunasan utang,¹⁰ bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia.

UU Fidusia mengatur bahwa yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tak bergerak, dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Ayat 3 KUH Dagang jis Pasal 1162 dan seterusnya KUHPer.¹¹ Selanjutnya UU Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, juga **benda yang diperoleh**

¹⁰ lihat, Pasal 1 Butir 2, dan Pasal 33 U Fidusia.

¹¹ lihat, Pasal 1 Butir 2, dan 4, dan Pasal 3 UU Fidusia.

kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Ini berarti bahwa benda tersebut **demikian hukum** akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Berkenaan dengan pembebanan jaminan fidusia atas benda termasuk piutang yang diperoleh kemudian, UU Fidusia menetapkan bahwa tidak perlu dibuat perjanjian jaminan fidusia tersendiri¹², oleh karena sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan "**sekarang untuk nantinya**" (*nu voor alsdan*) atas benda tersebut. Dimungkinkannya pembebanan jaminan fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan pengadaan/pembelian (stock) bahan baku dan bahan penolong.

Sebagai lembaga hak jaminan, semula diperuntukkan bagi barang bergerak, lembaga fidusia yang diatur melalui yurisprudensi lalu diatur dalam Undang-undang Rumah Susun (selanjutnya disebut "UURS") dan Undang-undang Perumahan dan Pemukiman (selanjutnya disebut "UUPP"). Dalam penjelasan Pasal 15 UUPP disebutkan bahwa pembebanan atas rumah yang merupakan milik

¹² lihat, Pasal 9 Ayat 1, dan 2 UU Fidusia.

pemegang hak atas tanah memberikan 2 (dua) alternatif pilihan yaitu dapat dibebani Fidusia atau dengan Hipotik (sekarang Hak Tanggungan). Juga disebutkan bahwa pemilikan rumah oleh bukan pemilik hak atas tanah, atas persetujuan tertulis pemilik hak atas tanah dapat dibebani Fidusia.

Menurut Maria S.W. Sumardjono,¹³ pemilik rumah tersebut semata-mata dilihat dari perjanjian dengan pemilik/pemegang hak atas tanah yang bersifat murni keperdataan dan dapat berlaku dengan catatan sepanjang tidak dipersoalkan status hukum kepemilikan rumah tersebut yang dikaitkan dengan hukum yang dapat timbul dengan pemilik/pemegang hak atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional.

Seperti halnya hak jaminan kebendaan lainnya, jaminan fidusia menganut prinsip "*droit de suite*".¹⁴ Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan

¹³ Maria S.W. Sumardjono, *Prinsip Dasar dan Isu di Seputar Undang-undang Hak Tanggungan*, (Makalah disampaikan pada Seminar Kesiapan dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan UUHT, Bandung, Mei 1996).

¹⁴ lihat, Pasal 21 UU Fidusia.

cara dan prosedur yang lazim berlaku dalam usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu. Dimungkinkannya pengecualian tersebut perlu dalam hal benda persediaan terdiri dari barang jadi (finished goods) yang diproduksi Pemberi Fidusia untuk dipasarkan.

Seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya seperti gadai, hak tanggungan, dan hipotek, jaminan fidusia menganut prinsip "*droit de preference*" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁵ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 UU Fidusia tersebut, maka berkenaan dengan jaminan fidusia berlaku adagium "*first registered, first secured*".

Yang dimaksud dengan hak yang didahulukan tersebut adalah bahwa Penerima Fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditor-kreditor lain. Bahkan sekalipun Pemberi Fidusia dinyatakan pailit, hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek

¹⁵ lihat, Pasal 28 UU Fidusia.

jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia.

Arti Kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Sedangkan Pailit ialah keadaan berhenti membayar utang-utangnya.¹⁶ Istilah "Pailit" berasal dari kata Belanda "failiet", yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Kata "failiet" sendiri berasal dari kata Perancis "failite", yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut "le faili", berarti gagal. Juga dalam bahasa Inggris untuk pengertian yang sama dipergunakan istilah-istilah "bankrupt" dan "bankruptcy".¹⁷

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya, dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaannya atas harta bendanya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua

¹⁶ H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian pokok hukum dagang 8 tentang Perwasitan, Kepailitan dan pemindaan pembayaran*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 28.

¹⁷ Ny. Siti Soemarti Hartono, *Pengantar hukum Kepailitan dan Pemindaan Pembayaran*, (Yogyakarta, 1981), hlm. 4.

kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita umum tersebut dihindari eksekusi oleh para kreditur secara bersama-sama atau disebut dengan *concursum creditorum*, sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPer, yang menyebutkan bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama, hasil penjualannya dibagi antara mereka seimbang menurut imbalan atau perbandingan tagihan-tagihan mereka.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut "UU Kepailitan"), menegaskan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Permohonan ini diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum. Keharusan adanya sedikitnya dua kreditur adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPer, dimana

ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitor antara para kreditornya harus dilakukan secara *pari passu pro rata parte*¹⁸ atau sesuai perbandingan tagihan-tagihan di antara para kreditornya.

Pasal 6 Ayat (3) UU Kepailitan, menetapkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi yaitu adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwa debitor telah berada dalam keadaan "berhenti membayar" utang-utangnya.

Secara sumir ialah bila dalam mengambil putusan itu tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku Keempat KUHPer, cukup bila peristiwa-peristiwa itu telah terbukti dengan pembuktian yang sederhana.¹⁹ Untuk memastikan hal tersebut, Pengadilan Niaga wajib memanggil debitor.

Dengan adanya keputusan kepailitan dan terhitung sejak tanggal putusan kepailitan, seorang debitor

¹⁸ K. Santoso, Artikel "Akibat Keputusan Kepailitan", hlm. 3.

¹⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

kehilangan hak untuk mengurus dan mengalihkan kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Menurut Pasal 22 UU Kepailitan, sekalipun debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan, hal ini terjadi karena debitor yang pailit tersebut kehilangan haknya untuk berbuat apa saja dan mengurus kekayaannya terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit. Selanjutnya dalam Pasal 23 UU Kepailitan walaupun debitor melanggar Pasal 22 UU Kepailitan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi boedel pailit. Ketentuan ini tidak mengakibatkan si pailit menjadi tidak mampu membuat perjanjian. Hanya mengenai harta yang termasuk boedel kepailitan, si pailit kehilangan wewenang untuk mengurusnya dan mengalihkannya.

Dalam Pasal 67 juncto Pasal 13 UU Kepailitan, dikemukakan bahwa sejak putusan pernyataan pailit

diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan boedel pailit ditugaskan kepada kurator. Selain Balai Harta Peninggalan, yang dapat menjadi kurator adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam mengurus dan atau membereskan boedel pailit, serta telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (Pasal 67 A UU Kepailitan).

Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat kasasi atau peninjauan kembali, maka kepailitan debitor berakhir. Namun demikian menurut Pasal 12 UU Kepailitan, pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut.

Dengan berakhirnya kepailitan, debitor sepenuhnya berhak untuk melakukan perbuatan pengurusan dan pengalihan hak atas kekayaannya. Sehubungan dengan berakhirnya kepailitan, perlu ditegaskan disini bahwa pengakhiran tersebut tidak membebaskan debitor dari

utang-utangnya yang belum dibayar lunas. Sesuai dengan Pasal 190 UU Kepailitan, setiap kreditor yang piutangnya belum sepenuhnya dilunasi berhak untuk menuntut pembayaran kepada debitor yang kepailitannya telah berakhir.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan menggabungkan kedua jenis penelitian ini diharapkan akan dapat hasil yang memadai. Penelitian hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen karena didasarkan pada data sekunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer. Pada penelitian ini peneliti mengacu pada data sekunder

yang berkaitan dengan Lembaga Jaminan khususnya Fidusia.

2. Metode Spesifikasi

- a. Tahap Orientasi, pada tahap ini walaupun penelitian belum benar-benar terfokus tetapi peneliti sudah memiliki gambaran umum tentang apa yang akan diteliti. Dalam tahap ini, peneliti sudah membaca sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti dan juga telah melakukan survey di lokasi di mana penelitian akan dilakukan.
- b. Tahap Eksplorasi, pada tahap ini fokus penelitian sudah lebih jelas sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih terarah dan spesifik.
- c. Tahap Mengecek Hasil Penelitian, informasi harus dicek kebenarannya agar hasil penelitian dapat dipercaya yaitu dengan memperoleh informasi dari berbagai pihak. Dalam tahap ini hasil pengamatan dan wawancara yang telah terkumpul segera dianalisis dan dituangkan

dalam bentuk laporan, diperbanyak, dan dinilai apakah sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Tujuannya adalah agar responden mengecek kebenaran laporan agar hasil penelitian dapat lebih dipercaya.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian paling sedikit terdapat 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.²¹ Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian normatif. Sedangkan wawancara dan observasi digunakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian empiris.

Dengan mengumpulkan data dari berbagai tulisan hukum yang ada merupakan konsekuensi dari penelitian normatif atau kepustakaan yang didasarkan atas data sekunder, yaitu dengan membaca tulisan atau artikel dalam jurnal, koran,

²⁰ S. Nasition, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 33.

²¹ Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 66.

majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang yang akan diteliti.

Mengumpulkan data dari lapangan secara langsung merupakan konsekuensi dari penelitian empiris yang didasarkan pada data primer. Data primer diperoleh dengan metode wawancara yaitu mewawancarai beberapa ahli hukum terutama para praktisi hukum seperti Notaris, Pengacara, Pejabat Balai Harta Peninggalan, dan Hakim-hakim Kepailitan. Yang dimaksud dengan lapangan disini adalah suatu masyarakat, komunitas, atau kelompok tertentu. Dalam kegiatan mengumpulkan data dari lapangan harus selalu menggunakan alat pengumpul data yang tersusun secara baik dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu meliputi observasi, angket, dan wawancara.

4. Metode Analisa Data

Analisa data berarti mencoba untuk memahami makna data. Analisis dilakukan sejak diperoleh data awal pada penelitian dan terus berlanjut selama penelitian dilakukan. Dalam suatu penelitian, data

dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif²². Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Secara umum dalam penelitian kualitatif, jenis observasi yang dilakukan adalah observasi tidak berstruktur yang tidak berdasarkan suatu pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, fokus observasi umumnya akan berkembang selama kegiatan penelitian berlangsung. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat terbuka, *open ended*. Disebut terbuka karena bagi perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan berdasarkan data baru yang masuk.

²² Barnang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 77.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Jaminan

1. Arti Pentingnya Lembaga Jaminan pada umumnya

a. Pengertian Hukum Jaminan

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. disinilah letak pentingnya lembaga jaminan itu.

Istilah jaminan berasal dari kata "jamin" yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.²³ Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang

²³ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan : Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 14.

ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPer, yang menyatakan :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan".

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132

KUHPer, yang menyatakan :

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Juga tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHPer (piutang yang diistimewakan), Pasal 1150-1160 (Gadai), Pasal 1162-1178 (Hipotik, Hak Tanggungan UU No. 4 Tahun 1996), Pasal 1820-1850 (Penanggungan utang), dan akhirnya seperti yang ditetapkan UU Fidusia.

Hukum Jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang

kreditor terhadap debitornya.²⁴ Hukum jaminan tergolong bidang yang akhir-akhir ini secara populer disebut *The Economique* (Hukum Ekonomi), *Wirtschaftrecht* atau *Droit de Economique* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya, sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan.²⁵

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditor guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitor dengan kreditor.

²⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan : Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 3.

²⁵ Djojo Mulyadi, *Pengaruh Penanaman Modal Asing Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Vennootchapsrecht) Dewasa ini*, Majalah Hukum dan Keadilan No. 5/6, 1972.

Pasal 1132 KUHPER, membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitor kepada pihak berpiutang (kreditor), yaitu :

1. Jaminan yang bersifat konkurren, ialah jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor di mana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditor yang satu dengan kreditor lainnya ;
2. Jaminan yang bersifat preferen, ialah jaminan yang diberikan oleh debitor kepada satu kreditor, di mana kreditor tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditor lainnya.²⁶

Kreditor yang mempunyai piutang preferen disebut kreditor preferen, sedangkan kreditor yang mempunyai piutang konkuren disebut kreditor konkuren. Kreditor preferen

²⁶ Marian Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 11, 2000, hlm. 12.

mempunyai hak preferensi/hak istimewa/hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Sebetulnya tidak setiap pelunasan piutang membawa persoalan yang menyangkut preferensi. Apabila pendapatan lelang atas kebendaan milik si debitor telah mencukupi, tidaklah menimbulkan persoalan, karena semua kreditor akan memperoleh pelunasan piutangnya. Persoalan baru timbul apabila ternyata semua kreditor melakukan *verhaal*, sedangkan hasil pelelangan ternyata kurang untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Dalam keadaan ini kekurangan akan dibebankan pada tagihan kreditor konkuren, tanpa menghapus hak kreditor-kreditor tersebut mengajukan tagihan guna menutup kekurangannya.²⁷ Kedudukan kreditor untuk didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan, dapat dipertahankan terhadap siapa pun.

²⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang, FH Undip, 1998, hlm. 7.

b. Macam-macam Lembaga Jaminan

Macam-macam lembaga jaminan yang dikenal adalah Gadai, Fidusia, Hipotik, Crediet-Verband, Oogstverband, Hak Tanggungan, dan Cessie/Eigendom untuk Jaminan.

1) Gadai

a) Pand (KUHPer), dan Boreg (Hukum Adat)

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk "pand" menurut KUHPer, "boreg" menurut hukum adat (gadai menurut Hukum Adat).

Boreg menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan dimana barangnya jaminan tetap dikuasai oleh sipeminjam uang, sedangkan gadai atau apa yang dinamakan cekalan ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan si pemberi kredit.²⁸

²⁸ R. Soebekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Adat, (Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III, Jilid I, Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993), Alumni, 1978, hlm. 17.*

Dalam pand dan boreg terdapat larangan untuk memiliki barangnya jaminan, tetapi dalam halnya gadai atau cekalan, dimana barang jaminan itu berada dalam tangannya si pemberi pinjaman, tidaklah dilarang untuk memperjanjikan bahwa barangnya akan menjadi miliknya pihak yang memberikan jaminan itu, bila tidak ditebus pada waktunya.

Pand dan gadai atau cekalan adalah perjanjian-perjanjian riil, yang baru tercipta dengan diserahkannya barang yang diberikan dalam gadai. Untuk boreg tidak terdapat bentuk-bentuk cara atau formalitas-formalitas tertentu.

Dalam pand atau gadai barang bergerak menurut hukum adat, barangnya jaminan harus ditarik dari kekuasaan pemiliknya untuk mencegah bahwa barang itu dihilangkan oleh pemiliknya.

Dalam KUHPer gadai diatur dalam Pasal 1150-1160, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya. Perjanjian gadai bersifat *accessoir*, dimana jika perjanjian dasarnya yaitu perjanjian kredit yang dijamin oleh benda bergerak tersebut hapus, maka perjanjian gadai ikut hapus.

b) Gadai Pada Perusahaan Umum Pegadaian

Peraturan-peraturan mengenai jawatan pegadaian telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Di antara peraturan-peraturan tersebut, adalah peraturan

yang dimuat dalam Reglemen Pegadaian (Pandhuisreglment), Stb. 1928 : 80. Dalam Reglemen Pagadaian (RP) tersebut, dimuat peraturan-peraturan tentang "beheer" dan "exploitatie" pegadaian negara.

Oleh karena ketentuan-ketentuan tentang hak gadai dari KUHPer merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, maka tentunya ketentuan-ketentuan tersebut berlaku juga untuk perjanjian-perjanjian gadai yang dibuat dalam perusahaan jawatan pegadaian, demikian sekedar dalam RP tidak ditentukan lain.

Namun dalam perkembangannya, untuk mendorong berbagai macam usaha golongan ekonomi lemah atau pun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kredit pada umumnya, oleh pemerintah dibangun suatu lembaga pegadaian. Lembaga pegadaian ini merupakan suatu lembaga perkreditan

yang berupa *Perusahaan Umum* (Perum), berdasarkan PP. No. 10 Tahun 1990.

Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank merupakan suatu tempat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit dengan tanggungan benda bergerak yang prosedurnya mudah, cepat serta tingkat bunganya relatif rendah. Lembaga ini juga dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang sifatnya khusus yaitu menghindari adanya lembaga-lembaga kredit lain yang bersifat tidak resmi dan beroperasi secara informal, seperti ijon.

2) Fidusia

Fidusia atau pemindahan milik secara kepercayaan (*fiduciare eigendomsverdracht* atau sering disingkat "F.E.O."), yang tidak ada Undang-undangnya, tetapi sejak tahun 1931 di Indonesia diakui oleh yurisprudensi (arrest HGH dalam perkara BPM - Clignet),

ternyata sangat populer karena memenuhi kebutuhan praktek, sehingga Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH. dalam disertasinya yang berjudul : "Beberapa masalah tentang pelaksanaan lembaga jaminan, khususnya fidusia, dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia", meminta perhatian Pembuat Undang-undang kita untuk mengatur jenis jaminan ini dengan Undang-undang yang memadai.²⁹

Begitu sukarnya memperjuangkan kedudukan fidusia ini sebagai suatu hak kebendaan, yaitu suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap setiap orang, terutama memberikan preferensi kepada seorang kreditor di atas kreditor-kreditor lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistem bahwa hak kebendaan itu terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh undang-

²⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

undang, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak-hak terhadap suatu pihak tertentu saja, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak.

Dengan diundangkannya UU Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia.

3) Hipotik

Hipotik adalah suatu lembaga jaminan yang diatur dalam KUHPer Buku II Bab ke 21 Pasal 1162-1232. Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Buku II KUHPer telah dicabut sepanjang yang mengenai bumi, air,

serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang tersebut.

Dengan demikian undang-undang menganggap perlu dipertahankannya lembaga hipotik itu dengan seluruh peraturannya, sementara belum diadakan peraturan baru mengenai jaminan tanah yang dapat menggantikannya.³⁰

Menurut Pasal 1162 KUHPer hipotik adalah :

"Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan".

Suatu perjanjian untuk mengadakan hipotik, seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian jaminan pada umumnya, merupakan suatu perjanjian "accessoir". Perjanjian tersebut harus diadakan dengan akta otentik (notaris) Pasal 1171, sedangkan yang dapat

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1.

dibebani dengan hipotik adalah tanah-tanah eigendom, opstal, dan erfpacht Pasal 1164.

Suatu hal yang penting dan membuat hipotik itu kuat adalah sifatnya "melekat" (Zaaksgevolg. droit de suite) yang ditegaskan dalam Pasal 1198 KUHPer, yang berbunyi :

"Si berpiutang yang mempunyai suatu hipotik yang telah dibukukan, dapat menuntut haknya atas benda tak bergerak yang diperikatkan, dalam tangan siapa pun, benda itu berada, untuk ditetapkan tingkatannya dan untuk menerima pembayaran menurut tertibnya pembukuan".

4) Credietverband

Credietverband adalah suatu jaminan atas tanah berdasarkan Koninklijk Besluit (KB) tanggal 6 Juli 1908 Nomor 50 (STBL 1908 No. 542). Dari konsiderans KB tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang Bumiputera yang meminjam uang dari "credietinstellingen" (lembaga-lembaga

perkreditan), untuk memberikan jaminan tanah yang mirip dengan hipotik.³¹

Yang menjadi objek credietverband adalah tanah-tanah milik adat, karena untuk tanah-tanah dengan hak Barat (Eropa) sudah disediakan hipotik.

5) Oogstverband

Oogstverband adalah suatu jaminan untuk pinjaman uang, yang diberikan atas panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan (teh, kopi) berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 24 Januari 1886 (*Staatsblad* 1886 - 57). Ia merupakan suatu "Zakelijk recht", dan dapat dituntut atas panen tersebut, meskipun perkebunannya telah beralih kepada pihak ketiga.

Di dalam salah satu ketentuan peraturan "Oogstverband" disebutkan bahwa jaminan ini dapat diadakan bersama-sama dengan adanya hipotik, atau pun credietverband di atas perkebunannya, asal

³¹ *Ibid.*, hlm. 13.

di dalam akta hipotik atau credietverband tidak telah dijanjikan bahwa tidak boleh diadakan ikatan Oogstverband atas panen yang bersangkutan.³²

Atas satu panen hanya dapat berlaku satu Oogstverband. Kalau ada beberapa, maka yang berlaku hanya yang pertama diletakkannya sedangkan yang terkemudian dapat berlaku apabila yang pertama telah hapus, sebagai suatu jaminan (*accessoir*) tentunya Oogstverband ini hapus kalau utangnya telah terbayar.

Salah satu kelemahan adalah bahwa Oogstverband itu hapus apabila panen yang bersangkutan (yang diikat) musnah.

Lembaga Oogstverband ini mirip dengan apa yang dalam "Civil Code of The Phillippines" dinamakan "Anti-Chresis" yaitu suatu ikatan panen. Rupanya macam Jaminan ini tidak banyak diketahui (meskipun peraturannya masih berlaku) dan

³² *Ibid*, hlm. 21.

karenanya tidak banyak dipakai dalam praktek perkreditan sekarang.

6) Hak Tanggungan

Dengan diambil-alihnya lembaga hipotik dan lembaga credietverband oleh UUPA kita dan sudah dikeluarkannya UUHT, maka segala ketentuan mengenai pembebanan hak atas tanah yang sebelumnya diatur dalam ketentuan hipotik dan ketentuan credietverband dinyatakan tidak berlaku lagi. Hak Tanggungan telah menggantikan hipotik atas tanah yang bersertipikat dan credietverband.

7) Cessie/Eigendom untuk Jaminan

Sebagaimana telah diketahui, bahwa pemakaian lembaga jaminan fidusia untuk benda-benda tak bergerak, terutama setelah adanya Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 September 1971 No. 372 K/Sip/1970, adalah sangat riskan. Dengan Keputusannya tersebut, lembaga pengadilan tertinggi di

Indonesia berpendapat bahwa pemberian jaminan fidusia "adalah sah, sepanjang mengenai barang-barang yang bergerak".³³

Benda-benda tak bergerak, yaitu terutama benda-benda yang didirikan diatas tanah dan yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan rumah, tidak dapat lagi dibebani hipotik. Hal tersebut tidak disebabkan karena dikecualikan dari objek hipotik, melainkan karena kelimpahan pada lembaga hipotiknya sendiri. Lembaga hipotik kecuali kapal dan andil-andil dalam kapal yang sebenarnya masih ada dan berlaku, karena belum pernah dinyatakan tidak berlaku lagi, ternyata nampaknya telah tidak difungsikan.

Selain tidak dapat dibebani hipotik, benda-benda tak bergerak tersebut juga tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Demikian karena hak tanggungan, baik hak tanggungan hipotik maupun hak tanggungan

³³ P.J. Soepratigja, *Op. Cit.*, hlm. 163.

credietverband hanya tersedia untuk tanah-tanah hak tertentu saja, yaitu tanah-tanah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Oleh karena demikian, maka di samping benda-benda tak bergerak, juga akan dapat kita jumpai adanya hak-hak atas tanah selain hak-hak tersebut misalnya hak pakai atas tanah yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Sama seperti benda-benda tak bergerak, hak-hak atas tanah itu juga tidak dapat dijaminkan dengan mempergunakan lembaga fidusia. Demikian karena meskipun sudah bukan lagi merupakan benda tak bergerak, akan tetapi setidaknya hak-hak atas tanah tersebut tidak termasuk dalam pengertian benda bergerak.³⁴

Dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, nampak bahwa dengan sistem hukum jaminan, ternyata terdapat benda-benda yang sesungguhnya mempunyai nilai jaminan tetapi

³⁴ *Ibid.*, hlm. 169.

tidak dapat berperan sebagai jaminan suatu utang.

Di dalam praktek notaris, mulai diperkenalkan adanya suatu lembaga jaminan baru yang disebut dengan nama "zekerheid cessie" atau "cessie hak eigendom untuk jaminan".³⁵

Menurut Ridwan Suselo, lembaga jaminan baru ini "Seolah-olah mempunyai jiwa fiduciair (fiduciair-karakter)". Begitu karena antara keduanya memang hampir tidak ada bedanya. Perbedaan yang menonjol hanya terletak pada "Cara penyerahan benda jaminan".³⁶

Seperti hak kebendaan lainnya, hak eigendom yang diperoleh karena cessie untuk jaminan juga bersifat *accessoir* terhadap piutang pokok. Hak tersebut hanya diperoleh karena adanya hubungan utang piutang antara kreditor dengan debitor.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 170.

Di dalam jaminan kebendaan, kreditor pemilik hak eigendom untuk jaminan mempunyai hak untuk lebih didahulukan dari kreditor-kreditor yang mempunyai jaminan umum. Dalam kepailitan debitor, kreditor pemilik hak eigendom untuk jaminan itu kedudukannya sebagai kreditor "separatist".

Di samping hak-hak kebendaan. cessie hak eigendom untuk jaminan dapat juga dilaksanakan atas hak-hak harta kekayaan lainnya.³⁷

Di luar dari jenis Hak Jaminan tersebut di atas, dikenal juga Hak Jaminan yang Terselubung (Quasi Jaminan/*Contractus Sui Generis*). Maksudnya adalah bahwa Hak Jaminan ini terdapat dalam atau secara implisit terdapat dalam Perjanjian yang dilakukan. Hak-hak Jaminan yang Terselubung adalah sebagai berikut :

a) Perjanjian Sewa Beli

³⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

Ketentuan tentang Sewa Beli ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian, ketentuan tentang perjanjian ini diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Putusan MA RI) No. 15/K/SIP/1957 tanggal 16 Desember 1957, atas perkara G.G. Jordan vs. NV. Handelsmaatschappij L'auto, Putusan MA RI no. 3273 K/Pdt/1988 tanggal 30 Mei 1990, atas perkara Arifin dan PT Kawisan Motor, dan lain-lain.

- b) Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Pasal 1519 KUHPer, Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang telah dijual dengan mengembalikan harga pembelian asal dengan memberi

penggantian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1532 KUHPer. Jangka waktu untuk membeli kembali tersebut tidak boleh lebih lama dari 5 (lima) tahun. Bila lebih, maka harus dikurangi sampai 5 (lima) tahun.

c) *Leasing*

Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*option*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

d) *Letter of Comfort*

Perjanjian jaminan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sistem *Common Law*. Biasanya pihak Kreditur mendapat jaminan dari pihak ketiga bahwa dia akan mengusahakan agar pihak Debitur mematuhi kewajibannya selama jangka waktu perjanjian kredit. Namun biasanya isi perjanjian ini dibuat tidak mengikat dan hanya sebagai kewajiban moral saja, sehingga keberadaan perjanjian ini masih perlu ditanyakan keefektifannya.³⁸

2. Sistem Hukum Jaminan

a. Pengertian sistem

Prof. R. Soebekti, SH., mengemukakan :³⁹

Sistem adalah suatu susunan atau catatan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut rencana atau

³⁸ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 1986, hlm. 93.

³⁹ R. Soebekti, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, kertas kerja pada Seminar Hukum Nasional IV, Jakarta, 1979.

pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.

Di dalam Winkler Prins Enclopaedie,⁴⁰ disebutkan bahwa :

"Sistem ialah *Samenstel, geordend geheel* (susunan, keseluruhan yang teratur)".

Sedangkan dalam Black's Law Dictionary,⁴¹ dikatakan bahwa :

"System is orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle".

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan,

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983, hlm. 15.

⁴¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, 5th Edition*, St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1979, p. 1300.

diatas manna dibangun tertib hukum. Hukum positif yang didukung oleh asas-asas ini bersifat harmonis, seimbang, tidak mengandung konflik, dan tidak tumpang tindih, sehingga dengan demikian bangunan hukum tersebut bersifat ampuh, pasti, bulat, dan tuntas.

Istilah "sistem hukum" atau "stelsel hukum" merupakan istilah yang akrab bagi kalangan dunia hukum. Sekalipun demikian, ironisnya cara berpikir para ahli hukum seringkali tidak mengacu kepada pendekatan hukum sebagai suatu sistem.⁴²

Suatu sistem hukum pada dasarnya mempunyai suatu karakteristik dari suatu sistem yaitu berorientasi pada tujuan yang sama (*purposive behavior*), pendekatan bersifat menyeluruh yang jauh dari sikap pragmentaris (*wholism*), selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (*openness*), operasionalisasi bagian-bagiannya akan menciptakan nilai tertentu (*value*

⁴² Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm 2.

transformation), keterkaitan dan kecocokan antar sub-sistem (*interrelatedness*) dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*).⁴³

Fuller, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menawarkan delapan prinsip agar kita dapat berbicara mengenai adanya sistem hukum, kedelapan prinsip tersebut dinamakan "*principles of legality*", yaitu :

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut

⁴³ Muladi, *Suatu Analisis tentang Peranan Formal Kekuasaan Kehakiman Termasuk Permasalahan Peradilan Terpadu*, Semarang, tanpa Penerbit, 2001, hlm. 3.

berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.

- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan, sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁴⁴

Selanjutnya Fuller mengatakan, bahwa kedelapan prinsip yang diajukan itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 92.

suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum, sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.⁴⁵

b. Sistem Hukum Jaminan Nasional

Pada saat berlakunya *Indische Staats regeling* berdasarkan Statblad 1855. no. 2. (semacam Undang-undang Dasar bagi Hindia Belanda sebagai negara jajahan Belanda), maka keadaan sistem hukum kolonial pada waktu itu terdiri dari :

- 1) sistem hukum adat ;
- 2) sistem hukum Islam ; dan
- 3) sistem hukum Barat .

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus dan berlakunya UUD 1945, Sistem Hukum Indonesia mengalami perubahan dengan tidak

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 93.

berlakunya lagi *Indische Staatsregeling* dan diganti dengan Pancasila dan UUD 1945, dan berdasarkan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945, maka keadaan hukum di Indonesia adalah :

- 1) sistem hukum Adat ;
- 2) sistem hukum Islam ;
- 3) sistem hukum Barat ; dan
- 4) sistem hukum Nasional.

Usaha pembaharuan hukum dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya sistem hukum nasional. "*Sistem Hukum Nasional*", diartikan berbeda dengan pengertian hukum positif, tetapi diartikan lebih luas dan mengandung makna "*ius constituendum*" Indonesia atau sistem hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.⁴⁶

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-

⁴⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Diktat: Politik Hukum*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Undip, 2001, hlm. 30.

2004, di dalam sub (2) ditentukan bahwa arah kebijakan di bidang hukum adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak-adilan gender dan ketidak-sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Pembaharuan hukum jaminan agar mengacu pada pembaharuan sistem hukum, khususnya hukum benda sebagai induknya. Dengan pembaharuan terhadap pokok-pokok penting kepemilikan atas benda tersebut, maka kerangka berpikir kita atas hukum jaminan akan terbentuk dengan sistem yang telah disepakati kita bersama. Sistem tersebut yaitu sistem kodifikasi hukum nasional yang dilakukan secara parsial.

Berbagai perkembangan hukum di Indoensia, sistem peradilan saat ini telah mengarah pada upaya harmonisasi terhadap sistem *Common Law*.

Dalam sistem *Civil Law*, peranan hakim sangat aktif sehinggadapat terjadi keterangan saksi ahli dikesampingkan dalam pengambilan putusan. Sistem *Common Law* lebih berorientasi pada pendapat para *expert*, sehingga ketentuan hukuman positif tidak begitu berperan seperti keadaan di Indonesia.

c. Sistem Hukum Jaminan

Pembaharuan hukum jaminan hingga saat ini terlihat tidak konsisten. Karena pembaharuan hukum perdata dilakukan tidak melalui kodifikasi tetapi melalui pembaharuan secara parsial. Untuk hal ini, pembuat undang-undang harus berhati-hati karena pembaharuan secara parsial ini mengandung bahaya. Kadar bahaya tersebut terdapat pada sebagian hukum jaminan, seperti UUHT dan UU Fidusia, yang tidak berada dalam satu sistem. Dengan kata lain terbuka kemungkinan bahwa hak-hak jaminan tersebut akan berbenturan. Jadi kehati-hatian tersebut harus ditekankan pada pembaharuan hukum secara

parsial. Bahaya ini telah kita lihat dalam pembaharuan hukum jaminan ini, khususnya dalam UUHT dan UU Fidusia, yaitu terdapatnya benturan tentang objek dari benda jaminan.⁴⁷

Hukum hak jaminan merupakan bagian dari hukum benda. Apabila dilihat dari sistem hukum hak jaminan nasional, semua perangkat hukum nasional harus mengacu pada sejumlah asas sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Asas filosofis yaitu Pancasila ;
- 2) Asas konstitusional yaitu UUD 1945 ;
- 3) Asas politik yaitu TAP MPR ; dan
- 4) Asas operasional yaitu Undang-undang.

Di samping itu, hukum hak jaminan juga mengacu pada hak kebendaan sebagai asas organik yang bersifat umum konkrit, terdiri dari :

- 1) Asas sistem tertutup ;
- 2) Asas absolut ;
- 3) Asas hak mengikuti benda ;

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- 4) Asas publisitas ;
- 5) Asas spesialis ;
- 6) Asas totalitas ;
- 7) Asas asensi perlekatan ;
- 8) Asas konsistensi ;
- 9) Asas pemisahan horisontal ; dan
- 10) Asas perlindungan hukum.

Dengan demikian, asas-asas hukum merupakan dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengandung nilai-nilai moral dan etis. Adanya nilai moral dan etis di dalam perundang-undangan itu sendiri, yang sekaligus juga mencerminkan aspirasi masyarakat tertampung di dalamnya.

Dr. Theo Huijbers, membedakan dua jenis asas hukum ialah :⁴⁹

- 1) *Asas hukum objektif*, yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum ; dan

⁴⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1991, hlm. 79.

- 2) *Asas hukum subjektif*, yaitu prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.

3. Hak Jaminan dan Pengaturannya

a. Pengertian Hak Jaminan

Hak jaminan sangat penting, tidak saja dalam masalah perkreditan tetapi juga dalam transaksi dagang atau bisnis. Di Amerika hak jaminan dikenal dengan istilah "secured transaction". Istilah secured transaction sudah sering digunakan di Indonesia dalam percakapan bisnis akhir-akhir ini. Suatu transaksi dagang atau bisnis, tidak hanya melibatkan adanya suatu perjanjian penjualan barang yang diikuti dengan pelaksanaannya berupa penyerahan barang yang dijual dan dilakukan pembayaran (baik dengan uang tunai atau dengan alat pembayaran lain yang bukan uang tunai seperti cek atau wesel), tetapi

dapat pula melibatkan pemberian security interest atau hak jaminan.

Gerald H Thain, menyatakan :⁵⁰

"A secured transaction can be defined as an arrangement in which a party, either an individual business organization makes a loan, or gives credit, to another party with the expectation that the loan will be repaid with appropriate interest and that, if the term of the loan transaction are not met, the secured party -- the party to whom the obligation is owed -- will be able to assert rights in collateral.

Jadi secured transaction adalah transaksi yang dijamin dengan benda yang disebut agunan yang memberikan hak kepada kreditor untuk menjual benda itu apabila debitor ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya dan mengambil hasil penjualan benda itu guna memenuhi kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya

⁵⁰ Gerald H Thain, *A Basic Outline Of The Law Of Secured Transaction*, Komponen Pelatihan Hukum, Elips Project, 1993, hlm. 2.

yang dijamin dengan benda itu. Tujuan dari hukum *secured transaction* adalah untuk melancarkan perdagangan dengan memberikan perlindungan sistem perkreditan sehingga dengan demikian membuat mereka yang mempunyai uang tunai untuk bersedia dipakai uangnya oleh orang lain sebagai pinjaman (kredit) guna membiayai transaksi bisnis orang lain.

Secured transaction yang dikenal dalam perbankan di Indonesia umumnya adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitornya yang dijamin dengan hak jaminan atas benda-benda yang dibiayai dengan kredit bank (disebut agunan pokok) dan atau dengan benda-benda yang tidak dibiayai dengan kredit bank (disebut agunan tambahan). Pemberian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan dibuatnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitor dan atau dengan diterbitkannya suatu surat sanggup yang lazim di kalangan perbankan disebut *promissory note*, yaitu

istilah yang juga diambil dari *common law* oleh nasabah debitor.⁵¹

Dalam praktek bisnis, setiap usaha investasi yang dilakukan di suatu tempat sangat membutuhkan dana. Dana yang dimaksud ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Kedua lembaga ini bersifat sebagai *financial intermediaries* (perantara keuangan), yaitu perantara dari pemilik dana dengan peminjam dana. Oleh karena uang tersebut dipinjamkan kepada peminjam dana, maka demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut diikat dengan Hak Jaminan.

Hukum Hak Jaminan di Indoneisa diatur pertama kali dalam KUHPer. Pengaturan umum tentang Lembaga Jaminan ini ada di dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPer, bahwa segala kebendaan pihak yang berutang (Debitor), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, "*Secured Transaction*", makalah tt. hlm. 6.

yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1131 KUHPer ini masih banyak kelemahan-kelemahannya bagi kreditor karena merupakan kreditor konkuren artinya para kreditor mempunyai hak yang sama.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KUHPer bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi, Pasal 1132 KUHPer membagi lembaga Jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada pihak berpiutang (Kreditor), yaitu :

- 1) Jaminan yang bersifat konkuren, ialah jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada

Kreditor dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara Kreditor yang satu dengan Kreditor lainnya;

- 2) Jaminan yang bersifat preferen, ialah jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada satu Kreditor, dimana Kreditor tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap Kreditor lainnya.

Keberadaan lembaga jaminan ini dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan "UU Perbankan") juga dinyatakan secara tersirat dalam rumusan Pasal 8 Ayat (1) yaitu bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang

diperjanjikan. Hal ini mencerminkan apa yang disebut dengan "*The Five C's of Credit*", dimana salah satunya adalah *Collateral* (jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh Debitor atas risiko. Apabila jaminan tambahan diberikan oleh Nasabah Debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, maka jaminan tersebut disebut dengan agunan (vide Pasal 1 Angka (23) UU Perbankan).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang Debitor dan atau Pihak Ketiga kepada Kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan Kreditor guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (Perjanjian Kredit atau Pembiayaan) oleh Debitor dengan Kreditor.

b. Asas-asas yang Berlaku bagi Pemegang Hak Jaminan

Ada beberapa asas yang berlaku bagi Hak Jaminan, baik bagi Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dari Hipotik. Berkaitan dengan pembahasan mengenai kedudukan hukum hak jaminan dalam kepailitan, dari beberapa asas yang berlaku bagi pemegang hak jaminan sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

- 1) Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi Kreditor Pemegang Hak Jaminan terhadap para Kreditor lainnya.
- 2) Hak Jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara Kreditor dan debitor. Artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir pula.

- 3) Hak Jaminan memberikan hak separatis bagi Kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- 4) Hak Jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak jaminan diatur dalam Pasal 528 KUHPer.
- 5) Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, Kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan

mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada Debitor.

- 6) Karena Hak Jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, Hak Jaminan tersebut harus didaftarkan di Kantor pendaftaran Hak Jaminan yang bersangkutan. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi Hak Jaminan Gadai. Hal tersebut dapat dimengerti oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bagi sahnya hak jaminan gadai, benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu harus diserahkan kepada Kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu terlepas dari

penguasaan Kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut.

b) Benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak.

c) Pasal 1977 ayat (1) KUHPer menentukan bahwa "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya".

c. Jenis-jenis Hak Jaminan

1) Jaminan yang Lahir karena Undang-undang dan Jaminan yang Lahir karena Perjanjian.

Jaminan yang lahir karena undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak.⁵²

⁵² Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, 1980, hlm. 43.

mengandung arti bahwa
dijadikan jaminan untuk semua
yaitu semua utangnya. Inilah yang
hukum Jerman dinamakan "haftung". Kalau
seseorang mempunyai utang maka jaminannya
adalah semua kekayaannya. Kekayaan ini
dapat disita dan dilelang, hasil pelelangan
itu diambil suatu jumlah untuk membayar
utangnya kepada kreditornya.⁵³ Artinya
bahwa kreditor dapat melaksanakan haknya
terhadap semua benda debitor, kecuali
benda-benda yang dikecualikan oleh undang-
undang.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPer tersebut
merupakan ketentuan yang memberikan
perlindungan bagi seorang kreditor.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1131 KUHPer sudah merupakan asas yang

⁵³ R. Soebekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 21.

bersifat universal, yang terdapat pada sistem hukum setiap negara.

Bagaimana hasil penjualan harta kekayaan debitor itu dibagikan di antara para kreditor apabila debitor cidera janji tidak melunasi utangnya? Jawaban mengenai pertanyaan tersebut dalam KUHPer dijumpai dalam Pasal 1132. Menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPer, harta kekayaan debitor tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitor. Artinya, apabila debitor cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proposional (*pari passu*) menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain.

Sekalipun Undang Undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditor sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditor untuk memberikan utang kepada calon debitor. Akan lebih menarik bagi calon kreditor apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik dari pada sekadar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proposional dari hasil penjualan harta debitor.

Sistem hukum kita ternyata mengenal pemberian perlindungan yang istimewa seperti itu hanya dapat diberikan apabila dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan ditempuh proses tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Perlindungan istimewa dapat diberikan apabila kreditor memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitor. Benda

tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Adanya pemberian perlindungan istimewa tersebut telah disyaratkan oleh Pasal 1132 KUHPer yang telah dikemukakan di atas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

Pasal 1133 KUHPer, menetapkan :

"Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik".

Menurut Pasal 1133 KUHPer, hak untuk didahulukan di antara para kreditor timbul dari hak istimewa, gadai, dan hipotik.

Kedudukan hak jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 ayat (2) lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih tinggi dari pada hak jaminan, misalnya biaya perkara yang semata-mata

disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang baik suatu benda bergerak maupun benda tak bergerak. Biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan kepada para kreditur lainnya, termasuk kepada para kreditur pemegang hak jaminan.

Gadai dan hipotik disebut hak jaminan. Hak gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPer. Setelah berlakunya UUHT dan UU Fidusia, maka selain gadai dan hipotik juga UUHT dan UU Fidusia merupakan hak-hak jaminan.

2) Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

KUHPer telah memberi sarana perlindungan kepada para kreditor melalui ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131, menyebutkan bahwa semua kebendaan milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan

untuk segala perikatan perseorangan; sedangkan Pasal 1132, menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditor, disini para kreditor mempunyai kedudukan yang sama (*paritas creditorum*) kecuali apabila kreditor mempunyai hak istimewa yang dalam KUHPer Pasal 1133, yaitu gadai dan hipotik dan dalam perkembangan hukum Indonesia hak istimewa tersebut juga bagi UUHT dan UU Fidusia.

Jaminan umum sering dirasakan tidak aman, karena jaminan secara umum berlaku bagi semua kreditor, sehingga apabila kreditornya banyak, mungkin saja kekayaan debitor habis dan tidak mencukupi utang-utangnya.

Jaminan secara khusus adalah jaminan yang timbul dari perjanjian baik berupa perjanjian jaminan kebendaan maupun perseorangan. Perjanjian jaminan adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok, jadi sifatnya *accessoir*, yang diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok sehingga timbul dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.

Untuk itu sering dibuat perjanjian jaminan secara khusus baik jaminan kebendaan maupun perjanjian jaminan perseorangan untuk menjamin perjanjian pokok, misalnya perjanjian utang-piutang, perjanjian

kredit, perjanjian pemborongan, dan sebagainya.

3) Jaminan Benda Bergerak dan Jaminan Benda Tak Bergerak

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak.⁵⁴ Penggolongan ini mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), pembebanan jaminan.

Untuk jaminan benda bergerak, lembaga jaminan yang digunakan adalah gadai dan fidusia. Sedangkan benda-benda bergerak tersebut antara lain untuk gadai seperti emas, perhiasan, kendaraan bermotor, dan lain-lain, untuk fidusia benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

⁵⁴ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, op. cit., hlm. 48.

Untuk jaminan benda tak bergerak digunakan hipotik seperti kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (duapuluh) meter kubik atau lebih dan pesawat terbang, hak tanggungan seperti semua yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan Jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar, dan fidusia khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT.⁵⁵

4) Jaminan Hak Kebendaan

Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya, dikenal diseluruh perundang-undangan modern sekarang ini, hanya bentuknya yang agak berbeda-beda.

Di Indonesia, untuk jaminan dengan menguasai bendanya ada pada jaminan gadai dan hak retensi, sedangkan jaminan yang

⁵⁵ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1999, hlm. 6.

tanpa menguasai bendanya adalah hak tanggungan, dan fidusia.

B. Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia

1. Pengertian Lembaga Fidusia Menurut UU Fidusia

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Pada jaman Romawi dahulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja.

Pasal 1 UU Fidusia, memberikan batasan dan pengertian, sebagai berikut :

- *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- *Jaminan Fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

- Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
- Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- Penerima Fidusia adalah orang perorang atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan fidusia.
- Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam

mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen.

- *Piutang* adalah hak untuk menerima pembayaran.
- *Kreditor* adalah pihak yang.
- *Debitor* adalah pihak yang mempunyai mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. utang karena perjanjian atau undang-undang.
- *Setiap orang* adalah orang perorang atau korporasi.

Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti Pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UU Fidusia ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam *fiducia cum creditore contracta* di atas.

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan

cara *constitutum possessorium*, artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan penerima fidusia.⁵⁶ Jelasnya, pengalihan hak kepemilikan atas benda jaminan dari debitur, berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja atau disebut penyerahan yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan sebagai jaminan utang debitur, sedangkan benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur untuk kepentingan atau atas nama kreditor.⁵⁷

Menurut Pasal 27 UU Fidusia, ditegaskan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan terhadap kreditor lainnya, artinya penerima fidusia dapat lebih dahulu mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima

⁵⁶ Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁵⁷ A. Harnzah, & Senjurn, *Op. Cit.*, hlm. 37.

fidusia ini tidak hapus karena adanya kepailitan pemberi fidusia.

Dalam Pasal 1 Butir (5) UU Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia dalam Pasal 1 Butir (6) UU Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

2. Asas-asas Jaminan Fidusia

Adanya asas-asas di dalam suatu sistem menunjukkan betapa pentingnya suatu asas. Asas atau prinsip bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan

dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁵⁸

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo bahkan menyatakan bahwa asas hukum itu merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa asas hukum ini merupakan "Jantungnya" peraturan hukum.⁵⁹

Dengan demikian dapat diketahui betapa pentingnya asas bagi suatu perundang-undangan, untuk mengetahui apakah suatu undang-undang dalam implementasinya berjalan dengan baik, juga tidak lepas dari melihat asas apa yang ada dibelakang undang-undang tersebut. Asas dalam suatu perundang-undangan yang satu dengan demikian tidak boleh bertentangan dengan asas yang digunakan dalam perundang-undangan yang lain agar tercipta harmonisasi hukum.

M. Yahya Harahap secara tepat memaparkan adanya beberapa prinsip hukum dalam UU Fidusia, sebagai berikut :⁶⁰

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 1988, hlm.33.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, 1991, hlm. 45.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, makalah "Lembaga Fidusia", Jakarta, 2000.

1. Asas *Spesialitas Fixed Loan*, artinya benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dengan demikian harus jelas dan tertentu benda objek jaminan fidusia serta harus pasti jumlah utang debitor atau dapat dipastikan jumlahnya. Pembuatan akta jaminan fidusia harus memuat, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Asas *asesor*, artinya Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok, penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok. Menurut hemat penulis, ialah suatu hak yang hapusnya

bergantung pada perjanjian pokoknya (accessorium), seperti perjanjian kredit.

3. *Asas Hak Preferen*, artinya memberi kedudukan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya, kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi. Menurut pendapat penulis, adanya hak *preferen* yaitu hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain (Pasal 1133, 1134, dan 1198 KUHPer).
4. *Yang Dapat Memberi Fidusia*, artinya harus pemilik benda, jika benda itu milik pihak ketiga, maka pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi, tetap harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.
5. *Dapat Diberikan Kepada Lebih Dari satu Penerima atau kepada Kuasa atau wakil Penerima Fidusia*, artinya ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

6. *Larangan Melakukan Fidusia Ulang terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia yang Sudah Terdaftar*, artinya apabila objek jaminan fidusia sudah terdaftar, berarti menurut hukum objek jaminan fidusia telah beralih kepada Penerima Fidusia. Oleh karena itu, pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia, apabila terjadi hal demikian maka hak milik sebagai pemegang jaminan kepada kreditor kedua, tidak menghilangkan hak milik fidusia dari kreditor pertama

7. *Asas Droit De Suite*, artinya jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang jadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda itu berada, kecuali keberadaannya berdasar penglihatan hak atas piutang (*Cessie*), dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak (*in rem*).

Menurut penulis, hak kebendaan dapat dipertahankan pada setiap orang dan mengikuti

benda pada siapa pun dia berada (Pasal 528 KUHPer), sifat dari hak kebendaan itu sendiri.

3. Objek Jaminan Fidusia

Seperti telah disinggung di muka, jika kita memperhatikan sejarah perkembangan fidusia, pada awalnya yaitu pada jaman Romawi, objek fidusia meliputi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu tidak dikenal hak-hak jaminan yang lain.

Pemisahan mulai diadakan ketika kemudian orang-orang Romawi mengenal gadai dan hipotik. Ketentuan ini juga diikuti oleh Belanda dalam *Burgerlijke Wetboek*-nya. Pada saat fidusia muncul kembali di Belanda, maka pemisahan antara benda bergerak yang berlaku untuk gadai dan benda tidak bergerak untuk hipotik juga diberlakukan. Objek fidusia dipersamakan dengan gadai yaitu benda bergerak karena pada waktu itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini terus menjadi

yurisprudensi tetap baik di Belanda dan di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan lahirnya UUPA yang tidak membedakan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak melainkan perbedaan atas tanah dan bukan tanah. Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tidak dapat dijamin terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memiliki bangunan di atas tanah dengan hak sewa misalnya tidak dapat membebaninya dengan hak tanggungan tersebut. Hal yang terakhir ini pernah dipraktekkan oleh Bank Rakyat Indonesia.⁶¹ Di sini ada dua hak yang diserahkan kepada kreditor, yang pertama hak milik atas bangunan dan yang kedua adalah hak sewanya. Khusus mengenai penyerahan hak sewa ini diperlukan persetujuan dari pemilik tanah yang menyewakan tanah itu untuk sewaktu-waktu mengalihkan hak sewa atas tanah itu kepada pihak lain.⁶²

⁶¹ Business News, *Ruang Hukum: Ruang Lingkup dan Objek jaminan Fidusia*, Jakarta, 8 Juni 2000, hlm. 8.

⁶² *Ibid.*, hlm. 8.

Perkembangan ini adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia, di mana banyak orang yang menguasai tanah dengan hak-hak atas tanah yang tidak bisa dijamin dengan hak tanggungan, seperti hak sewa, hak pakai, hak menumpang dan sebagainya.⁶³ Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tersebut tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan dan ini dapat diatasi dengan jaminan fidusia.

Dengan lahirnya UU Fidusia, yaitu dengan mengacu pada Pasal 1 Butir 2 dan 4 serta Pasal 3 UU Fidusia dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud., terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT atau Hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314

⁶³ Business News, *Ruang Hukum: Ruang Lingkup Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999*, Jakarta, 8 Juni 2000. hlm. 7-8.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang jis Pasal 1162 dan seterusnya, dan gadai.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Fidusia, jaminan fidusia ini diharapkan akan dapat menggantikan *Fiduciare Eigendomsoverdracht* dan *Cessi* jaminan atas piutang-piutang (*Zekerheidscessie*, *fiduciary assignment of receivables*) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan.

a. Objek Fidusia Yang Bertentangan Dengan Hak tanggungan

Fidusia sebagai lembaga jaminan yang semula diperuntukkan bagi benda bergerak, lembaga yang diatur melalui yurisprudensi lalu dalam UURS dan Undang-undang Perumahan dan Pemukiman (UUPP), keberadaannya dipertanyakan dengan diundangkannya UUHT. Dalam UUHT ditentukan bahwa hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. Selain itu, mengingat judul UUHT mencakup pula benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah,

maka dapat disimpulkan bahwa hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah (vide Penjelasan umum angka 5. 3).

Penyelesaian masalah pembebanan fidusia atas Rumah Susun beserta tanah tempat bangunan tersebut berdiri dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berdiri di atas Hak Pakai Atas Tanah Negara (HPATN) tidaklah sulit karena dalam Pasal 27 UUHT ditentukan bahwa UU ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Dengan demikian ketentuan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam UURS hapus dengan sendirinya.

Permasalahan terjadi saat kita melihat ketentuan fidusia dalam UUPP. Merupakan suatu pertanyaan mengapa UUHT tidak dinyatakan juga untuk UUPP. Dalam Penjelasan Pasal 15 UUPP disebutkan bahwa pembebanan atas tanah yang

merupakan milik pemegang hak atas tanah memberikan 2 (dua) alternatif pilihan yaitu dapat dibebani fidusia atau dengan hipotik (sekarang hak tanggungan). Adanya dua pilihan ini tentu saja membingungkan. Selain itu, dari keadaan ini, kita dapat melihat bahwa UUHT tidak konsekuen dengan pernyataan bahwa UUHT adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, karena fidusia masih berlaku dalam UUPP. Sekali lagi asas konsistensi di sini tidak diperhatikan.

Kemungkinan penerapan fidusia sendiri atas tanah dalam Pasal 15 UUPP memerlukan pemikiran yang cermat. Dalam Pasal 15 UUPP juga menyebutkan, bahwa pemilikan rumah oleh bukan pemilik hak atas tanah, atas persetujuan tertulis pemilik hak atas tanah dapat dibebani fidusia.

Menurut Maria S.W Sumardjono,⁶⁴ pemilikan rumah tersebut semata-mata dilihat dari perjanjian dengan pemilik/pemegang hak atas tanah yang bersifat murni keperdataan, dan dapat berlaku dengan cacatan sepanjang tidak dipersoalkan status hukum kepemilikan rumah tersebut yang dikaitkan dengan hukum yang dapat timbul dengan pemilik/pemegang hak atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional.

b. Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah

Menjelang penghujung dekade 1960-an kalangan perbankan banyak menggunakan fidusia sebagai lembaga jaminan atas tanah dalam praktek pemberian kredit bank. Sayangnya, langkah kreatif tersebut "dijegal" oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada tahun 1971 menetapkan bahwa pembebanan fidusia sebagai jaminan utang hanya sah sepanjang menyangkut benda-benda bergerak.

⁶⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Prinsip Dasar dan Isyu di Seputar Undang-undang Hak Tanggungan*, Makalah disampaikan pada Seminar Kesiapan dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan UUHT, Bandung, Mei 1996.

Sejak diundangkan UURS, hukum jaminan atas tanah di Indonesia mengalami "pengayaan", yakni dengan dikukuhkannya fidusia sebagai lembaga jaminan atas tanah. Pengukuhan tersebut menutup celah yang ada pada hukum jaminan atas tanah karena secara yuridis formal hak pakai selama seperempat abad dibiarkan tercecer dalam praktek pemberian jaminan utang.⁶⁵

Berkenaan dengan penggunaan istilah, seorang pakar menyarankan sebaiknya tidak lagi disebut dengan nama fidusia atau FEO, melainkan dirumuskan sebagai "penyerahan hak milik sebagai jaminan utang".⁶⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 UURS, objek fidusia adalah :

1. hak pakai atas tanah negara ;

⁶⁵ Yuwono Prianto, *Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Jurnal Ilmiah Ilmu hukum, Era Hukum No. 1/th. I/1994, hlm. 127.

⁶⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 1988, hlm. 433.

2. bangunan rumah susun dan satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara.

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa penggunaan fidusia bagi hak pakai tersebut kiranya hanya untuk sementara, menunggu terbentuknya UUHT yang dimaksud dalam Pasal 51 UUPA. Lebih baik kiranya, jika oleh undang-undang tersebut juga dinyatakan sebagai objek hak tanggungan, dengan demikian fidusia dikhususkan untuk benda-benda bukan tanah, termasuk bangunan dan tanaman yang dibangun dan ditanam di atas tanah sewa milik orang lain.⁶⁷

Meskipun dalam UUHT disebutkan bahwa atas rumah susun dan kepemilikan atas kesatuan rumah susun yang didirikan di atas tanah hak pakai atas tanah negara (penjelasan Pasal 27 UUHT) dapat dipasang hak tanggungan sedangkan dalam UURS dalam Pasal 12 disebutkan bahwa kesatuan rumah susun yang terletak di atas tanah hak pakai atas tanah negara dapat

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 432.

dibebani fidusia dan pembebanannya harus dilakukan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta akta pembebanan tersebut harus didaftarkan di Kantor Agraria. Tetapi dalam Pasal 15 ayat (2) UURS disebutkan bentuk dan isi akta PPAT dan hal-hal lain mengenai pencacatan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.

Dengan adanya UU Fidusia, dengan jelas menentukan bahwa rumah yang dibangun dan kesatuan rumah susun yang berdiri/didirikan diatas tanah hak pakai bukan atas tanah negara yang menurut UUHT tidak dapat dibebani hak tanggungan merupakan objek lembaga fidusia menurut UU Fidusia yang pembebanannya harus dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan akta pembebanan tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertipikat fidusia dan

adanya Pasal 4 UUHT yang menentukan hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah :

- a. Hak Milik ;
- b. Hak Guna Bangunan ;
- c. Hak Guna Usaha ; dan
- d. Hak Pakai atas tanah negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah-tangankan.

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU Fidusia, pembebanan fidusia dilakukan hanya dengan membuat perjanjian dibawah tangan atau notariil terserah kepada para pihak maka setelah berlakunya UU Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta notaris, untuk kemudian benda yang dibebani fidusia tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam

lingkup Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Perlu dipertanyakan apakah yang wajib didaftarkan bendanya atau akta pembebanannya disertai bukti pemilikan benda objek fidusia karena Pasal 11 ataupun penjelasannya dengan jelas menyebutkan benda. Tetapi secara logika seharusnya yang didaftarkan adalah akta pembebanannya disertai bukti pemilikan benda yang dibebani fidusia. Pasal 11 Ayat (2) menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia baik yang berada di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri wajib didaftarkan oleh kreditor/penerima jaminan fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan ada kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pasal 12 Ayat (2), menyebutkan untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh

wilayah negara Republik Indonesia. Ayat (4), menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden (Keppres). Menurut Pasal 39 UU Fidusia, Kantor pendaftaran fidusia dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah UU Fidusia diundangkan, yaitu pada tanggal 30 September 2000.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (4) tersebut, maka dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Keppres No. 139/Tahun 2000) Tentang Pembentukan kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Keppres No. 139/Tahun 2000, menyatakan Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

5. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Pihak ketiga di sini diartikan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak mendahului, seperti penjual yang memiliki hak istimewa, ekspediteur dengan hak mendahului, dan pemegang gadai.

Mengenai hal ini dapat kita simak yurisprudensi yang pernah ada misalnya Keputusan *Hoge Raad* mengenai *Sio Arrest*, tanggal 22 Mei 1953. Terhadap pihak ketiga penjual dan ekspediteur, *Hoge Raad* pernah mempertimbangkan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia hanya diakui jika tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga. Meskipun dalam perkara *Sio Arrest* itu pihak ketiganya adalah pemegang fidusia yang lain (terjadi fidusia ulang), akan tetapi dapat juga diterapkan untuk pihak ketiga yang lain, seperti penjual dan ekspediteur.

Selanjutnya pada tahun 1970 *Hoge Raad* dengan *Arrest* 6 Maret 1970 (*Pluvier Arrest*) juga memutuskan bahwa hak istimewa dari penjual lebih tinggi tingkatannya dari hak mendahului seorang pemegang fidusia. Dalam perkara lain (*Van Gend en Loo Arrest*), *Hoge Raad* pada tanggal 7 maret 1975

memutuskan bahwa hak mendahulu dari ekspediter lebih diutamakan dari pada hak mendahulu seorang pemegang fidusia, khusus terhadap barang-barang yang masuk kekayaan debitor melalui perantara ekspediter tersebut.⁶⁸

Melihat penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sebelum adanya undang-undang jaminan Fidusia kedudukan penerima fidusia dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang mempunyai hak mendahulu adalah lemah dan tidak pasti. Sedangkan terhadap hak-hak mendahulu lainnya, harus diperhitungkan dan dinilai secara individuil, per kasuistis, dengan tidak melupakan ketentuan Pasal 1339 dan 1349 KUHP.

6. Eksekusi Jaminan Fidusia

a. Praktek Peradilan Berkaitan Dengan Lembaga Fidusia

Seperti halnya dalam hukum jaminan lain, maka aspek hukum eksekusi yang diatur dalam UU Fidusia juga banyak menyangkut pelelangan.

⁶⁸ Business News, *Op. Cit.*, 6 Juli 2000, hlm. 8.

Sejarah memang telah membuktikan pada banyak masyarakat di dunia terdapat persepsi bahwa penjualan kembali suatu barang melalui pelelangan umum adalah lebih menguntungkan atau lebih menjanjikan prospek harga jual yang lebih baik, karena di situ banyak calon pembeli hadir. Karenanya, banyak negara yang melalui peraturan perundangannya mewajibkan Instansi/Badan Pemerintah dan Lembaga Peradilan untuk menjual barang inventaris dan atau barang sitaan tertentu melalui lelang. Akibatnya lelang tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana perdagangan tetapi seringkali juga menjadi bagian dari proses objektif.

Akan tetapi kenyataannya terdapat perbedaan antara lelang eksekusi dengan lelang sukarela. Dalam lelang eksekusi posisi penjual dan pembeli tidak sama. Dalam lelang eksekusi ada faktor terdesak di mana penjual sangat butuh, sementara pembeli tidak. Ini berakibat harga lelang eksekusi cenderung di bawah nilai

wajar, atau di bawah harga pasar. Rendahnya lelang eksekusi juga dibarengi dengan kenyataan mengenai risiko pengosongan dan biaya eksekusi serta bea lelang yang relatif lebih tinggi dari pada lelang sukarela.

Citra lelang eksekusi juga seringkali mendapat kecaman, karena penetapan harga limit atas barang yang dilelang dianggap terlalu rendah atau hanya mengutamakan kepentingan (tagihan) kreditor saja. Memang juga telah semakin besar dan atau semakin kompleks. Akibatnya, jasa penilai (*appraisal*) atau perusahaan penilai pada waktu belakangan ini menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam menetapkan harga limit terendah barang yang akan dilelang. Kebutuhan akan jasa penilai ini menjadi sangat *urgent* (mendesak) pada lelang eksekusi karena sangat terkait dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi hukum yang lama dan masih berlaku serta hukum yang baru seperti UU Fidusia ternyata belum

mengatur penggunaan penilaian atau *appraisal* dalam penerapan harga limit terendah barang yang akan dilelang.

Pada seminar tentang hipotik dan lembaga-lembaga jaminan oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tanggal 28-30 Juli 1977 di Yogyakarta, antara lain, disarankan :⁶⁹

"Oleh karena ketentuan dalam perundang-undangan sekarang menetapkan bahwa eksekusi terhadap perjanjian-perjanjian jaminan harus dilakukan lewat pelelangan umum, dirasakan sangat merugikan baik pihak kreditor maupun pihak debitor, maka disarankan supaya dibuka kemungkinan eksekusi di bawah tangan berdasarkan harga tertinggi dari calon pembeli yang diajukan oleh kedua belah pihak".

Oleh karena itu, tidak heran jika melalui UUHT telah dimulai era baru di bidang hukum jaminan dengan dimasukkannya cara baru

⁶⁹ Bachtiar Sibarani, *Aspek Hukum Eksekusi jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 11, 2000, hlm. 21.

eksekusi hak tanggungan yaitu dengan cara menjual di bawah tangan. Karena di bawah tangan artinya pemilik barang jaminan harus memberikan persetujuan dan tanda-tangannya maka penentuan harga tentunya harus juga dengan persetujuan pemilik barang jaminan.

Sebelum adanya UU Fidusia, eksekusi benda bergerak yang diikat dengan fidusia pada umumnya tidak melalui lelang tetapi dengan mengefektifkan kwitansi kosong yang sebelumnya telah ditanda-tangani oleh pemilik benda jaminan atau debitor.

Pada waktu yang lalu, mungkin tidak ada eksekusi jaminan fidusia yang melalui pelelangan umum. Selain itu, pada waktu yang lalu sangat banyak objek jaminan fidusia pada perbankan yang tidak ada atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Sesungguhnya pada waktu yang lalu, pengikatan jaminan secara fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak diumumkan. Akibatnya banyak pengikatan fidusia

yang terkesan ragu-ragu. hal ini terlihat dari banyaknya pengikatan pendamping fidusia seperti kuasa menjual, kwitansi kosong, pengakuan utang dan sewa beli.

Berbeda dengan benda tetap seperti tanah, maka UU Fidusia menghendaki sebelum pelelangan barang sudah dalam penguasaan kreditor atau penerima fidusia. Pasal 30 UU Fidusia menentukan; Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Ketentuan tersebut di atas sudah sangat tepat terutama mengingat objek fidusia adalah benda bergerak. Seperti diketahui Pasal 1977

KUHPer antara lain, menentukan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Namun demikian Pasal 30 tersebut masih perlu diatur lebih lanjut terutama mengenai prosedur permintaan bantuan pihak yang berwenang, mungkin harus dengan permintaan tertulis dan melampirkan dokumen (fotocopy sertipikat fidusia). Artinya, perlu diatur mengenai bagaimana mekanisme dalam hal pemilik jaminan tidak bersedia menyerahkan barang jaminannya untuk dieksekusi.

Selanjutnya dalam Pasal 31 UU Fidusia disebutkan bahwa dalam hal, benda yang menjadi objek fidusia terdiri atas benda perdagangan efek/saham yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Karena ketentuan ini menggunakan kata dapat maka pelelangan atas saham atau efek dapat

dilakukan melalui pialang atau melalui Kantor lelang negara.

Hampir dapat dipastikan mengingat biaya eksekusi dan untuk kepastian hukum di masyarakat, maka tidak mungkin semua jenis benda bergerak dapat dijadikan jaminan untuk semua jumlah utang tanpa pembatasan minimum. Oleh karena itu kiranya sangat perlu juga diatur mengenai benda bergerak apa saja yang mungkin atau yang dapat diikat dengan jaminan fidusia dan berapa nilai terendah pinjaman uang yang dapat menggunakan jaminan fidusia.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia atau yang berhak <Pasal 41 Ayat (1) UU Fidusia>. Kewajiban ini perlu diatur lebih lanjut mengingat pengalaman membuktikan bahwa ada kalanya pemilik benda jaminan menolak menerima kelebihan hasil lelang dengan pelbagai alasan. Apabila pemberi

dan penerima fidusia sepakat itu juga dapat diajukan ke Kantor Lelang di wilayah hukum objek fidusia berada atau domisili penerima fidusia.

Sebelum UU Fidusia, eksekusi terhadap jaminan fidusia melalui proses litigasi. Di mulai dari pengajuan gugatan, proses dan putusan pengadilan. Dalam hal putusan pengadilan sudah *in kracht van gewijede* atau putusan yang memuat ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad* <Pasal 180 (1) HIR> maka eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan.

Dua contoh putusan pengadilan menyangkut lembaga fidusia, untuk memberi gambaran bahwa dalam proses litigasi, Hakim telah memberi pertimbangan Hukum dengan orientasi pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Aspek kepastian hukum, agar dengan kepastian hukum itu masyarakat akan lebih tertib. Hukum berfungsi menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Aspek kemanfaatan, agar pelaksanaan dan penegakan hukum itu memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
3. Aspek adil dan patut, agar dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, keadilan dan kepatutan diperhatikan.⁷⁰

Sudikno Mertokusumo mengharapkan agar ketiga aspek tersebut diterapkan secara proposional seimbang.

Contoh :

1. *Fiducia Eigendoms Overdracht* dan *yurisprudensi*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1500 K/Sip/1978, tanggal 2 Pebruari 1980.⁷¹

- a. Dengan isi pertimbangan Hukum dalam perkara ini diperoleh suatu perkembangan Hukum bahwa Lembaga Fidusia tidak terbatas pada barang bergerak saja.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 134.

⁷¹ *Varia Peradilan*, Nomor perdana Tahun 1985.

- bahwa Hukum Adat mengenal asas pemisahan horisontal sehingga seseorang dapat mempunyai hak milik atas bangunan rumah terlepas dari hak atas tanahnya.
 - bahwa perjanjian dengan jaminan fidusia dapat dilakukan terhadap bangunan rumah diatas tanah negara, atau tanah dengan hak sewa atau hak pakai atau hak pengelolaan.
 - UURS, dapat dijadikan jaminan fidusia, bilamana tanahnya adalah tanah hak pakai atas tanah negara.
- b. Pokok isi pertimbangan Mahkamah Agung, diuraikan sebagai berikut ;
- bahwa hubungan hukum antara Fa Megaria dengan Bank BNI diterangkan dalam PMK (Persetujuan Membuka Kredit) yang di dalamnya mengandung suatu perjanjian tentang: penyerahan Hak Milik Atas Dasar

Kepercayaan (*Fiduciare Eigendoms Overdrachts, FEO*).

- bahwa dalam kenyataan (*in feite*), benda jaminan tersebut tetap berada dalam tangan debitor, akan tetapi hak milik atas benda tersebut diserahkan kepada kreditor, dalam hal ini kreditor hanya sebagai: *Bazitloos eigenaar*, sehingga kreditor tidak boleh mendaku benda jaminan tersebut.
- bahwa dengan tidak dibayarnya kredit tersebut, sesuai ketentuan PMK, maka kreditor dapat melakukan "Penjualan Umum" atas objek jaminan fidusia.
- bahwa masalah lain dalam perkara ini adalah menyangkut peranan PUPN yang telah melakukan penagihan atas tagihan kreditur, tindakan PUPN membuat "Surat Pernyataan Bersama"

adalah sah menurut hukum karena hal itu dibuat berdasarkan adanya PMK yang berlaku antara kreditor dan debitor. PUPN telah berperan untuk mempercepat proses dan prosedur penagihan piutangnya.

2. Hipotik ataukah Fiduciare Eigendoms Overdracht (jaminan kredit)

Putusan Mahkamah Agung No. 3216 K/MA/1984.⁷²

- bahwa hak atas tanah, kecuali berbentuk hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, tidak dapat dibebani hipotik.
- bahwa tanah di mana berdiri rumah sengketa, statusnya baru dalam taraf proses penyelesaian HGB.
- bahwa rumah sengketa yang berdiri di atas tanah yang belum diketahui jelas status hak tanahnya, dapat dibebani jaminan fidusia.

⁷² *Ibid.*

Secara garis besar disampaikan di sini bahwa berbagai uraian di atas adalah dimaksudkan untuk menambah wawasan kita dalam menegakkan UU Fidusia dengan berorientasi pada penanganan eksekusi jaminan fidusia yang tidak terlepas dari sistem Peradilan Indonesia.

b. Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh-atau dihadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN), dimana notaris dijadikan sebagai "Pejabat Umum" (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris, dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHP.⁷³

Kekuatan pembuktian akta otentik, demikian juga akta notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-

⁷³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983, hlm. 48.

yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menanda-tanganinya mengakui kebenaran dari tanda-tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan ini, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan

yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menanda-tanganinya mengakui kebenaran dari tanda-tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan ini, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan

sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian materiil dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya.

Diperoleh suatu kesimpulan bahwa sekalipun suatu akta otentik memiliki suatu kekuatan pembuktian sempurna (*Volledigbewijs*), namun tidak tertutup kemungkinan timbulnya pembuktian balik (*tegenbewijs*).

Kekuatan pembuktian sempurna, menurut Komentar Pasal 154 Ayat (4) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), adalah :⁷⁴

Bukti ini walaupun hanya satu sudah cukup untuk memutus perkara demi kemenangan pihak yang

⁷⁴ BPH Hapsoro Hadiwidjojo, *Bahan Kuliah, Hukum Acara Perdata, Membaca Dan Mengerti HIR*, Edisi Revisi, RMJ Koosmargono dan Mochammad Dja'is, Semarang: Seksi Hukum Perdata Undip, 1994, hlm. 74.

mengajukan alat bukti tersebut, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya, seperti alat bukti lawan yang lebih kuat.

Contohnya akta otentik, kalau akta ini dipungkiri oleh pihak lawan, dan lawan dapat membuktikan bahwa akta otentik itu salah atau palsu, maka lawan yang akan menang (yang mengajukan bukti akta otentik akan kalah).

Di dalam peraturan perundang-undangan, kekuatan pembuktian sempurna digunakan istilah : menjadi bukti cukup.⁷⁵

Pasal 165 HIR, menyatakan :

"Akta otentik, adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuat itu, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta itu dan juga yang ada dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini, hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta itu".

- Akta adalah tulisan yang memuat fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

suatu hak atau perikatan, ditanda-tangani oleh para pihak yang bersangkutan, dengan maksud untuk menjadi bukti.

Singkatnya akta adalah tulisan yang dibuat untuk menjadi bukti.

- Akta otentik adalah akta yang dibuat, pegawai yang bersangkutan membuat akta itu, dihadapan artinya yang membuat (isi akta) adalah pihak-pihak yang bersangkutan, sedang pegawai umum hanya menyaksikan dan membacakan kemudian menjelaskan isinya kepada para pihak.

Pasal 165 HIR, tidak menentukan kekuatan pembuktian bagi akta-akta selain akta otentik. Maka terserah hakim, apakah suatu kuitansi dapat diterima sebagai alat bukti kepada pihak ketiga (masyarakat umum). Apabila suatu akta dituduh palsu, maka akan dijalankan suatu proses tentang insiden pemalsu, acara ini disebut *VERIFICATIE PROCES* (Pasal 138).⁷⁶

Bukti yang cukup (bukti sempurna) artinya:

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

- *Hakim terikat* (hakim wajib) untuk menerima akta tersebut sebagai suatu yang benar. Hal ini berbeda dengan bukti bebas.
- *Para pihak terikat*, maksudnya jika ia membantah, maka ia harus membuktikan kebenaran bantahannya. Hal ini adalah berbeda dengan akta di bawah tangan. Di sini yang memakai/menggunakan tulisan itu harus membuktikan keasliannya.

C. Akibat Kepailitan Bagi Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia

1. Pengertian Kepailitan

Di dalam lalu lintas hukum khususnya hukum perjanjian, terdapat dua pihak atau lebih yang terkait oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (*creditor*) dan debitur (*debitor*).

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak

berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah "onderwerp object".

Di dalam buku Anglo Saxon, prestasi itu dikenal dengan istilah "Consideration". Tidak ada satu definisi pun yang lengkap, yang mampu menggambarkan pengertian consideration itu.

Menurut Jesse S. Raphael, AB.LL.B : ⁷⁷

"Consideration is not easy to explain in a single definition. In general, it consist, in the giving up of some legal right by one of the parties in exchange for the promies of the other".

Menurut A. James Barnes : ⁷⁸

"Consideration is usually defined as either a detrimen to the promies or a benefit to the promisor, which was bergained for and given in exchangefor the promies".

Ronald A. Anderson, menggariskan bahwa : ⁷⁹

⁷⁷ Jesse S. Raphael, AB.LL.B, *The collier Quick and easy Guide to Law*, Colloier Books, New York, NY. Edisi pertama, 1962.

⁷⁸ A. James Barnes, *A Guide to Bussines Law*, Learning Systems Company, Richard. D. Irwin, INC. Home-Wood, Illionis, 1981.

⁷⁹ Ronald A. Anderson, *Bussines Law*, South Western Publishing, Co. Edisi kesebelas, 1981, hlm. 170.

"Consideration is what a promisor demands and receives as the price for the promise. Consideration is some thing to which the promisor is not otherwise entitled and which the promisor specifies as the price for the promise".

Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan, bahwa prestasi (*Consideration*) merupakan suatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.⁸⁰

Di dalam KUHPer Buku III mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu tuntutan-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan "Hukum Perutangan". Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau "kreditor", sedangkan pihak yang wajib memenuhi

⁸⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, terjemahan dari *Business Law*, oleh SB. Marsh dan J. Soulsby, Alumni Bandung, 1980, hlm. 93.

tuntutan dinamakan pihak berutang atau "debitor". Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "Prestasi", yang menurut undang-undang dapat berupa :

- 1) menyerahkan suatu barang ;
- 2) melakukan suatu perbuatan ; dan
- 3) tidak melakukan suatu perbuatan.⁸¹

Di dalam KUHPer, prestasi yang hendak dilakukan oleh masing-masing pihak mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- a. prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1333-1465) ;
- b. prestasi harus mungkin dan halal (Pasal 1335-1337) ; dan
- c. prestasi dapat berupa satu perbuatan atau serentetan perbuatan terus menerus.

Di dalam praktek hukum, acapkali seseorang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya (prestasinya), bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (*wanprestasi*).

⁸¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 123.

Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu:⁸²

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Terlambat memenuhi prestasi ; dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Di dalam dunia perdagangan, apabila debitor tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditor disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa, maka telah disiapkan suatu "pintu darurat" untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga "Kepailitan" dan "penundaan pembayaran". Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPer.

Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah "pailit" dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda.

⁸² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, Cetakan kedua, 1979, hlm. 18.

Di dalam bahasa Perancis, istilah "faillite", artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atauu berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut lefailli. Untuk arti yang sama di dalam bahasa belanda dipergunakan istilah failliet. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenak istilah "to fail" dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah "fallire".⁸³

Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berutang) yang berhenti membayar (tidak membayar) utang-utangnya.⁸⁴

Istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya.⁸⁵ Tetapi debitor dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, debitor

⁸³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Pemundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 27.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

⁸⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang & tentang Perwasitan, Kepailitan dan pemundaan Pembayaran*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 28

berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.⁸⁶

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah "bankruptcy".⁸⁷

Dalam *Black Law Dictionary*, Edisi kelima, 1979, dijelaskan bahwa :

Bankruptcy sebagai "The state or condition of one who is unable to pay his debt as they are, or become, due".

2. Kepailitan Harus Dinyatakan Dengan Putusan Hakim

Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah "Kepailitan".

Seorang debitor (yang berutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Kewenangan pengadilan untuk

⁸⁶ Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, 1982, hlm. 475.

⁸⁷ Ny. Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta, 1981, hlm. 4.

menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 2 UU Kepailitan.

Campur tangan pemerintah (pembentuk undang-undang) sangat perlu, karena dengan demikian pengadilan dapat melakukan langkah-langkah preventif, dapat melakukan pensitaan umum (eksekusi massal) terhadap harta kekayaan debitor demi kepentingan para kreditor.⁸⁸

Dalam Peraturan Kepailitan yang lama disebutkan, bahwa pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Raad Van Justitie. Raad Van Justitie merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang Eropa (hakim gubernemen), baik untuk daerah Jawa dan Madura, maupun untuk daerah luar Jawa dan Madura hal ini diatur dalam *Reglement op de rechtterlijke Organisatie en Hett Beleid Der Justittie*, atau disingkat RO. Tetapi Raad Justitie dapat pula merupakan peradilan tingkat banding, terhadap

⁸⁸ Ronald A. Anderson, *Op. Cit.*, hlm. 510.

perkara-perkara yang telah diputus, baik oleh *Residentie-gerecht* maupun oleh *Landraad*.⁸⁹

Di Indonesia saat ini, menurut Pasal 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :⁹⁰

1. Pengadilan umum ;
2. Pengadilan Agama ;
3. Peradilan Militer ; dan
4. Peradilan Tata Usaha negara.

Pengadilan umum dibedakan menjadi :

1. Pengadilan negeri, yaitu pengadilan umum sehari-hari yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama, segala perkara perdata dan perkara sipil untuk semua golongan penduduk (Warga negara dan orang asing).
2. Pengadilan Tinggi, adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau

⁸⁹ Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1970, cetakan kedelapan, hlm. 20-37.

⁹⁰ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

perkara pidana yang telah diadili/diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama.

3. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan, yang bertugas antara lain menyelesaikan perkara pada tingkat kasasi baik perkara perdata maupun perkara pidana.⁹¹

Dengan adanya pembagian pengadilan seperti tersebut di atas dengan masing-masing kompetensinya, maka layaklah apabila pada saat ini perkara-perkara yang menyangkut kepailitan diperiksa pada Pengadilan Negeri.

Dengan lahirnya UU Kepailitan, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan kepailitan adalah sebuah pengadilan khusus dengan nama pengadilan Niaga. Akan tetapi mengingat kebutuhan yang mendesak dan keterbatasan sumber dana dan sumber daya yang ada, maka untuk pertama kali

⁹¹ C.S.T. Cansil, *Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, cetakan pertama, hlm. 39.

Pengadilan Niaga didirikan di Jakarta Pusat dengan lingkup kewenangan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Berbeda dari ketentuan sebelumnya, Pasal 1 UU Kepailitan menegaskan bahwa paling sedikit harus ada dua kreditor, dan debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Keharusan adanya sedikitnya dua kreditor adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPer di mana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitor antara para kreditornya harus dilakukan secara *pari passu pro rata parte*. Selanjutnya Pasal 1 UU Kepailitan menetapkan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dan terhadap siapa saja permohonan tersebut dapat diajukan.

Yang menjadi persoalan ialah, apakah yang menjadi ukuran bagi "Keadaan tidak membayar/berhenti membayar" tersebut? Hal ini tidak dijumpai perumusannya, baik di dalam

undang-undang yurisprudensi, maupun pendapat para sarjana. Hanya ada pedoman umum yang disetujui oleh para pengarang, yaitu untuk pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitor tidak mampu untuk membayar utangnya, dan tidak diperdulikan, apakah berhenti membayar itu sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar.⁹²

Sebagai suatu perbandingan, menurut "Bankrupcy Ordinance 1959", yaitu suatu peraturan kepailitan yang berlaku di negara tetangga kita Malaysia, menentukan syarat-syarat atau tanda-tanda perbuatan kebangkrutan ialah :⁹³

"si debitor dalam wilayah persekutuan atau di lain tempat secara curang memindahkan (a *farudulent conveyance*) seluruh harta kekayaannya atau sebagian; atau secara curang korupsi, menghadiahkan, menyerahkan, atau

⁹² Siti Soemari Hartono, *Op. Cit.*, 1981, hlm. 8

⁹³ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia-Kapita selekta*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1980. hlm. 21

mengoperkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya".

Pembuktian tentang keadaan debitor yang "berhenti membayar" itu cukup dilakukan secara sederhana (sumir), artinya pengadilan di dalam memeriksa perkara kepailitan itu tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata. Di dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 164 HIR, Pasal 248 Rbg, Pasal 1866 KUHPer) dikenal beberapa alat bukti, yaitu:

- a. Alat bukti tertulis ;
- b. Pembuktian dengan saksi ;
- c. Persangkaan-persangkaan ;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Selain itu masih dikenal beberapa alat bukti yang lain yaitu :

- a. Pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) ;
- b. Keterangan ahli (Pasal 154 HIR) ;
- c. Pembukuan perusahaan (Pasal 138 HIR) ; dan

4. Pengetahuan hakim (Pasal 78 Ayat 1 UU no. 1/1950 tentang Mahkamah Agung yang berdasar peraturan peralihan UU No. 4/1985 tentang Mahkamah Agung dan Yurisprudensi sampai sekarang masih berlaku).

Semangat pemeriksaan secara sumir itu terlihat dalam Pasal 5 Ayat (3) UU Kepailitan yang dengan tegas disebutkan "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) telah terbukti".

3. Akibat Putusan Kepailitan

a. Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan

Menurut UU Kepailitan, terhadap seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Menurut Pasal 1 UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap seorang debitor dalam hal :

- 1) Debitor telah berada dalam keadaan berhenti membayar, yaitu tidak mampu atau tidak mau membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan
- 2) Terdapat dua atau lebih kreditor yang salah seorang dari para kreditor itu piutangnya sudah dapat ditagih.

Dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan niaga, maka semua harta kekayaan debitor dinyatakan sebagai harta pailit. Terhadap harta pailit itu dilakukan likuidasi oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Debitor yang dinyatakan pailit itu tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan hartanya, kecuali dalam rangka melakukan pemberesan hartanya itu berkaitan dengan kepailitan tersebut.

Dengan adanya keputusan kepailitan dan terhitung sejak tanggal putusan kepailitan, seorang debitor kehilangan hak untuk mengurus dan mengalihkan kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit (Pasal 22 UU Kepailitan). Selanjutnya dalam Pasal 23 UU Kepailitan, walaupun debitor melanggar ketentuan Pasal 22 UU Kepailitan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi boedel pailit. Ketentuan ini tidak mengakibatkan si pailit menjadi tidak mampu membuat perjanjian. hanya mengenai harta yang termasuk boedel kepailitan, si pailit kehilangan wewenang untuk mengurusnya dan mengalihkannya.

Dengan dijatuhinya putusan kepailitan, maka "Kurator" atas Balai Harta peninggalan (BHP) atau *official assignee* bertindak selaku "pengampu" dari si pailit⁹⁴ dan bertugas untuk melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap

⁹⁴ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 74.

boedel di bawah pengawasan Hakim Komisaris <Pasal 12 Ayat (1) UU Kepailitan>. Kurator tersebut harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor. Akan tetapi apabila debitor/ kreditor tidak mengajukan permohonan pengangkatan kurator, maka BHP bertindak selaku kurator.

Kurator selain BHP tersebut adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (Pasal 67 A UU Kepailitan).

Salah satu hal yang masih menjadi perbincangan sampai saat ini, ialah tentang kedudukan BHP. Apakah BHP, dalam bertindak merupakan wakil dari debitor atau kreditor? Pertanyaan ini belum ada jawabannya di dalam Peraturan Kepailitan.

Salah seorang sarjana, yaitu Vollmar, berpendapat bahwa BHP dalam melakukan tindakan pemberesan harta debitor bertindak secara tidak langsung untuk dan sebagai wakil debitor.⁹⁵ Akan tetapi dalam praktek (yurisprudensi) dengan HR tanggal 5 Maret 1920 dan HR tanggal 28 Oktober 1926 memutuskan bahwa kedudukan BHP tidak dapat dianggap sebagai pihak yang mewakili debitor di dalam kepailitan.

Di samping Peraturan Kepailitan, dalam hukum perdata internasional dijumpai pula istilah *renvooi* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *penunjukan kembali*.

Timbulnya *renvooi* dalam hukum perdata internasional disebabkan oleh adanya aneka hukum atau "*conflict de systemes en droit international prive*".⁹⁶

⁹⁵ HFA. Vollmar, *De Faillissementwet*, vierde druk, HD. Tjeenk Willink & Zoon NV. Harlem, 1953, hlm. 160.

⁹⁶ S. Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketiga, Jilid kedua, Cetakan ketiga, Bandung: PT. Eresco, 1988, hlm. 2.

Di dalam Peraturan Kepailitan, *renvooi* itu diterapkan pada kasus tertentu, yaitu apabila tagihan-tagihan kreditor dibantah oleh Kurator BHP dan seorang atau lebih, sedangkan hakim pengawas tidak berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat itu, maka hakim pengawas akan menyerahkan penyelesaian perbedaan pendapat itu kepada Hakim Pengadilan Negeri yang ditentukannya, tanpa perlu memanggil pihak-pihak lagi.

Ada kemungkinan sebelum debitor dijatuhi putusan pailit, ia telah berperkara dengan orang lain yang bersumber dari wanprestasi debitor. Mungkin pula dalam sengketa itu, harta pailit dijatuhi sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekutorial.

Dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan dan upaya hukum atas penyitaan itu akan gugur (tidak mempunyai kekuatan lagi), karena dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan di atas

beralih menjadi penyitaan kepailitan atau sita umum yang pelaksanaannya akan ditangani oleh BHP.

Menurut Kartono, S.H., :⁹⁷

"..... bahwa yang dimaksudkan ialah pelaksanaan yang telah dimulai, tetapi belum selesai, sebab kalau sudah selesai, maka perkataan harus dihentikan itu tidak pada tempatnya, apa yang sudah selesai tidak usah dihentikan. Dengan perkataan lain, ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaksanaan pada saat pernyataan kepailitan selesai, jadi hasil-hasil penjualan barang-barang tersebut adalah untuk si kreditor yang telah mengeksekusinya (telah melaksanakan putusan hakim) dan tidak termasuk kepailitan".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU Kepailitan mengatur kategori tuntutan-tuntutan yang tidak menyangkut hak dan kewajiban harta kekayaan pailit. UU

⁹⁷ Kartono, *Kepailitan dan Pemundaan Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974, hlm. 45.

Kepailitan hanya mengatur tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan harta si pailit

b. Kedudukan Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan Dalam UU Kepailitan

Menurut ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan, setiap kreditor yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan ini berarti seorang kreditor pemegang hak jaminan (Hipotik, Hak Tanggungan, Hak Gadai, dan Fidusia) tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.

Ketentuan Pasal 56 adalah sejalan dengan ketentuan mengenai, dan dengan demikian mengakui, kedudukan separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana ditentukan oleh KUHPer. Pencantuman ketentuan Pasal 56 ini sangat penting bagi kepentingan dan pemberian perlindungan kepada kreditor.

Apabila kita hanya membaca ketentuan Pasal 56 nampaknya UU Kepailitan memang mengakui kedudukan separatis dari kreditor pemegang hak jaminan. Tetapi kita akan menjadi kecewa setelah kita membaca ketentuan Pasal 56 A. Pasal 56 A Ayat (1) menentukan bahwa Hak Eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari *terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan*. Ketentuan Pasal 56 A ini justru menjadi tidak sejalan dengan kedudukan separatis dari pemegang hak jaminan yang diakui oleh Pasal 56 Ayat (1) itu.

Penjelasan dari Pasal 56 A mengemukakan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam Pasal 56 A Ayat (1) itu bertujuan, antara lain :

- a. untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian ; atau

- b. untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit ; atau
- c. untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan yang disebut *standstill* atau *automatic stay*, yaitu keadaan *status quo* bagi debitor dan para kreditor, biasanya diberikan oleh undang-undang bukan setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh pengadilan atau diberikan selama dilakukan negosiasi antara debitor dan para kreditor dalam rangka restrukturisasi utang. Setelah debitor dinyatakan pailit yang terjadi hanyalah likuidasi terhadap harta pailit. Lihat misalnya *Bankruptcy Code* dari Amerika Serikat.

- c. UU Kepailitan Memperkosa Hak Kreditor Pemegang Hak Jaminan Dalam Mengeksekusi Hak Jaminan

Penjelasan Pasal 56 A Ayat (3) mengemukakan bahwa barang yang dibebani dengan Hak Agunan merupakan harta pailit. Dari penjelasan Pasal 56 A Ayat (1) dan Ayat (3) tersebut, ternyata undang-undang ini tidak taat asas (tidak konsisten). Di satu pihak ketentuan Pasal 56 Ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis dari kreditor preferen, tetapi di pihak lain ketentuan Pasal 56 A justru mengingkari kedudukan separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan Hak Agunan merupakan harta pailit.

Pasal 56 A Ayat (3) menentukan bahwa selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) , kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Ketentuan Pasal 57 menentukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 A, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) yaitu (Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Fidusia, Hipotik Kapal laut, dan Kapal Terbang) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan *insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 Ayat (1).

Menurut ketentuan Pasal 57 Ayat (2), setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yaitu telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.

Ketentuan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 A Ayat (3) dan Pasal 57, bukan saja menegaskan dan memperjelas sikap UU Kepailitan yang tidak mengakui kedudukan separatis dari kreditor pemegang hak jaminan, karena memasukkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai harta pailit, tetapi juga sekaligus telah tidak mengakui dan merenggut hak kreditor pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi sendiri hak jaminannya, yaitu dengan cara menjual benda-benda yang telah dibebani hak jaminan itu.

- d. Pasal 56 A UU Kepailitan Bertentangan Dengan UU Fidusia, Hak Gadai, dan UUHT

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penjelasan Pasal 56 A Ayat (3) mengemukakan bahwa harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh Kurator, terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak jaminan.

Ketentuan ini menciptakan keadaan yang tidak menentu bagi eksekusi hak jaminan fidusia oleh Kurator.

Di dalam praktek perkreditan perbankan, barang-barang persediaan dan benda-benda bergerak milik debitor yang memperoleh kredit dari bank hampir selalu dibebani dengan hak jaminan fidusia. Hak jaminan fidusia memberikan secara hukum hak kepemilikan kepada kreditor atas barang-barang yang dibebani dengan hak jaminan fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu ada pada debitor.

Dengan demikian, bagi benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan berupa fidusia, Kurator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan atas benda-benda tersebut. Bukankah benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan fidusia itu secara hukum adalah milik kreditor dan bukan milik debitor.

Sedangkan ketentuan gadai menentukan bahwa gadai hanya sah apabila benda bergerak yang dibebani gadai itu diserahkan kepada kekuasaan kreditor pemegang hak gadai. Terlepasnya benda bergerak yang dibebani dengan gadai dari kekuasaan kreditor akan membatalkan berlakunya gadai tersebut. Dengan demikian penyerahan benda bergerak kepada kurator akan membatalkan sahnya gadai tersebut.

Ketentuan Pasal 56 A Ayat (1) dan Pasal 57 UU Kepailitan, juga bertentangan dengan Pasal 21 UUHT. Pasal 21 UUHT tersebut menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT. Dengan kata lain, Pasal 56 A dan Pasal 57 UU Kepailitan itu menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditor pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh UUHT.

4. Siapa Yang Berhak Melakukan Penjualan Barang-barang Yang Dibebani Hak Jaminan Fidusia

Karena di satu pihak Kurator diwajibkan menuntut diserahkannya barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia untuk selanjutnya dijual, sedangkan di pihak lain penjelasan Pasal 56 A Ayat (3) hanya menentukan tentang kewajiban bagi kreditor untuk menyerahkan barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*) setelah jangka waktu 2 (dua) bulan yang ditentukan dalam Pasal 57 Ayat (2) tersebut lewat, maka menjadi tidak jelas siapa yang akan menjual barang-barang yang dibebani dengan hak jaminan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan lewat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ketentuan Pasal 57 menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 A, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi (keadaan dimana

barang atau harta pailit itu harus dijual lelang dimuka umum, dan hasilnya dibagi-bagikan kepada para kreditor). Menurut Pasal 57 Ayat (2), setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya di jual, tanpa mengurangi hak pemegang agunan tersebut.

Sedangkan pembagian hasil eksekusi hak jaminan fidusia, Ketidak jelasan yang timbul sehubungan dengan ketentuan Pasal 56 A Ayat (3) itu ialah, bagaimana uang hasil penjualan barang-barang itu akan dibagikan kepada para kreditor. Apakah hasilnya akan diserahkan seluruhnya oleh Kurator kepada kreditor preferen yang menjadi pemegang hak jaminan fidusia itu, ataukah akan dibagikan kepada semua kreditor dengan mengabaikan berlakunya Hak jaminan tersebut? Ternyata UU Kepailitan tidak berbicara apa-apa mengenai hal ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, mengenai kasus perkara kepailitan dengan jaminan fidusia pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka dapat disajikan hasilnya sebagai berikut:

1. Jumlah Perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Tabel 1

Jumlah Perkara Kepailitan
Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Tahun 1998 - Agustus Tahun 2002

No.	Uraian	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Jumlah
1.	Masuk	31	103	84	61	29	308
2.	Dikabulkan	18	23	25	21	3	90
3.	Ditolak	4	33	19	28	11	95
4.	NO	2	9	1	3	-	15
5.	Gugur	4	3	-	-	-	7
6.	Akor	-	-	-	-	3	3
7.	Dicabut	4	16	22	10	-	52
8.	Sisa Perkara	13	19	6	10	15	63

Sumber Data: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penjelasan Tabel 1, sebagai berikut:

Empat tahun terakhir, sejak diundangkannya UU Kepailitan yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 20 Agustus tahun 1998, jumlah permohonan perkara kepailitan yang masuk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejumlah 308 perkara kepailitan, (lihat Tabel 1). Jumlah tersebut tergolong tinggi, rata-rata dalam satu tahun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima 75 perkara permohonan kepailitan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 1999 merupakan yang paling banyak jumlah permohonan perkara kepailitan yang diajukan yaitu berjumlah 103 perkara, terdiri dari 13 perkara sisa tahun 1998 dan 90 perkara baru. Dari jumlah perkara kepailitan yang diajukan tersebut tidak semua permohonan diputus atau dikabulkan.

Pada tahun 1998, bulan September sampai Desember (4 bulan) perkara kepailitan yang masuk 31 perkara, jadi rata-rata 8 perkara kepailitan tiap bulan. Dari jumlah tersebut telah diputus dengan

dikabulkan 18 perkara, ditolak 4 perkara. Tahun 1999, perkara kepailitan yang masuk 103 perkara terdiri dari 13 sisa perkara kepailitan tahun 1998 dan 90 perkara kepailitan baru, dan telah diputus 23 perkara dikabulkan dan 33 perkara ditolak. Tahun 2000, perkara kepailitan yang masuk 84 perkara terdiri dari 19 sisa perkara kepailitan tahun 1999 dan 65 perkara kepailitan baru, dan telah diputus 25 perkara dikabulkan dan 19 perkara ditolak. Tahun 2001, perkara kepailitan yang masuk 61 perkara terdiri dari 6 sisa perkara kepailitan tahun 2000 dan 55 perkara kepailitan baru, dan telah diputus 21 perkara dikabulkan dan 28 perkara ditolak. Tahun 2002 pada Januari sampai Agustus (8 bulan), perkara kepailitan yang masuk 29 perkara terdiri dari 10 sisa perkara kepailitan tahun 2001 dan 19 perkara kepailitan baru, jadi rata-rata tiap bulan 2 perkara kepailitan dan telah diputus 3 perkara dikabulkan dan 11 perkara ditolak.

Hasil penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat diperoleh keterangan bahwa banyaknya

permohonan perkara kepailitan yang ditolak disebabkan tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon.

Mengenai sebab putusan NO (*niet ontvankelijk verklaard*; tidak dapat diterima), karena persyaratan gugatan tidak dipenuhi yakni menyangkut kelengkapan dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi menurut Pasal 1 UU Kepailitan, yakni adanya debitor yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan adanya debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih, sehingga harus diselesaikan dahulu melalui proses Peradilan Umum.

Putusan gugatan gugur, disebabkan karena pemohon pailit tidak pernah hadir meskipun telah diadakan pemanggilan yang sah menurut UU.

Putusan akor dapat terjadi apabila tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan kasus antara debitor pailit dengan para kreditor yang dituangkan

dalam Surat Perdamaian yang di buat oleh Hakim Pengawas.

Putusan dicabut, ada kalanya suatu permohonan perkara kepailitan yang telah diajukan dicabut hal ini disebabkan karena telah tercapainya perdamaian di luar sidang.

Dari perhitungan tersebut, ternyata bahwa perkembangan UU Kepailitan yang sudah empat tahun dioperasikan sejak tanggal 1 September 1998, belum dapat diharapkan untuk mengatasi kredit macet.

Tabel 2

Jumlah Perkara Kepailitan Dengan Jaminan Fidusia
Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Tahun 1998 - Agustus Tahun 2002

No.	Uraian	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Jumlah
1.	Masuk	16	50	40	20	10	136
2.	Dikabulkan	9	10	12	10	3	44
3.	Ditolak	2	12	9	7	2	32
4.	NO	2	9	-	1	-	12
5.	Gugur	4	2	-	-	-	6
6.	Akor	-	-	-	-	1	1
7.	Dicabut	1	7	14	4	6	32
8.	Sisa Perkara	5	15	6	4	2	32

Sumber Data: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penjelasan Tabel 2, sebagai berikut:

Dari jumlah kasus perkara kepailitan yang masuk pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejumlah 308 perkara (lihat Tabel 1), ternyata jumlah kasus perkara kepailitan dengan Jaminan Fidusia yang ada hanya sejumlah 136 perkara kepailitan (Tabel 2). Jumlah tersebut masih tergolong rendah karena hanya (44 %) dari jumlah perkara kepailitan yang masuk pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, perkara kepailitan yang didalamnya terdapat Jaminan Fidusia, ternyata tidak berdiri sendiri artinya Jaminan Fidusia dan jaminan hak lainnya, seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, maupun hak jaminan menurut Pasal 1131 KUHPer menjadi satu kesatuan *boedel* kepailitan, yang dimasukkan dalam satu perkara kepailitan.

Menurut Pasal 19 UU Kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang

diperoleh selama kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 tersebut, maka dalam perkara kepailitan akan disebutkan seluruh kekayaan si pailit, baik aktiva maupun passiva, yaitu :

- kekayaan yang merupakan jaminan utang bagi pihak ketiga (dalam hal ini para kreditornya) ;
- piutang debitor pailit yang ada pada pihak ketiga ;
- kekayaan lain yang tidak dibebani dengan kewajiban atau jaminan tertentu bagi pihak lain.

Dalam register perkara kepailitan umumnya cukup disebutkan keseluruhan harta kekayaan yang menjadi satu kesatuan dalam boedel kepailitan, sehingga keberadaan jaminan-jaminan tersebut dapat diketahui dengan jelas dengan menelaah lebih terperinci setiap obyek dalam boedel kepailitan tersebut, yang telah dibebani dengan jenis hak jaminan yang mana. Hal ini dapat diketahui dari adanya Akta Jaminan Fidusia, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Gadai, maupun Akta Hipotik yang telah dibuat untuk pembebanan terhadap obyek tersebut.

Tanpa adanya data atau bukti adanya pembebanan atas jaminan terhadap suatu obyek boedel kepailitan, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa suatu obyek tersebut termasuk dalam jaminan khusus, termasuk dalam hal ini fidusia. Maksudnya, salah satu boedel kepailitan dimungkinkan dapat dikategorikan menjadi obyek Jaminan Fidusia, dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia <Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU Fidusia>.

Namun tanpa adanya tanda bukti hak berupa sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia, maka harta tersebut merupakan harta kekayaan debitor yang digolongkan dalam jenis jaminan umum menurut Pasal 1131 KUHPer dan dalam hal debitor pailit maka akan dimasukkan dalam lingkup kepailitan menurut Pasal 19 UU Kepailitan.

2. Kedudukan Benda Jaminan Fidusia Dengan Pailitnya Pemberi Fidusia, Yang Dalam Kenyataannya Secara Fisik Masih dikuasai Oleh Debitor

Dalam hal Pemberi Fidusia (debitor) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitor dinyatakan sebagai harta pailit, tak terkecuali termasuk juga benda jaminan fidusia yang haknya telah beralih kepada Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia, yang dalam kenyataannya secara fisik benda jaminan tersebut masih dikuasai oleh debitor. Terhadap harta pailit itu dilakukan likuidasi oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Dalam proses kepailitan, apabila Pemberi Fidusia (debitor) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka benda jaminan fidusia dapat dimohonkan oleh Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia kepada Kurator untuk dipisahkan dari boedel pailit.

Benda Jaminan Fidusia milik Pemberi Fidusia yang dinyatakan pailit tidak masuk dalam boedel pailit, dengan kata lain benda jaminan fidusia yang Pemberi Fidusia (debitor) wanprestasi pun tidak dapat dimasukkan dalam boedel pailit.⁹⁸

Dari jumlah kasus perkara kepailitan dengan jaminan fidusia pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam empat tahun terakhir (dari bulan September tahun 1998 sampai bulan Agustus Tahun 2002) sejumlah 136 kasus perkara (Tabel 2.), misalnya kasus PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, menunjukkan bahwa fidusia mempunyai pengertian adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 Butir (1) UU Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

⁹⁸ I Wayan Surya Sukanta, *Wawancara Pribadi*, Mantan Hakim Niaga Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, tanggal 13 Febuari 2002.

dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari definisi diatas, jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan Penerima Fidusia, dengan kata lain sebenarnya kedalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu utang.

Dalam perjanjian jaminan fidusia terjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada kreditor, namun secara fisik benda tersebut tidak diserahkan kepada kreditor tetapi tetap ada pada debitor dengan suatu perjanjian bahwa debitor tidak

lagi menguasai benda-benda tersebut sebagai pemilik tetapi sebagai penyimpan belaka.

Dari kasus perkara kepailitan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA./JKT.PST., tanggal 14 Febuari 2000, dapat diketahui bahwa kedudukan benda jaminan fidusia dalam hal debitor dinyatakan pailit adalah, sebagai berikut:

Terjadinya perkara, antara PT. BANK DAIWA PERDANIA, berkedudukan di Jakarta Jalan Jend. Sudirman Kav. 40-41, yang dalam hal ini diwakili oleh Kiyoshige Ito, Presiden Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut telah memilih domisili hukum di Jalan Pintu Air Raya No.36-M, kantornya RASJIM WIRAATMADJA, SH., Advokat dan Pengacara di Jakarta sebagai kuasanya, mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam hal ini sebagai PEMOHON.

m e l a w a n :

PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, beralamat di Jalan Nanjung No. 192, Rt.04/Rw.11, Kelurahan

Utama, Cimahi Selatan, Bandung, Jawa Barat, sebagai TERMOHON.

Dalil-dalil Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 5 Desember 1997, pihak Termohon (PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS) telah memperoleh fasilitas kredit dari Pemohon (PT. BANK DAIWA PERDANIA) berupa Pinjaman Aksep sebesar US.\$ 1,099,980.00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dollar Amerika Serikat), yang dituangkan dalam Perjanjian:
 - a) Pinjaman Aksep LA. No. 1350/PVAKE/97 tanggal 5 Desember 1997 ;
 - b) Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1350/PVAKE/97 tanggal 5 Desember 1997 ;
 - c) Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1350/I/PVAKE/97 tanggal 24 Desember 1997 ; dan
 - d) Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1350/II/ PVAKE/97 tanggal 2 Januari 1998, yang jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 1998.

2) Guna menjamin pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya pihak Termohon telah menyerahkan Hak Milik secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) kepada Pemohon atas mesin-mesin berupa 30 (tiga puluh) Set Nissan Water Jet Loom Model LW 551-2M, berdasarkan Akta Pemindahan Hak Milik Mutlak Sebagai Jaminan Fidusia LA. No. 1350/PVAKE/97, tanggal 5 Desember 1997 dan Surat Pernyataan Penyerahan hak Milik dengan jalan Kepercayaan (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*) tanggal 19 Maret 1998.

3) Ternyata kemudian ketika fasilitas Pinjaman Aksep tersebut jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 1998 yang lalu, pihak Termohon tidak dapat melunasi pinjaman dimaksud walaupun sudah ditegur berulang kali baik oleh Pemohon maupun oleh Pengacara Pemohon terakhir melalui surat tertanggal 14 Desember 1999 No. 377/DT/XII/99, yang ternyata pihak Termohon tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon

walaupun Pemohon sudah memberikan kesempatan yang cukup lama (2 tahun).

4) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, untuk:

a) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit secara keseluruhan.

b) Meletakkan sita *Revindicatoir* atas barang-barang milik Pemohon yang ada pada Termohon berupa:

- 30 (tigapuluh) set mesin jenis NISSAN WATER JET LOOM Model LW 551-2M ()-190, yang terdapat di gedung pabrik Termohon Pailit yang terletak di Jalan Nanjung no. 192 Rt.04/ Rw.11, Kelurahan Utama, Cimahi, Bandung, Jawa Barat ; dan

Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Termohon berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan pabrik yang berada diatasnya serta segala sesuatu yang berada di dalamnya, terletak

di Jalan nanjung No. 192 Rt.04/Rw.11,
Kelurahan Utama, Cimahi Selatan Bandung,
Jawa Barat.

- c) Menyatakan Termohon (PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- d) Menyatakan sah dan berharga sita Revindicatoir dan sita jaminan yang telah diletakkan.
- e) Mengangkat Hakim Pengawas untuk kepailitan tersebut.
- f) Menunjuk Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. beralamat di Law Firm Fuady, Tommy, Aji Wijaya, Wisma Bumiputra, Lantai 7, Suite 701, Jalan Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 sebagai Kurator dalam kepailitan.
- g) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali.

h) Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara pailit ini.

Terhadap pailit tersebut TERMOHON pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1) Termohon mengakui adanya Surat perjanjian utang yang dibuat oleh PT. BANK DAIWA PERDANIA selaku Pemohon dengan PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS selaku Termohon berupa Pinjaman Aksep sebesar US.\$ 1,099,980.00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dollar Amerika Serikat), yaitu yang dituangkan dalam:

- a) Perjanjian Pinjaman Aksep LA. No. 1350/PVAKE/97 tanggal 5 Desember 1997 ;
- b) Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1350/PVAKE/97 tanggal 5 Desember 1997 ;
- c) Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1350/I/PVAKE/97 tanggal 24 Desember 1997 ; dan
- d) Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1350/II/PVAKE/97 tanggal 2 Januari 1998.

2) Adanya surat perjanjian utang yang diakui oleh Termohon, merupakan perjanjian pokok yang harus didahulukan pelaksanaannya, sebab dalam perjanjian pokok ini ada jaminan, yaitu jaminan fidusia sehingga jaminan itu harus lebih dahulu di eksekusi.

Untuk memperkuat dalil-dalilnya tersebut masing-masing pihak mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1) Alat-alat bukti Pemohon, sebagai berikut:

a) Fotocopy perjanjian Pinjaman Aksep LA. No. 1350/PVAKE/97, tanggal 5 Desember 1997, Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1350/PVAKE/97, tanggal 5 Desember 1997, Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1350/PVAKE/97 tanggal 24 Desember 1997, dan Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1350/PVAKE/97 tanggal 2 Januari 1998.

b) Fotocopy Akta Pemindahan Hak Milik Mutlak sebagai Jaminan Fidusia LA. No. 1350/PVAKE/97 tertanggal 5 Desember 1997 dan

Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik
Dengan Jalan Kepercayaan (*Fiduciare
Eigendoms Overdracht*) tanggal 19 Maret
1998.

c) Surat teguran Pemohon (PT. BANK DAIWA
PERDANIA) maupun oleh Pengacara Pemohon
terakhir melalui surat tertanggal 14
Desember 1999 No. 377/DT/XII/99, agar
Termohon (PT. MELVIN INTERNATIONAL
SYNTHETICS) menyelesaikan kewajibannya atau
membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

d) Perincian utang atau jumlah pinjaman
Termohon yang sudah jatuh tempo ditambah
bunga pada posisi per 31 Januari 2000 ialah
sebesar US.\$ 1,235,790.41.- (satu juta dua
ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus
sembilan puluh empat puluh satu per seratus
dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari:

-Total Utang Pokok US.\$ 1,099,980.-

-Total Bunga Tertunda US.\$ 135,810.41+

Total Utang US.\$ 1,235,790.41

e) Selain kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai utang kepada kreditor lain, yaitu:

- PT. Bank Finconesia, beralamat di Sentral Senayan I 6, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta Selatan.
- PT. BNI Multi Finance, beralamat di Wisma Kota BNI 46, lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. I, Jakarta Pusat.
- PT. EXIM SB Leasing, beralamat di Summitmas I, lantai 8 Jalan Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan.
- PT. Bank Merinçorp, beralamat di Plaza Mandiri, lantai 27 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan.

2) Alat-alat bukti Termohon, sebagai berikut:

- a) Surat perjanjian utang yang dibuat oleh PT. BANK DAIWA PERDANIA dengan PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, pada tanggal 5 Desember 1997, sebesar US.\$ 1,099,980.00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu

sembilan ratus delapan puluh dollar Amerika Serikat).

- b) Fotocopy Akta Pemindahan Hak Milik Mutlak sebagai Jaminan Fidusia LA. No. 1350/PVAKE/97 tertanggal 5 Desember 1997 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Dengan Jalan Kepercayaan (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*) tanggal 19 Maret 1998.

MAJELIS HAKIM

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili permohonan kepailitan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Sampai perkara ini diajukan, belum dibentuk Pengadilan Niaga selain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena itu sesuai Pasal 281 Ayat (3) UU Kepailitan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang mengadili permohonan pailit ini, walaupun Termohon Pailit tidak berdomosili hukum di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu di Bandung.

- 2) Yang dimaksud sebagai Debitor dalam perkara ini adalah Termohon (PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS), sedangkan Pemohon (PT. BANK DAIWA PERDANIA) adalah bertindak sebagai Kreditor.
- 3) Hubungan hukum antara Pemohon (Kreditor) dengan Termohon (Debitor) merupakan hubungan hukum perikatan dalam bidang hukum harta benda (*Vermogenrecht*), yang diawali dengan surat perjanjian kredit/utang dengan jaminan FEO (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*).
- 4) Sampai perkara ini diajukan, UU Fidusia masih baru sehingga Pemohon tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan hak mendahulu dari kreditor lainnya dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Dengan surat tertanggal 24 Febuari 2000, yang ditanda-tangani oleh kuasa hukum Pemohon,

Pemohon mengajukan pencabutan permohonan
pernyataan pailit Nomor: 08/PAILI/2000/
PN.NIAGA/JKT.PST.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Berdasar atas pertimbangan diatas, Majelis
Hakim berpendapat, kasus perkara permohonan
pernyataan pailit Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.
NIAGA/JKT.PST., tersebut harus dicabut maka Hakim
Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, setelah:

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Niaga/
Negeri Jakarta Pusat Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.
NIAGA/JKT.PST. yang diajukan oleh Pemohon (PT. BANK
DAIWA PERDANIA), terhadap PT. MELVIN INTERNATIONAL
SYNTHETICS, berserta segala surat-surat yang
terlampir didalamnya ;

Membaca Berita Acara Sidang untuk permohonan
pernyataan pailit itu ;

Membaca surat tertanggal 24 Febuari 2000,
perihal Pencabutan permohonan pernyataan pailit

nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., yang
ditanda-tangani oleh kuasa hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut
diatas, Pemohon (PT. BANK DAIWA PERDANIA), pada
pokoknya mohon agar PT. MELVIN INTERNATIONAL
SYNTHETICS dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 24
Februari 2000 Pemohon menyatakan mencabut permohonan
pernyataan pailit Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA/
JKT.PST. dan hal ini tidak dilarang oleh Undang-
undang yang berlaku ;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang
bersangkutan, utamanya undang-undang No. 40 Tahun
1998.

Menetapkan:

Menyatakan permohonan pernyataan pailit, Nomor:
08/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. dicabut oleh
Pemohon ;

Membebani Pemohon untuk membayar biaya
permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari ini, Kamis, Tanggal 24 Febuari 2000, tertanda Hakim Ketua Majelis Ny. Putu Supardi, SH.

Dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitor dinyatakan sebagai harta pailit. Terhadap harta pailit itu dilakukan likuidasi oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.⁹⁹

Menurut Pasal 19 UU Kepailitan, kekayaan debitor yang dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan.

Dalam proses kepailitan, apabila Pemberi Fidusia (debitor) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka benda jaminan fidusia dapat dimohonkan oleh Penerima Fidusia atau kreditor pemegang jaminan fidusia kepada Kurator untuk dipisahkan dari boedel pailit.¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil Penelitian, *Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

¹⁰⁰ Prawoto, *Wawancara Pribadi*, Kurator Balai Harta Peninggalan Semarang, Semarang, tanggal 18 Febuari 2002.

Tanpa adanya bukti pembebanan atas jaminan terhadap suatu objek boedel kepailitan, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa suatu objek tersebut termasuk dalam jaminan khusus, termasuk jaminan fidusia. Salah satu atau lebih boedel kepailitan dimungkinkan dapat dikategorikan menjadi objek Jaminan Khusus seperti fidusia, apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

3. Kedudukan Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Dengan Pailitnya Pemberi Fidusia, Yang Dalam Kenyataannya Secara Fisik Masih dikuasai Oleh Debitor

Pemaksaan seorang debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk segera melepaskan hak pengurusan terhadap harta-hartanya, jika debitor tersebut perseorangan atau pun pemilik/pengurus debitor pailit terhadap harta-harta, dalam hal debitor korporasi adalah harus dijelaskan pada debitor pailit tersebut tentang

akibat kepailitan yang meletakkan aset-aset debitor dalam penyitaan umum atau berpindahnya hak pengurusan dan pemberesan aset-aset debitor tersebut dinyatakan pailit <Pasal 12 Ayat (1) UU Kepailitan>.

Benda Jaminan Fidusia milik Pemberi Fidusia yang dinyatakan pailit tidak masuk dalam boedel pailit, dengan kata lain benda jaminan fidusia yang Pemberi Fidusia (debitor) wanprestasi pun tidak dapat dimasukkan dalam boedel pailit.¹⁰¹

Menurut ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan, setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi kreditor pemegang hak jaminan (Hipotik, Hak Tanggungan, Hak Gadai, Fidusia) tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit. Pasal ini sejalan dengan ketentuan mengenai, dan dengan demikian mengakui hak separatis pemegang jaminan sebagaimana ditentukan oleh KUHPer.

¹⁰¹ I Wayan Surya Sukanta, *Wawancara Pribadi*, Mantan Hakim Niaga Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, tanggal 13 Febuari 2002.

Dalam kasus perkara kepailitan Nomor: 38/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 20 Agustus 2001, dapat diketahui bahwa kedudukan kreditor dalam kepailitan sangat penting adalah, sebagai berikut:

Terjadinya perkara antara PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk., Jalan Yos Sudarso Kav. 85 (Sunter By Pass) Jakarta 14350, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya BUDI PRIHANTORO, SH., BUDI AGUNG, SH., dan WIDIASTUTI, SH., masing-masing sebagai Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MILLENNIUM, mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam hal ini sebagai PEMOHON.

m e l a w a n :

PT. DUTA FORT INDONESIA, beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km. 18,5 Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HERI HERJANDONO, SH., dan PARJIO, SH., berkantor di Kantor Pengacara IMAM SJAHPUTRA & ASSOCIATES, beralamat di Kompleks Duta Jayakarta Blok. B-21,

Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Jakarta Pusat
10730, sebagai TERMOHON.

Dalil-dalil PEMOHON pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk. adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1995 dengan Akta Notaris No. 36 yang dibuat dihadapan Ny. TORTY JUNIARTO, SH., Notaris di Jakarta, yang bergerak dibidang usaha lembaga pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 415/KMK. 017/1995 tertanggal 5 September 1995 dan perseroan telah "Go Public" dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya (BES) sejak tahun 1997.
- 2) Pada tanggal 23 Desember 2000 telah ditandatangani perjanjian Pengalihan/Utang secara Cessie No. 273/AKR-DFI/XII/2000 oleh dan antara PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., sebagai pihak yang mengalihkan dengan Pemohon (PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.) sebagai pihak yang menerima

pengalihan atas seluruh kewajiban/ Utang PT. DUTA FORT INDONESIA kepada PT. ANEKA KIMA RAYA, Tbk.

- 3) Perjanjian pengalihan Tagihan/Utang secara Cessie dimaksud telah diberitahukan secara tertulis oleh PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., sebagai kreditor yang lama kepada Termohon (PT. DUTA FORT INDONESIA) dan oleh karena itu Pemohon (PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.) adalah kreditor yang berhak dan sah menurut hukum.
- 4) Dengan demikian Pemohon telah memenuhi kapasitas sebagai kreditor yang berhak dan sah menurut hukum untuk menerima pembayaran dari Termohon dan sebaliknya Termohon adalah debitor yang wajib melaksanakan pembayaran kewajiban/utangnya kepada Pemohon berdasarkan perjanjian Pengalihan Tagihan/Utang secara Cessie tersebut.
- 5) Sebelum adanya perjanjian Pengalihan Tagihan/Utang dimaksud, Termohon (PT. DUTA FORT INDONESIA) melalui kuasa hukumnya telah

mengakui adanya utang yang masih tertunggak dan belum dibayar kepada PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., akan tetapi setelah beberapa kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan kewajiban/Utang Termohon kepada PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., ternyata belum ada keputusan apapun dari Termohon dan tidak melunasi kewajiban/utang Termohon sebagaimana mestinya.

- 6) Kewajiban-kewajiban Termohon atas perjanjian Tagihan/Utang secara Cessie dimaksud kepada Pemohon berdasarkan invoice/faktur berjumlah (Utang Pokok) Rp. 1.250.823.915,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- 7) Sampai diajukannya permohonan pernyataan pailit tersebut Termohon tidak menyelesaikan pembayaran kewajiban/utang tersebut kepada Pemohon, meskipun Pemohon dengan itikad baik telah memberikan somasi/teguran kepada Termohon melalui kuasa hukum Termohon.

- 8) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, untuk:
- a) Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pernyataan pailit Pemohon.
 - b) Menyatakan perjanjian Pengalihan Tagihan/ Utang secara Cessie Nomor 273/AKR-XII/ 2000 oleh dan antara PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., (sebagai pihak yang mengalihkan) dengan Pemohon (sebagai pihak yang menerima pengalihan) atas seluruh kewajiban/Utang PT. DUTA FORT INDONESIA kepada PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., adalah sah menurut hukum.
 - c) Menyatakan hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh Termohon.
 - d) Menyatakan Termohon mempunyai kreditor lainnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
 - e) Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

- f) Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengelolaan dan pemberesan harta Termohon.
- g) Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Pemohon sah dan berharga menurut hukum, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan harta kekayaan yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari.
- h) Mengangkat dan menunjuk Drs. HENSON, SH., MH., dari Kantor Konsultan Hukum Drs. HENSON, SH., yang beralamat di Jalan Taman Jati Baru Barat Nomor 20 Jakarta sebagai Kurator sementara.
- i) Menghukum Termohon untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Terhadap pailit tersebut TERMOHON pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Termohon melalui kuasa hukumnya mengakui adanya utang yang masih tertunggak dan belum dibayar kepada PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk.

- 2) Pada tanggal 1 Desember 2000, Termohon telah membayar sejumlah uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk.
- 3) Termohon melalui kuasa hukumnya mengetahui dan menerima pemberitahuan secara tertulis tentang adanya perjanjian Pengalihan/utang secara Cessie antara PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., dengan PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.

Untuk memperkuat dalil-dalilnya tersebut masing-masing pihak mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1) Alat-alat bukti Pemohon, sebagai berikut:
 - a) Surat perjanjian Pengalihan/utang secara Cessie No. 273/AKR-DFI/XII/2000 tanggal 23 Desember 2000, antara PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk. (sebagai pihak yang mengalihkan) dengan PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk. (sebagai pihak yang menerima pengalihan), yang berdasarkan invoice/faktur berjumlah (utang pokok) Rp. 1.250.823.915,00 (satu

milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus limabelas rupiah).

- b) Foto-copy/salinan pemberitahuan tentang adanya perjanjian Pengalihan/utang secara Cessie dari PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk. kepada Pemohon.
- c) Bukti pembayaran Termohon kepada PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2000.
- d) Perincian atau jumlah pembayaran yang merupakan utang Termohon kepada Pemohon sampai dengan tanggal 31 Desember 2000 berdasarkan utang pokok ditambah bunga dan denda adalah sejumlah Rp. 6.472.146.250,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan belum termasuk bunga dan denda keterlambatan lainnya yang akan diperhitungkan sampai utang tersebut

dilunasi, termasuk biaya pengacara, penasehat hukum, biaya proses pengadilan, dan lain-lainnya.

e) Surat/teguran Pemohon (kreditor) yang isinya memberitahukan Termohon melalui kuasa hukumnya, akan seluruh utang dan kewajiban Termohon terhadap PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., yang telah dialihkan kepada Pemohon dan mengingatkan Termohon untuk membayar utang pokok, bunga dan denda keterlambatan.

f) Termohon selain mempunyai utang kepada Pemohon juga mempunyai kewajiban/utang kepada kreditor lainnya, sebagai berikut:

- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta Kota, Jalan Lada nomor 1 Jakarta 11110.
- PT. Bank Eksekutif Internasional. Kantor Pusat Operasional (KPO), Jalan Mangga Besar Raya Nomor 55-B-C-D, Jakarta 11180

- PT. Eastern Polymer, Jalan Raya Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta 14110.
- PT. Asahimas Subentra Chemical, Gedung Summitmas I, Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 61-62.

2) Alat-alat bukti Termohon, sebagai berikut:

- a) Surat perjanjian utang antara Termohon dengan PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., yang masih tertunggak dan belum dibayar kepada PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., tersebut.
- b) Kuitansi tanda penerimaan tertanggal 1 Desember 2000 dari PT. ANEKA KIMA RAYA, Tbk., sejumlah uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Surat pemberitahuan secara tertulis tentang adanya perjanjian Pengalihan/ utang secara Cessie antara PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., dengan PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.

MAJELIS HAKIM

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili permohonan kepailitan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pokoknya sebagai berikut:

- 1) Hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon diawali dengan perjanjian Pengalihan/Utang secara Cessie oleh dan antara PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., dengan Pemohon (PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.), dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon dan oleh karena itu Pemohon adalah kreditor yang berhak dan sah menurut hukum.
- 2) Mengenai kreditor lainnya, ternyata tidak turut mengajukan permohonan pailit dan juga tidak memberi kuasa kepada Pemohon untuk permohonan kepailitan terhadap Termohon ini.
- 3) Berdasarkan atas pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan kebenaran permohonannya, maka permohonan harus ditolak seluruhnya.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor: 38/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT. PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

MAJELIS MAHKAMAH AGUNG RI

- 1) Pemohon (PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.) menolak putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan tingkat kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasinya.
- 2) Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Majelis Mahkamah Agung akan

mempertimbangkan, apakah permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dalam UU Kepailitan.

3) Permohonan kasasi dari Pemohon (PT: DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 7 September 2001, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 30/KAS/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. jo Nomor: 038/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sedangkan putusan yang dimohon kasasi ic. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 038/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2001.

4) Dengan demikian penerimaan permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara yang ditentukan dalam UU
Kepailitan tersebut formil dapat diterima.

5) Keberatan-keberatan kasasi yang diajukan
oleh Pemohon (PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.)
dalam memori kasasinya tersebut pada
pokoknya ialah:

a Majelis Hakim Niaga yang memutus perkara
di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
telah melakukan kesalahan berat dalam
menerapkan hukum tentang adanya kreditor
kedua/lain selain dari Pemohon kasasi.

b Adanya kreditor lain (PT. ETERNAL BUANA
CHEMICAL INDUSTRIES) selain kreditor lain,
yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi
dalam surat permohonan kepailitan.

c Keberatan-keberatan ini tidak dapat
dibenarkan karena bukti-bukti yang
diajukan Pemohon kasasi untuk membuktikan
adanya kreditor lain tidak memenuhi syarat
pembuktian.

Suatu bukti surat, baru dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat:

- Diajukan dalam bentuk aslinya ;
- Dapat berbentuk fotocopy yang harus dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan, dengan disaksikan para pihak;
- Bermeterai cukup.

6) Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentang dengan hukum dan/atau UU, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi (PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.), tersebut haruslah ditolak.

PUTUSAN MAJELIS MAHKAMAH AGUNG, sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi (PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.) ;

- Menghukum Pemohon kasasi dahulu Pemohon pailit

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam UU Kepailitan tidak diatur mengenai arti dan batasan kreditor, sehingga hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan harus menaksirkan arti dan batasan kreditor.

4. Hak Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Ketiga Dalam Hal Pemberi Fidusia Dinyatakan Pailit

Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang jaminan fidusia, artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan fidusia itu bukan merupakan harta

pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Kreditor pemegang jaminan fidusia mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan, artinya kreditor pemegang jaminan fidusia berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan Pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan UU.

Menurut Pasal 528 KUHPER, hak jaminan merupakan hak kebendaan, artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapa pun.

Penggunaan lembaga fidusia sebagai hak jaminan sangat populer dalam arti perjanjian kredit dengan ikatan jaminan fidusia sering dilakukan, baik untuk kredit dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Tidak ada pembatasan jumlah berapa kredit yang dapat dijamin dengan fidusia selama benda-benda yang diikat dengan jaminan fidusia dinilai sesuai dengan pertimbangan bank.¹⁰²

¹⁰² Hasil Penelitian, di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Jawa Tengah, Semarang, tanggal 14 Januari 2002.

Dilihat dari sudut kemanfaatan, lembaga fidusia bermanfaat bagi kedua belah pihak. Terhadap debitor lembaga ini dinilai sangat menguntungkan karena dengan fidusia debitor dapat memperoleh kredit dengan tetap menguasai benda-benda yang dijaminkan sehingga dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari atau tetap dapat digunakan untuk menjalankan usahanya. Sementara bagi kreditor adalah proses pembebanan fidusia lebih sederhana karena ikatan jaminan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditor. Dengan demikian kreditor (bank) tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk menyimpan benda-benda jaminan tersebut.

Data yang diperoleh dari Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang, Seksi Pelayanan Jasa Hukum, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang secara efektif dibuka pada bulan Juli tahun 2001, dan untuk menindak lanjuti Keppres Nomor: 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 Tentang Pembentukan Kantor

Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi, menunjukkan bahwa penggunaan jaminan fidusia oleh pelaku bisnis meningkat karena alasan jaminan fidusia sekarang lebih kuat dan menjamin kepastian hukumnya.

Menurut Pasal 11 Ayat (1) UU Fidusia, dinyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menurut Pasal 23 Ayat (2) UU Fidusia, ditentukan bahwa Pemberi Fidusia (debitor) dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima Fidusia (kreditor).

Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer. Berdasarkan peraturan-peraturan kepailitan itulah asas-asas sebagaimana tersebut dalam dua Pasal itu direalisasikan, oleh karena itu sumber kepailitan adalah KUHPer.

Menurut Pasal 1341 Ayat (2) KUHPer, menjelaskan bahwa hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang atau pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Pihak ketiga (Pembeli) yang beritikad baik ini dilindungi, karena pembeli tersebut tidak mengetahui bahwa penjualan itu tidak sah.

Dalam proses kepailitan apabila Pemberi Fidusia (debitor) wanprestasi, maka benda jaminan fidusia dapat dimohonkan oleh Penerima Fidusia (kreditor separatis) kepada Kurator untuk dipisahkan dari boedel pailit. Namun terdapat kemungkinan bahwa Pemberi Fidusia (debitor) mengalihkan atau menjual benda Jaminan Fidusia itu kepada Pihak Ketiga (pembeli).

Berkaitan dengan uraian dalam tulisan ini yang membahas mengenai hak kreditor pemegang jaminan fidusia, hal ini dapat dilihat dalam kasus perkara kepailitan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., dan kasus perkara kepailitan Nomor: 38/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.

Dalam kedua kasus perkara kepailitan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa para kreditor adalah bukan kreditor pemegang jaminan fidusia karena jaminan fidusia belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dari perkara kepailitan tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dalam UU Fidusia dan UUHT. Dengan demikian kreditor yang mengajukan perkara tersebut harus melakukan gugatan biasa dalam upaya pelunasan utangnya.

Sebelum UU Fidusia, eksekusi terhadap jaminan fidusia melalui proses litigasi, yaitu di mulai dari pengajuan gugatan, proses dan putusan pengadilan. Dengan berlakunya UU Fidusia, sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pelaksanaan titel

eksekutorial tersebut dapat dilaksanakan terpisah dari boedel pailit.

Dengan diterbitkan dan diserahkannya sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditor, maka kreditor pemegang Jaminan Fidusia akan mempunyai kedudukan yang kuat terhadap benda yang dijamin.

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan alat bukti adanya peralihan hak milik secara kepercayaan yang diberikan oleh debitor (Pemberi Fidusia) kepada Kreditor (Penerima Fidusia) sebagai pemegang jaminan fidusia, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis mencoba untuk menganalisis hasil-hasil penelitian tersebut guna menjawab permasalahan yang ada dengan kajian teori yang telah didiskripsikan pada bab II, adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Perkara Kepailitan Dengan Jaminan Fidusia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Terhitung sejak diundangkannya UU Kepailitan, sampai akhir bulan Agustus 2002, dari 308 perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah ada 90 perkara kepailitan (29%) yang dinyatakan dalam keadaan pailit. Dari jumlah itu, permohonan pernyataan pailit pada tahun 2000 tergolong tinggi rata-rata dalam satu bulan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima 2 perkara permohonan kepailitan yang dikabulkan dan yang paling sedikit adalah tahun 2002 sampai bulan Agustus (8 bulan) sejumlah 29 perkara kepailitan

yang masuk hanya 3 perkara kepailitan yang dikabulkan.

Dari jumlah kasus perkara kepailitan sejumlah 308 perkara pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, ternyata jumlah kasus perkara kepailitan dengan Jaminan Fidusia hanya ada 136 perkara kepailitan. Jumlah itu tergolong rendah karena hanya 44 % dari jumlah perkara kepailitan yang masuk pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹⁰³

Dari pengamatan penulis, dapat dikemukakan bahwa jumlah 136 perkara kepailitan dengan Jaminan Fidusia itu ternyata Jaminan Fidusia tidak berdiri sendiri artinya Jaminan Fidusia dan jaminan hak lainnya seperti hak tanggungan, hipotik, gadai maupun hak jaminan lainnya menjadi satu kesatuan boedel kepailitan yang dimasukkan dalam satu perkara kepailitan.

Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dapat diketahui bahwa dari perkara kepailitan yang masuk jumlah perkara kepailitan yang diregister tiap-tiap tahunnya kurang dari separuhnya (30 %)-nya.

¹⁰³ Hasil Penelitian, *Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

Hal ini disebabkan karena syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit banyak yang belum memenuhi ketentuan Pasal 1 UU Kepailitan.

Di Indonesia sebelum tahun 1998, kasus permohonan pernyataan pailit relatif sangat kecil atau hampir tidak ada. Namun sejak krisis moneter, jumlah permohonan pernyataan pailit untuk memailitkan debitor meningkat tajam. Hal ini sebagai akibat dari preskripsi Pemerintah dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam menghadapi krisis moneter dengan menawarkan kemudahan dalam proses kepailitan.

Salah satu implementasi dari kebijakan ini adalah mengamandemen UU Kepailitan (*Faillissement-Verordening*) yang diberlakukan sejak tahun 1905. Para pengambil kebijakan berasumsi ketika itu bahwa bisa jadi proses kepailitan tidak berjalan karena tidak memadainya hukum yang mengatur.

Dalam kurun waktu empat tahun setelah adanya amandemen banyak permohonan pernyataan pailit yang

diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memailitkan debitor/perusahaan.

Ada dua fenomena menarik untuk dicermati, yaitu:

Pertama, amandemen ternyata tidak dapat mengefisienkan waktu yang diperlukan, bahkan pemberesan harta setelah debitor dinyatakan pailit sangat lamban.

Kedua, dalam proses kepailitan hampir semua dimohonkan oleh kreditor, tidak oleh debitor.

Salah satu alasan mendasar adalah proses kepailitan di Indonesia terjadi saat perekonomian nasional sedang abnormal. Dalam situasi perekonomian yang normal, debitor yang sudah tidak melihat alternatif untuk menyehatkan usahanya akan merasa lebih baik menyatakan diri pailit daripada harus terus menerus dikejar para kreditornya.

Pasa masa krisis dapat dikatakan sebagai kondisi yang abnormal. Ketidaknormalan ini berakibat enggannya debitor untuk dipailitkan

karena mereka beranggapan terjadinya *de fault* pada perjanjian utang bukan karena kesalahan mereka. Mereka merasa bahwa tidak ada yang salah dalam kinerja usaha mereka, mereka tetap memiliki konsumen, pangsa pasar, dan pekerja yang giat bekerja-sama seperti pada waktu sebelum terjadi krisis moneter.

Menurut Lindawaty,¹⁰⁴ ada 2 (dua) alasan mengapa sedikit debitor/perusahaan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat:

Pertama, sebelum mengajukan tentunya mereka harus melengkapi banyak dokumen.

Kedua, mungkin juga para pihak berkeinginan mencoba menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Jadi penyelesaian bilateral antar mereka debitor dan kreditor. Karena kalau dipailitkan, assetnya kalau dijual dalam waktu sekarang ini murah. Utang-piutang tentu masih bisa dimusyawarahkan dan itu

¹⁰⁴ Lindawaty, *Wawancara Pribadi*, Panitera pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

mungkin bisa terjadi. Jadi tidak perlu ke Pengadilan, tidak perlu saling memailitkan diri atau dipailitkan.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat baik oleh debitor, kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, maupun Badan Pengawas Pasar Modal harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan substansial.

Menurut Lindawaty,¹⁰⁵ permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- Syarat formal, yaitu menyangkut kelengkapan pengajuan perkara kepailitan berupa dokumen bagi pihak yang akan mengajukan permohonan pernyataan pailit ; dan
- Syarat Substansial, yaitu mengenai adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, (Pasal 1 UU Kepailitan).

¹⁰⁵ Lindawaty, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diperoleh data kelengkapan persyaratan yang harus diajukan dalam permohonan pernyataan pailit tersebut adalah:

a. Permohonan dari debitor (Perseroan Terbatas)

- 1) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 2) Ijin pengacara yang dilegalisasi.
- 3) Surat kuasa khusus.
- 4) Akta pendirian perusahaan yang dilegalisasi oleh Kantor perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- 5) Putusan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir.
- 6) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas.
- 7) Neraca keuangan terakhir.
- 8) Nama dan alamat semua debitor dan kreditor.

b. Permohonan dari debitor (perseorangan)

- 1) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
 - 2) Ijin pengacara yang dilegalisasi.
 - 3) Surat kuasa khusus.
 - 4) Surat tanda bukti diri (kartu tanda penduduk) dari suami/isteri yang masih berlaku.
 - 5) Persetujuan suami/isteri yang dilegalisasi.
 - 6) Daftar asset dan tanggung-jawab.
 - 7) Neraca pembukuan terakhir.
- c. Permohonan dari debitor (Yayasan/Asosiasi)
- 1) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
 - 2) Ijin pengacara yang dilegalisasi.
 - 3) Surat kuasa khusus.
 - 4) Akta pendaftaran Yayasan/Asosiasi yang dilegalisasi Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan.

- 5) Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit.
 - 6) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan/Asosiasi.
 - 7) Neraca keuangan terakhir.
 - 8) Nama dan alamat semua debitor dan kreditor.
- d. Permohonan dari debitor

(Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal)

- 1) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 2) Surat tugas/surat kuasa.
- 3) Ijin pengacara yang dilegalisasi.
- 4) Surat kuasa khusus.
- 5) Surat pendaftaran perusahaan/bank/ perusahaan efek yang dilegalisasi Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- 6) Surat perjanjian utang.

7) Perincian utang yang telah jatuh tempo/
tidak dibayar.

8) Neraca keuangan terakhir.

9) Daftar asset dan tanggung-jawab.

10) Nama dan alamat semua debitor dan kreditor.

e. permohonan dari debitor

(perkongsian/partner)

1) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat.

2) Ijin pengacara yang dilegalisasi.

3) Surat kuasa khusus.

4) Akta pendaftaran perusahaan yang
dilegalisasi Kantor Perdagangan paling
lambat satu minggu sebelum permohonan
didaftarkan.

5) Persetujuan tertulis dari mitra kerja.

6) Neraca keuangan terakhir.

7) Nama dan alamat semua debitor dan kreditor.

f. Permohonan dari kreditor

- 1) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 2) Ijin pengacara yang dilegalisasi.
- 3) Surat kuasa khusus.
- 4) Akta pendaftaran/ Yayasan/ Asosiasi yang dilegalisasi Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- 5) Surat perjanjian utang.
- 6) Perincian utang yang tidak dibayar.
- 7) Nama dan alamat masing-masing debitor.
- 8) Tanda kenal diri debitor.
- 9) Nama dan alamat mitra kerja.
- 10) Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh penterjemah resmi (jika yang bersangkutan orang asing).

Surat permohonan pernyataan pailit serta dokumen-dokumen atau surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak serta ditambah empat rangkap untuk majelis dan arsip. Dokumen-dokumen

atau surat-surat berupa fotocopy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang/Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat di luar negeri harus diterjemahkan oleh penterjemah resmi yang disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut.

Disamping persyaratan formal tersebut di atas juga harus dipenuhi persyaratan substansial untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yaitu:¹⁰⁶

- a. Adanya debitor.
- b. Mempunyai dua atau lebih kreditor.
- c. Adanya utang.
- d. Telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut Poppy Indrajati,¹⁰⁷ syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU kepailitan, yaitu debitor mempunyai dua orang kreditor atau lebih dan tidak membayar

¹⁰⁶ Lindawaty, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

¹⁰⁷ Poppy Indrajati, *Wawancara Pribadi*, Ketua Balai Harta Peninggalan, Semarang, tanggal 28 Februari 2002.

sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Terjadinya utang tersebut karena diperjanjikan antara debitor dan kreditor, debitor meminjam uang yang didasari perjanjian-perjanjian utang.

Menurut Hakim Niaga Syamsudin Manan Sinaga,¹⁰⁸ persyaratan formal permohonan pernyataan pailit adalah menyangkut kelengkapan pengajuan perkara kepailitan berupa dokumen-dokumen dan persyaratan substansial adalah mengenai adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat substansial.

Menurut Penulis, UU Kepailitan sudah lebih dari empat tahun dioperasikan sejak tanggal 20 Agustus 1998, yang lahir karena desakan Dana Moneter

¹⁰⁸ Syamsudin Manan Sinaga, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

Internasional (IMF). UU ini diharapkan bisa mengatasi masalah kredit macet dan dapat memberikan kepastian hukum secara nyata kepada kreditor dan debitor. Dalam keadaan dan situasi seperti sekarang, perusahaan banyak sekali mengalami nasib buruk, mereka dalam kondisi sulit membayar bunga bank atau lainnya. Melalui Pengadilan Niaga, kreditor yang kebanyakan perusahaan asing bisa memperoleh kembali piutangnya secara cepat dari debitor yang sebagian besar perusahaan lokal. Di Pengadilan Niaga, ditaksir petisi kepailitan terhadap debitor bisa menumpuk sampai ribuan kasus perkara kepailitan. Ternyata, yang terjadi hanya ada 308 kasus perkara kepailitan, sedikitnya jumlah kasus tersebut disebabkan karena beratnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh kreditor atau pihak yang mengajukan permohonan pailit, antara lain selain persyaratan dalam Pasal 1 UU Kepailitan, juga karena perusahaan yang memiliki perselisihan bisnis lebih baik memilih jalur penyelesaian utang di luar Pengadilan. Penjualan

kembali asset milik perusahaan yang dipailitkan memerlukan waktu lama dan belum bisa memberikan hasil maksimal bagi kreditor. Apalagi saat ini pasar properti sedang jatuh, tetapi keberatan yang dirasakan pihak-pihak tertentu itu bisa dimungkinkan pengambilalihan kepemilikan perusahaan yang dipailitkan. Kalau debitor/ perusahaan dinyatakan pailit bukan berarti pihak kreditor bisa mengambil perusahaan atau kekayaan debitor seenaknya. Pengadilan Niaga akan menunjuk kurator yang akan mengurus asset-asset debitor/perusahaan yang dipailitkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Kepailitan terbukti tak mampu menjadi instrumen hukum untuk menyelesaikan kasus kredit macet. Karena itu, banyak debitor/perusahaan yang memiliki perselisihan bisnis lebih baik memilih jalur penyelesaian utang di luar Pengadilan.

Suatu UU dikatakan baik apabila UU tersebut dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Demikian juga UU Kepailitan ini diharapkan secara *feasible* dapat dilaksanakan

dengan memberi kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Untuk memberi suatu kepastian tentu substansinya harus dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan. Suatu rumusan yang sangat kabur atau luas justru akan menciptakan ketidak-pastian hukum.

2. Kedudukan Benda Jaminan Fidusia Dengan Pailitnya Pemberi Fidusia, Yang Dalam Kenyataannya Secara Fisik Masih dikuasai Oleh Debitor

Terhadap seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga di wilayah hukum, dimana seorang debitor berdomisili. Seorang debitor yang mempunyai minimal 2 (dua) kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*is due and payable*), dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga yang berwenang. Seseorang di sini, dapat berupa perseorangan (*natural entity*) atau badan hukum (*legal entity*), firma, CV (perseroan komanditer), ataupun persekutuan perdata lainnya dan pada umumnya adalah korporasi yang pada saat tertentu

mengalami kesulitan untuk membayar utangnya kepada salah satu kreditornya.¹⁰⁹

Menurut Pasal 1 UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap seorang debitor dalam hal:

- 1) Debitor telah berada dalam keadaan berhenti membayar, yaitu tidak mampu atau tidak mau membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ; dan
- 2) Terdapat dua atau lebih kreditor yang salah seorang dari para kreditor itu piutangnya sudah dapat ditagih.

Seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila secara sederhana telah terbukti dalam keadaan berhenti membayar artinya secara sederhana telah terbukti persyaratan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi, sehingga Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan tidak perlu terikat

¹⁰⁹ Djannen Pangaribuan, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 26 Februari 2002.

dengan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 14 Februari 2000, telah mengabulkan permohonan PEMOHON (PT. BANK DAIWA PERDANIA), perihal pencabutan permohonan pernyataan pailit yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon.

Kasus yang diputuskan dalam perkara ini menyangkut perjanjian kredit/utang, berupa pinjaman Aksep sebesar US.\$ 1,099,980.00 (satu milyar sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dollar Amerika Serikat) pada tanggal 5 Desember 1997, antara PT. BANK DAIWA PERDANIA, sebagai PEMOHON dengan PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, sebagai TERMOHON, dengan Jaminan Hak Milik secara kepercayaan (*Fiduciare Eigendoms*

Overdracht) atas mesin-mesin berupa 30 (tiga puluh) Set Nissan Water Jet Loom Model Lw 551-2M, berdasarkan Akta Pemindahan Hak Milik Mutlak sebagai Jaminan Fidusia tanggal 5 Desember 1997.

PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, telah gagal mengembalikan uang yang diterima atau dipinjamnya dari PT. BANK DAIWA PERDANIA.

Berhubung dengan itu, maka PT. BANK DAIWA PERDANIA, mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, dengan petitum sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon secara keseluruhan.
- b) Menyatakan Termohon (PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- c) Menyatakan penyitaan umum atas harta kekayaan milik Termohon untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk membayar tagihan Pemohon.

- d) Mengangkat Hakim Pengawas untuk kepailitan tersebut.
- e) Menunjuk Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. sebagai Kurator dalam kepailitan.

Dengan adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. BANK DAIWA PERDANIA tersebut diatas, maka pihak TERMOHON melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Termohon mengakui adanya Surat perjanjian utang yang dibuat oleh PT. BANK DAIWA PERDANIA dengan PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, berupa Pinjaman Aksep sebesar US.\$ 1,099,980.00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dollar Amerika Serikat).
- 2) Adanya surat perjanjian utang yang diakui oleh Termohon, merupakan perjanjian pokok yang harus didahulukan pelaksanaannya sebab dalam perjanjian pokok ini ada jaminan, yaitu jaminan fidusia sehingga jaminan itu harus lebih dahulu di eksekusi.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan kepailitan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pokoknya adalah hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon merupakan hubungan hukum perikatan dalam bidang hukum harta benda (*Vermogenrecht*), yang diwujudkan dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia yang menjadi dasar permohonan Kepailitan ini, sedangkan dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia tersebut diatur tentang penyelesaian perselisihan. Mengenai kreditor lainnya, Termohon mengakui adanya kreditor lain, dengan demikian menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan, Termohon terbukti mempunyai dua atau lebih kreditor. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberi putusan dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan Termohon dibebani membayar biaya perkara.

Dalam perkara lain, Putusan Nomor: 38/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. yaitu dalam kasus permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. DUTA KIRANA

FINANCE, Tbk., selaku Pemohon terhadap PT. DUTA FORT INDONESIA, Tbk., selaku Termohon, menolak permohonan Pemohon seluruhnya dan membebani Pemohon dengan biaya perkara.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan pertimbangan, bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon diawali dengan perjanjian Pengalihan/Utang secara Cessie oleh dan antara PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., dengan Pemohon (PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk.), dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon dan oleh karena itu Pemohon adalah kreditor yang berhak dan sah menurut hukum. Tetapi mengenai kreditor lainnya, ternyata tidak turut mengajukan permohonan pailit dan juga tidak memberi kuasa kepada Pemohon untuk permohonan kepailitan terhadap Termohon ini. Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan kebenaran permohonannya, maka permohonan harus ditolak seluruhnya.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor: 38/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. berpendapat bahwa pembuktian sederhana yang dianut dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Kuasa hukum Termohon yang telah dinyatakan pailit karena pertimbangan Pengadilan Niaga adanya kreditor lainnya yang tidak turut mengajukan permohonan pailit dan juga tidak memberi kuasa kepada Pemohon untuk permohonan kepailitan terhadap Termohon seperti demikian itu telah mengajukan permohonan kasasi agar Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan *Judex Factie*.

Menurut kuasa hukum Termohon Kasasi, antara lain *Judex Factie* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang adanya kreditor kedua/lainnya selain dari Pemohon.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim Kasasi (Putusan Nomor: 30/KAS/PAILIT/2001), berpendirian sama, yaitu bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk

membuktikan adanya kreditor lain tidak memenuhi syarat pembuktian (Pasal 165 HIR). Suatu bukti surat baru dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat diajukan dalam bentuk aslinya atau berbentuk foto copy yang harus dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan dengan disaksikan para pihak serta bermeterai cukup.

Pembuktian secara sederhana dalam pemeriksaan permohonan pailit, menurut I Wayan Surya Sukanta, mantan Hakim Niaga/Negeri Jakarta Pusat,¹¹⁰ adalah pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan pada dasarnya pembuktian tidak terlalu sulit dan tidak terkait dengan permasalahan lain di luar kepailitan dan harus dapat dibuktikan dalam persidangan Pengadilan Niaga bahwa yang didalilkan pemohon pailit dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 1 UU Kepailitan.

Menurut Prawoto,¹¹¹ pembuktian secara sederhana dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit

¹¹⁰ I Wayan Surya Sukanta, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, tanggal 13 Febuari 2002.

¹¹¹ Prawoto, *Wawancara Pribadi*, Kurator Balai Harta Peninggalan Semarang, Semarang, tanggal 18 Febuari 2002.

adalah pembuktian secara sumir atau singkat, contohnya bila kreditor menyatakan mempunyai piutang cukup dibuktikan dengan bukti utangnya berupa kuitansi, perjanjian atau ketentuan-ketentuan pada Pasal 164 HIR.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan, yaitu adanya fakta atau keadaan bahwa debitor yang hendak dinyatakan pailit mempunyai dua atau lebih kreditor dan telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai utang yang tidak dibayar dan telah jatuh tempo.

Permohonan pernyataan pailit baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum <Pasal 280 Ayat (1) UU Kepailitan>, dan untuk pertama kalinya sejak diundangkannya UU Kepailitan, Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus semua perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia (Tabel 1).

Peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut mempunyai tugas khusus menangani permintaan permohonan pernyataan kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangan diluar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan yang penting lagi, tingkat kemampuan serta kesediaan sumber daya yang akan mendukungnya.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam konteks kepailitan merupakan hal yang sangat penting untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit, antara lain dapat kita lihat dalam penyelesaian kasus perkara kepailitan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., dalam perkara ini adalah perkara kepailitan antara PT. BANK DAIWA PERDANIA,

berkedudukan di Jakarta Jalan Jend. Sudirman Kav. 40-41, yang dalam hal ini diwakili oleh Kiyoshige Ito, Presiden Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut telah memilih domisili hukum di Jalan Pintu Air Raya No.36-M, dikantornya RASJIM WIRAATMADJA, SH., Advokat dan Pengacara di Jakarta sebagai kuasanya, mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam hal ini sebagai PEMOHON.

m e l a w a n :

PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, beralamat di Jalan Nanjung No. 192, Rt.04/Rw.11, Kelurahan Utama, Cimahi Selatan, Bandung, Jawa Barat, sebagai TERMOHON.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan pernyataan kepailitan ini dalam putusannya memberi pertimbangan bahwa sampai perkara kepailitan ini diajukan belum dibentuk Pengadilan Niaga selain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat karena itu sesuai Pasal 281 Ayat (3) UU Kepailitan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang mengadili permohonan pailit ini, walaupun Termohon tidak berdomisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu di Bandung.

Dalam kasus perkara kepailitan lainnya, yaitu Nomor: 38/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 20 Agustus 2001, perkara antara PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk., Jalan Yos Sudarso Kav. 85 (Sunter By Pass) Jakarta 14350, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya BUDI PRIHANTORO, SH., BUDI AGUNG, SH., dan WIDIASTUTI, SH., masing-masing sebagai Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MILLENNIUM, mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam hal ini sebagai PEMOHON.

m e l a w a n :

PT. DUTA FORT INDONESIA, beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km. 18,5 Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HERI HERJANDONO, SH., dan PARJIO, SH., berkantor di

Kantor Pengacara IMAM SJAHPUTRA & ASSOCIATES,
beralamat di Kompleks Duta Jayakarta Blok. B-21,
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Jakarta Pusat
10730, sebagai TERMOHON.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
yang mengadili perkara permohonan pernyataan
kepailitan ini dalam putusannya memberi
pertimbangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus
perkara permohonan pernyataan pailit ini karena
sampai perkara kepailitan ini diajukan belum
dibentuk Pengadilan Niaga selain Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat karena itu sesuai Pasal 281 Ayat (3)
UU Kepailitan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
berwenang mengadili permohonan pailit ini. Keppres
No. 97 Tahun 1999 tanggal 8 Mei 2000, tentang
pembentukan Pengadilan Niaga, yaitu:

- a. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya.
- b. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

c. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

d. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Menurut ketentuan Pasal 2 Keppres tersebut, wilayah hukum masing-masing Pengadilan Niaga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

b. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.

Sedangkan ketentuan Pasal 5 Keppres tersebut, daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatra Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Terhadap kasus perkara kepailitan yang termasuk dalam wilayah hukum masing-masing Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut diatas yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka tetap harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sedangkan kasus perkara kepailitan yang telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka pemeriksaannya dilimpahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang sesuai dengan wilayah hukum masing-masing Pengadilan Niaga tersebut berdasarkan ketentuan

Pasal 2 Keppres No. 97 Tahun 1999 jo Pasal 4 UU Kepailitan.¹¹²

Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara kepailitan pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, sebagai berikut:¹¹³

- a. Apabila debitornya telah meninggalkan Wilayah RI, maka yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat kedudukan terakhir dari debitor tersebut.
- b. Apabila debitornya persero suatu firma, maka yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat kedudukan hukum firma tersebut.
- c. Apabila debitornya tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah RI, maka yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum

¹¹² Syamsudin Manan Sinaga, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

¹¹³ Syamsudin Manan Sinaga, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

tempat kedudukan Kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya.

- d. Apabila debitornya merupakan badan hukum, maka yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya.

Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah deferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia hanya dikenal 4 lingkungan Peradilan, yaitu:

- a. Peradilan Umum ;
- b. Peradilan Agama ;
- c. Peradilan Militer ; dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut mempunyai tugas khusus menangani permintaan permohonan pernyataan kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan

kewenangan diluar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan yang penting lagi, tingkat kemampuan serta kesediaan sumber daya yang akan mendukungnya.

Ketentuan Pasal 283 UU Kepailitan, hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
- c. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Pada tingkat pertama Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum Banding tetapi langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Menurut Ny. Suparti Hadhyono,¹¹⁴ pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah pihak yang berkepentingan, apabila menyangkut kreditor yang mengajukan kasasi maka bukan saja kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama tetapi kasasi dapat diajukan pihak lain yang tidak berperkara pada tingkat pertama namun tidak puas terhadap putusan kepailitan yang ditetapkan.

Keppres No. 97 Tahun 1999 mempermudah dan memperbanyak debitor atau perusahaan yang dipailitkan. Hal ini mengingat masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan jauh di luar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan kata lain

¹¹⁴ Ny. Suparti Hadhyono, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, tanggal 13 Februari 2002.

Keppres No. 97 Tahun 1999 menjadi dasar dibentuknya Pengadilan Niaga-Pengadilan Niaga lain.

Dalam beberapa kasus putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, misalnya kasus PT BANK DAIWA PERDANIA, yaitu putusan pailit Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., dan kasus PT DUTA FORT INDONESIA, Tbk., yaitu putusan pailit Nomor: 38/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST., serta beberapa perkara kepailitan lainnya menunjukkan telah terjadinya perbedaan penafsiran tentang utang baik di kalangan kreditor, debitor, hakim maupun pengacara.

Pada umumnya UU Kepailitan atau *bankruptcy law* berkaitan dengan utang debitor (*debt*) atau piutang atau tagihan kreditor (*claims*). Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan.

UU Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan utang.

Penjelasan Pasal 1 Ayat (1), hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.

UU Kepailitan juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan debitor dan kreditor. Tidak diberikannya definisi mengenai debitor dan kreditor tersebut makin memperluas medan selisih pendapat mengenai pengertian utang yang tidak didefinisikan oleh UU Kepailitan tersebut.

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh UU Kepailitan mengenai apa yang dimaksud dengan utang dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat menimbulkan silang pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Apakah setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul

dari perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut UU Kepailitan ? Dengan kata lain, apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja yang dapat diklasifikasikan sebagai utang, ataukah termasuk pula setiap kewajiban untuk membayar uang yang timbulnya kewajiban itu karena alas hak (*recht title*) apapun juga, baik yang timbul dari perjanjian apapun maupun yang timbul dari UU ?

- b) Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut UU Kepailitan ?

c) Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPer, sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan ?

2) Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, dapat memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.¹¹⁵

Pasal 1 Butir (4) UU Kepailitan, menyebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk

¹¹⁵ Hasil Penelitian, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 26 Febuari 2002.

mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Betapa definisi utang dalam konteks kepailitan merupakan hal yang penting, antara lain dapat kita lihat dalam penyelesaian Kasus kepailitan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. kasus yang diputus dalam perkara ini menyangkut perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia antara PT BANK DAIWA PERDANIA, yang menjadi lembaga keuangan bank sebagai Pemohon dan PT MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, yang menjadi pengusaha yang membutuhkan modal sebagai Termohon.

PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS telah gagal mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima dari Pemohon. Berhubung dengan itu, maka PT. BANK DAIWA PERDANIA telah mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Termohon.

Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 Febuari 2000, telah mengabulkan permohonan pailit tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon (kreditor) dengan Termohon (debitor) merupakan hubungan hukum perikatan dalam bidang hukum harta benda (*Vermogenrecht*), namun karena Termohon yaitu PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, belum mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima dari Pemohon, maka Termohon harus dinyatakan telah mempunyai utang kepada masing-masing Pemohon.

Dalam tanggapannya Termohon telah mengemukakan pendapat antara lain bahwa yang dimaksud dengan utang menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan, pada dasarnya adalah kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya perikatan utang piutang dimana dikenal istilah kreditor bagi pihak yang memiliki piutang dan debitor bagi pihak yang mempunyai utang, yaitu kewajiban pembayaran kembali uang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.

Dalam perkara lain, Putusan pailit Nomor: 38/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST., antara PT. DUTA

KIRANA FINANCE, Tbk., sebagai Pemohon dengan PT. DUTA FORT INDONESIA, Tbk., sebagai Termohon.

Dalam kasus ini, telah ditanda-tangani perjanjian Pengalihan/Utang secara Cessie, oleh dan antara PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk., sebagai pihak yang mengalihkan dengan PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk., sebagai pihak yang menerima pengalihan atas seluruh kewajiban/utang PT. DUTA FORT INDONESIA kepada PT. ANEKA KIMIA RAYA, Tbk.

Dalam perkara ini, permohonan kepailitan diajukan oleh PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk., yang merupakan kreditor dari PT. DUTA FORT INDONESIA, Tbk., selaku debitor telah ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Terhadap putusan itu Pemohon atau kreditor telah mengajukan permohonan Kasasi. Menurut Pemohon Kasasi, Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan beserta penjelasannya dengan tegas menyatakan bahwa pengertian utang harus diartikan, sebagai utang pokok dan bunga, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi

adalah hubungan hukum perikatan dalam bidang hukum harta benda, haruslah diartikan utang dalam pengertian luas bukan saja utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam uang, melainkan meliputi juga setiap perjanjian atau transaksi yang menyangkut prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam kasus ini mengartikan utang dalam pengertian luas dan berpendapat bahwa pengertian utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan.

Kuasa hukum Termohon yang telah dinyatakan pailit karena pertimbangan Pengadilan Niaga yang mengartikan utang seperti demikian itu mengajukan permohonan kasasi agar Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan *Judex Factie*. Menurut kuasa hukum Termohon *Judex Factie* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum tentang utang karena hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah bukan hubungan hukum pinjam meminjam uang.

Majelis Hakim Kasasi, berpendapat bahwa pengertian utang dalam arti sempit, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 30/KAS/PAILIT/2001/PN.NIAGA. JKT.PST., pengertian utang dalam UU Kepailitan harus diartikan dalam konteks pemikiran konsiderans tentang maksud diterbitkannya UU tersebut dan tidak dapat dilepaskan kaitan dari padanya yang pada dasarnya menekankan pada pinjaman-pinjaman swasta, sehingga karenanya tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang.

Menurut Kartini Mulyadi,¹¹⁶ berpendapat bahwa utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 UU kepailitan seharusnya merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Beliau mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1233 KUHPer dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena UU, sedangkan Pasal 1234

¹¹⁶ Kartini Mulyadi, *Wawancara Pribadi*, Kantor Konsultan Hukum Jakarta, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

KUHPer menentukan bahwa tiap-tiap perikatan menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan kata lain pengertian utang yang dimaksud dalam UU Kepailitan adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut I Wayan Surya Sukanta,¹¹⁷ utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang, dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang

¹¹⁷ I Wayan Surya Sukanta, *Wawancara Pribadi*, Mantan Hakim Niaga Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, tanggal 13 Febuari 2002.

tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.

Pengertian utang di dalam UU Kepailitan tidak seyogianya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja tetapi merupakan setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja) maupun timbul karena ketentuan UU, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti. Di lihat dari perspektif kreditor, kewajiban membayar debitor tersebut merupakan hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang atau *right to payment*. Utang debitor yang merupakan hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang bagi kreditor harus telah ada ketika debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Apabila hak kreditor itu belum muncul, maka tidaklah hak kreditor itu dapat dikatakan utang debitor yang dapat didaftarkan untuk pencocokan (Verifikasi) utang-utang dalam rangka kepailitan debitor tersebut.

Apabila terjadi ketidakpastian mengenai adanya utang tersebut maka adanya utang itu harus terlebih dahulu diputuskan oleh pengadilan. Bahkan pengadilan harus pula memutuskan kepastian mengenai besarnya utang itu. Pengadilan yang memeriksa adanya dan besarnya utang tersebut, menurut penulis adalah Pengadilan Niaga yang memeriksa kepailitan itu. Pemeriksaan tersebut dilakukan bersama dengan pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut.

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila suatu kewajiban debitor kepada pihak lain yang bukan merupakan kewajiban membayar uang, bukan termasuk utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan. Misalnya yang menyangkut kewajiban untuk menyerahkan barang atau

kewajiban yang diumumkan itu dapat dianggap sebagai utang sebagaimana yang dimaksud dalam UU kepailitan apabila terlebih dahulu disepakati oleh debitor dan pihak yang bersangkutan mengenai berapa besarnya uang yang harus dibayar oleh debitor kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti atau ganti kerugian apabila debitor tidak dapat atau telah tidak menyerahkan barang itu, atau tidak dapat atau telah tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah disepakati debitor kepada pihak lain itu. Apabila kesepakatan tersebut tidak ada atau tidak tercapai, maka besarnya kewajiban membayar sejumlah uang itu harus terlebih dahulu dimintakan putusan hakim. Besarnya uang yang dimaksudkan sebagai pengganti kewajiban atau ganti kerugian yang ditetapkan oleh putusan hakim itulah yang diartikan sebagai utang sebagaimana yang dimaksud dalam UU kepailitan.

Dengan Kata lain, penulis berpendapat bahwa utang yang dimaksud dalam UU kepailitan itu adalah bukan setiap kewajiban debitor apapun juga kepada kreditor tetapi hanya sepanjang kewajiban berupa

kewajiban itu adalah membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh UU misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh UU Pajak atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari jumlah kasus perkara kepailitan dengan Jaminan Fidusia yang ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejumlah 136 perkara (Tabel 2) ternyata dalam praktek Jaminan Fidusia tidak berdiri sendiri artinya Jaminan Fidusia dan jaminan hak lainnya, seperti hipotik, hak tanggungan, hak gadai, maupun hak jaminan lainnya menjadi satu kesatuan dalam boedel kepailitan, yang dimasukkan dalam satu perkara kepailitan.

Adanya UU Kepailitan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya pertentangan antara para kreditor yang disebabkan tindakan sewenang-wenang baik oleh

kreditur maupun debitor, sehingga terjamin ketertiban dan keadilan dalam pemenuhan suatu kewajiban agar semua kreditur mendapat pembayaran dari harta pailit menurut besar kecilnya piutang masing-masing secara proposional.

Menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer, bahwa setiap orang itu harus bertanggung jawab atas utang-utangnya, sehingga kreditur terjamin pembayaran tagihan-tagihannya. Tanggung jawab dari debitor berupa menyediakan seluruh harta bendanya untuk melunasi utang-utangnya. Seluruh harta benda debitor diperuntukkan bagi pembayaran tagihan-tagihannya, maka dalam pembagian harta benda debitor semua kreditur mendapat hasil penjualan secara adil menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bilamana diantara para kreditur terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah.

UU kepailitan merupakan realisasi dari asas jaminan umum sehingga debitor yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dapat dipaksa untuk memenuhi

kewajibannya dan seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bagi semua utangnya.

Dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitor dinyatakan sebagai harta pailit. Terhadap harta pailit itu dilakukan likuidasi oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Debitor yang dinyatakan pailit itu tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan hartanya, kecuali dalam rangka melakukan pemberesan hartanya itu berkaitan dengan kepailitan tersebut.¹¹⁸

Menurut Pasal 19 UU kepailitan, kekayaan debitor yang dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan niaga, meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan.

Dalam register perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,¹¹⁹ umumnya cukup disebutkan keseluruhan harta kekayaan yang menjadi

¹¹⁸ I Wayan Surya Sukanta, *Wawancara Pribadi*, Mantan Hakim Niaga Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, tanggal 13 Febuari 2002.

¹¹⁹ Hasil Penelitian, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 26 Febuari 2002.

satu kesatuan dalam *boedel* kepailitan, sehingga keberadaan jaminan-jaminan lainnya dapat diketahui dengan jelas yaitu dengan menelaah lebih terperinci setiap objek dalam *boedel* kepailitan tersebut, yang telah dibebani dengan jenis hak jaminan yang mana. Hal ini dapat diketahui dari adanya Akta Jaminan Fidusia, Akta Pembebanan Hak Tanggungan, Akta Gadai maupun Akta Hipotik yang telah dibuat untuk pembebanan terhadap objek benda jaminan tersebut.

Tanpa adanya data atau bukti pembebanan atas jaminan terhadap suatu objek *boedel* kepailitan, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa suatu objek tersebut termasuk dalam jaminan khusus, termasuk dalam hal ini Jaminan Fidusia. Maksudnya, adalah salah satu atau lebih *boedel* kepailitan dimungkinkan dapat dikategorikan menjadi objek Jaminan khusus seperti Fidusia, dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Namun tanpa adanya tanda bukti hak yaitu berupa sertifikat hak tanggungan, sertifikat Jaminan

Fidusia dan tanda bukti hak atas jaminan yang lain, maka harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit tersebut merupakan harta kekayaan debitor yang digolongkan dalam jenis jaminan umum menurut Pasal 1131 KUHPer dan dalam hal ini harta kekayaan debitor pailit akan dimasukkan dalam lingkup kepailitan menurut Pasal 19 UU Kepailitan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang debitor yang telah dinyatakan pailit harus segera melepaskan hak pengurusannya terhadap harta-hartanya jika debitor tersebut perseorangan ataupun pemilik/ pengurus korporasi adalah mereka (debitor pailit tersebut) tentang akibat kepailitan yang meletakkan aset debitor dalam penyitaan umum atau berpindahnya hak pengurusan dan pemberesan aset debitor pailit tersebut kepada kurator seketika setelah debitor tersebut dinyatakan pailit.

Dalam proses kepailitan apabila Pemberi Fidusia (debitor) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka benda jaminan fidusia dapat dimohonkan oleh

Penerima Fidusia (kreditor) kepada Kurator untuk dipisahkan dari boedel pailit.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 Februari 2000, telah mengabulkan permohonan pailit, antara Pemohon (PT. BANK DAIWA PERDANIA) dengan Termohon (PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS).

Dalam perkara kepailitan tersebut, dapat dilihat bahwa PT BANK DAIWA PERDANIA, sebagai kreditor pemegang Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Pemindahan Hak Milik Mutlak LA. No. 1350/ PVAKE/97 tanggal 5 Desember 1998 sebagai pemegang Jaminan Fidusia dari PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk dimasukkan Jaminan Fidusia yang diberikan oleh Termohon dalam jaminan khusus.

Fidusia menurut Pasal 1 Butir (1) UU Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Dari definisi diatas menimbulkan dua macam kepemilikan atas objek jaminan, yaitu:

- a) *Legal Owner*, yaitu kepemilikan secara yuridis bagi Kreditor (Penerima Fidusia) ; dan
- b) *Beneficiary Owner*, yaitu kepemilikan kenikmatan atau dengan kata lain Debitor (Pemberi Fidusia) yang masih menguasai benda jaminan secara fisik masih dapat mempergunakan dan menerima manfaat dari benda jaminan tersebut.

Menurut Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia, objek Jaminan Fidusia dapat dieksekusi apabila terjadi debitor cidera janji.

Selanjutnya menurut Poppy Indrajati,¹²⁰ dengan adanya kepailitan maka harus ditindaklanjuti eksekusi atas seluruh harta benda debitor yang akan dibagikan kepada kreditor menurut perbandingan piutang masing-masing kreditor.

Menurut Pasal 1131 KUHPer, segala harta kekayaan debitor baik yang berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik yang sudah ada

¹²⁰ Poppy Indrajati, *Wawancara Pribadi*, Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, Semarang 28 Febuari 2002.

maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitor dengan para kreditornya. Dengan kata lain, Pasal 1131 KUHPer itu memberikan ketentuan bahwa apabila debitor cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para kreditornya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitor tanpa kecuali merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPer, harta kekayaan debitor tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitor. Artinya, apabila debitor cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proporsional (*pari passu*) menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain.

Menurut Kartini Mulyadi,¹²¹ ketentuan Pasal 1131 KUHPer merupakan jaminan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditor yang bersedia memberikan utang kepada debitor dan ketentuan ini merupakan asas yang bersifat universal yang terdapat pada sistem hukum setiap negara.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang debitor yang telah dinyatakan pailit harus segera melepaskan hak pengurusannya terhadap harta-hartanya jika debitor tersebut perseorangan ataupun pemilik/pengurus koporasi adalah mereka (debitor pailit) tentang akibat kepailitan yang meletakkan aset debitor dalam penyitaan umum atau berpindahnya hak pengurusan kepada kurator seketika setelah debitor tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Menurut penulis, sekalipun UU telah menyediakan perlindungan kepada para kreditor sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer, tetapi perlindungan tersebut belum tentu

¹²¹ Kartini Mulyadi, *Wawancara Pribadi*, Kantor Konsultan Hukum Jakarta, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

menarik bagi kreditor untuk memberikan utang kepada debitor. Tentu saja akan lebih menarik bagi kreditor apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik daripada sekedar proposional dari hasil penjualan harta debitor. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditor tersebut memegang Hak Jaminan atas benda tertentu milik debitor. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Menurut Pasal 1134 KUHPer, hak istimewa ialah suatu hak yang oleh UU diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus kepailitan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST., dimana debitor (PT MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS) dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka kreditor (PT BANK DAIWA PERDANIA) yang diberikan hak Jaminan Fidusia sesuai dengan UU kepailitan dapat melakukan haknya atas barang yang dijadikan objek Jaminan

Fidusia tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Menurut penulis, perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan yang lahir dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang-piutang, dimana objek Jaminan Fidusia ini beralih kepemilikannya secara yuridis dari pemilik barang (debitor) selaku Pemberi Fidusia kepada kreditor selaku Penerima Fidusia, sedangkan secara fisik objek jaminan tersebut masih dikuasai dan dapat dipergunakan oleh debitor. Pada saat debitor wanprestasi atau dinyatakan pailit maka benda Jaminan Fidusia tersebut beralih hak kepemilikannya baik secara yuridis maupun secara fisik serta dapat dieksekusi secara langsung terpisah dari *boedel* pailit. Dengan kata lain, Hak Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya (*droit de suite*). Kreditor pemegang hak Jaminan Fidusia mempunyai kewenangan

penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminan Fidusiannya, artinya kreditor pemegang Jaminan Fidusia berwenang untuk menjual sendiri baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan UU, terhadap benda yang dibebani dengan hak Jaminan Fidusia tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitor (Pemberi Fidusia).

3. Kedudukan Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Dengan Pailitnya Pemberi Fidusia, Yang Dalam Kenyataannya Secara Fisik Masih dikuasai Oleh Debitor

Dari Kasus perkara kepailitan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., dapat diketahui bahwa Pemohon (PT. BANK DAIWA PERDANIA) adalah sebagai kreditor pemegang Jaminan Fidusia atas barang-barang milik Termohon (PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS), berdasarkan Akta Pemindahan Hak Milik Mutlak sebagai Jaminan Fidusia LA No. 1350/PVAKE/97 secara kepercayaan (Fiduciare Eigendoms

Overdracht). Dengan kata lain Pemohon (PT. BANK DAIWA PERDANIA) adalah sebagai Kreditor Separatis terhadap barang-barang milik Termohon tersebut berdasarkan Akta Pemindahan Hak Milik Mutlak tersebut.

Kepailitan merupakan realisasi dari asas jaminan umum, sehingga debitor atau Pemberi Fidusia yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dan seluruh harta kekayaannya menjadi jaminan bagi semua utangnya.

Dalam UU Kepailitan tidak diatur mengenai arti dan batasan kreditor. Menurut Prawoto,¹²² hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan harus menafsirkan arti dan batasan kreditor sehingga timbul masalah mengenai kedudukan kreditor separatis. Kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki objek jaminan seperti hak tanggungan, hipotik, gadai dan fidusia.

¹²² Prawoto, *Wawancara Pribadi*, Kurator Balai Harta Peninggalan Semarang, Semarang, tanggal 18 Febuari 2002.

Menurut ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan, setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Menurut Lindawaty,¹²³ kreditor pemegang hak jaminan (hipotik, hak tanggungan, hak gadai, fidusia) tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit. Ketentuan ini adalah sejalan dengan ketentuan mengenai dan dengan demikian mengakui hak separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana ditentukan oleh KUHP. Pencantuman ketentuan ini sangat penting bagi kepentingan dan pemberian perlindungan kepada kreditor.

Menurut Djannen Pangaribuan,¹²⁴ di dalam perkara kepailitan pihak kreditor dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a) Kreditor separatis (pemegang hak jaminan)

¹²³ Lindawaty, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

¹²⁴ Djannen Pangaribuan, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 26 Februari 2002.

Kreditor separatis adalah kreditor-kreditor yang memegang objek jaminan yaitu hak tanggungan, hak gadai, hipotik dan fidusia. Kreditor separatis mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditor lainnya, sehingga ia boleh bertindak seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam hal mengeksekusi objek jaminan milik debitor pailit. Hal ini disebabkan karena kreditor separatis dalam hubungannya dengan benda yang dijaminakan kedudukan sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya, kecuali UU menentukan sebaliknya.¹²⁵

b) Kreditor preferen (pemegang hak istimewa)

Kreditor preferen, yaitu kreditor yang memegang hak istimewa karena UU. Hak istimewa merupakan hak yang diberikan oleh UU kepada Kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya untuk menerima pembayaran lebih dahulu dalam pembagian harta pailit.

¹²⁵ Prawoto, *Wawancara Pribadi*, Kurator Balai Harta Peninggalan Semarang, Semarang, tanggal 18 Februari 2002.

c) Kreditor konkuren

kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memegang objek jaminan sehingga ia akan menerima haknya secara seimbang menurut perbandingan piutangnya masing-masing sesuai dengan Pasal 1132 KUHPer.¹²⁶

Lebih lanjut menurut Poppy Indrajati,¹²⁷ menjelaskan bahwa setelah ada putusan pernyataan pailit, maka gugatan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban harta kekayaan debitor harus diajukan terhadap dan oleh kurator. Bila gugatan terhadap debitor pailit mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap *boedel* pailit.

Menurut I Wayan Surya Sukanta,¹²⁸ terhadap gugatan yang diajukan oleh debitor pailit selama perkara kepailitan sedang berlansung, maka tergugat dapat memohon agar gugatan tersebut ditangguhkan.

¹²⁶ Prawoto, *Wawancara Pribadi*, Kurator Balai Harta Peninggalan Semarang, Semarang, tanggal 18 Febuari 2002.

¹²⁷ Poppy Indrajati, *Wawancara Pribadi*, Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, Semarang, tanggal 28 Febuari 2002.

¹²⁸ I Wayan Surya Sukanta, *Wawancara Pribadi*, Mantan Hakim Niaga Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, tanggal 13 Febuari 2002.

Dalam hal ini debitor dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim memanggil kurator untuk mengambil alih perkara tersebut. Apabila kurator tidak hadir untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka tergugat dapat mengajukan eksepsi agar perkara kepailitan tersebut tidak dapat diterima.

Ada dua pendapat yang berkembang tentang kedudukan kreditor separatis jika hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu:

- a) Kreditor separatis berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit karena dalam UU Kepailitan tidak dilarang.
- b) Kreditor separatis tidak berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit karena Pasal 56 Ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa kreditor separatis yang memegang objek jaminan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit harus melepaskan hak istimewanya.

Menurut Lindawaty,¹²⁹ penyerahan secara kepercayaan (fidusia), karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi secara *super preferent* dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, walaupun kreditor separatis dapat mengeksekusi dan mengambil seluruh hasil penjualan hak jaminan tetapi dia harus tunduk pada hukum tentang penangguhan eksekusi untuk masa tertentu, yaitu maksimum 90 hari untuk kepailitan dan maksimum 270 hari untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Menurut penulis, maksud penangguhan eksekusi untuk masa tertentu, antara lain bertujuan untuk:

- a) memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
- b) memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.
- c) memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

¹²⁹ Lindawaty, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

Ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan yang disebut *standstill* atau *automatic stay*, yaitu keadaan *status quo* bagi debitor dan para kreditor, biasanya diberikan oleh UU bukan setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga atau diberikan selama dilakukan negosiasi antar debitor dan para kreditor dalam rangka restrukturisasi utang. Setelah debitor dinyatakan pailit yang terjadi hanyalah likuidasi terhadap harta pailit.

Menurut Lindawaty,¹³⁰ Penerima Fidusia atau Kreditor pemegang Jaminan Fidusia dapat dikatakan "Kreditor Separatis" yang berkonotasi "Pemisahan", karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dari harta pailit umumnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa

¹³⁰ Lindawaty, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 24 September 2002.

kreditor separatis tersebut mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditor lainnya. Dalam hal ini kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi seluruh utang-utangnya maka kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utang-utangnya, bunga setelah pernyataan pailit <Pasal 124 Ayat (3)>, ongkos-ongkos <Pasal 58 (1)> UU Kepailitan, maka kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak debitor.

Dalam mengeksekusi benda jaminan milik debitor (Pemberi Fidusia) yang dinyatakan pailit, sering kreditor (Penerima Fidusia) mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena debitor (Pemberi Fidusia) tidak kooperatif. Tindakan debitor (Pemberi Fidusia) yang tidak kooperatif, menurut I Wayan

Surya Sukanta,¹³¹ menyangkut budaya hukum, yaitu ketidakikhlasan dari Debitor (Pemberi Fidusia) untuk menyerahkan benda jaminan sehingga ada usaha untuk menjual sendiri atau mempertahankan benda jaminan tersebut.

UU Fidusia memungkinkan penjualan dibawah tangan benda jaminan yang menjadi objek jaminan untuk mendapat nilai jual yang lebih tinggi. Namun penjualan dibawah tangan seperti yang diatur dalam UU Fidusia mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan karena, antara lain:

- a) Membutuhkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, persyaratan ini akan berpusat pada soal harga dan biaya yang dapat menguntungkan para pihak.
- b) Setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

¹³¹ I Wayan Sukanta, *Wawancara Pribadi*, Mantan Hakim Niaga Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, tanggal 13 Febuari 2002.

c) Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Melihat beratnya persyaratan tersebut,¹³² besar kemungkinan penjualan dengan cara dibawah tangan ini tidak akan populer. Kalau cara ini pun akan ditempuh diperkirakan hanya akan terbatas pada kredit berskala besar. Jadi cara yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibandingkan dengan cara baru dalam UU Fidusia. Dengan cara lama, Pemberi Fidusia (debitor) atau pemilik jaminan atas persetujuan kreditor akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) benda yang menjadi objek fidusia. Mungkin uang penebusannya berasal dari calon pembeli, setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara dibawah tangan (ditandatangani oleh pemilik benda).

Menurut penulis, asas yang dianut oleh suatu UU Kepailitan ialah bahwa setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga, seharusnya tidak ada lagi upaya-upaya perdamaian. Upaya-upaya

¹³² Hasil, Wawancara, dengan Beberapa debitor.

perdamaian seyogianya hanya ada sebelum pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan niaga.

Dari uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa kedudukan kreditor (Penerima Fidusia) terhadap benda Jaminan Fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia setelah pasca pernyataan pailit oleh pengadilan niaga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi hak separatis dari seorang kreditor (Penerima Fidusia) sebagai pemegang hak jaminan ialah bahwa benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan (Jaminan Fidusia) tidak termasuk harta pailit.

Dari uraian tersebut diatas, menurut penulis bahwa dalam Jaminan Fidusia yang dimaksudkan Pemberi Fidusia adalah debitor yang diberi hak kenikmatan untuk tetap menguasai bendanya yang dibutuhkan dalam kegiatannya sehari-hari di samping dapat menggunakan uang pemberian Penerima Fidusia (kreditor) berupa utang. Juga salah satu ketentuan dalam ikatan Jaminan Fidusia menyebutkan apabila Pemberi Fidusia (debitor) cidera janji atau

dinyatakan pailit, maka benda Jaminan Fidusia dapat dieksekusi. Dengan kata lain, Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan atau yang disebut dengan prinsip "*droit de preference*", yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah bahwa Kreditor (Penerima Fidusia) berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia mendahului kreditor lainnya. Bahkan sekalipun Pemberi Fidusia dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia. Dengan demikian Penerima Fidusia tergolong dalam kelompok kreditor separatis, artinya tergolong kreditor yang mempunyai kedudukan yang terkuat karena pemenuhan piutangnya harus terlebih didahulukan dari kreditor lainnya. Karena hak Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan, maka hak Jaminan tersebut berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak Jaminan Fidusia

tersebut berlaku asas publisitas, artinya Hak Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan.

4. Hak Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Ketiga Dalam Hal Pemberi Fidusia Dinyatakan Pailit

Dalam proses kepailitan apabila Pemberi Fidusia (debitor) wanprestasi, maka benda jaminan fidusia dapat dimohonkan oleh Penerima Fidusia (kreditor separatis) kepada Kurator untuk dipisahkan dari boedel pailit. Namun terdapat kemungkinan bahwa Pemberi Fidusia (debitor) mengalihkan atau menjual benda Jaminan Fidusia itu kepada Pihak Ketiga (pembeli).

Berkaitan dengan uraian dalam tulisan ini yang membahas mengenai hak kreditor, hal ini dapat dilihat dalam kasus perkara kepailitan Nomor: 08/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., dan kasus perkara kepailitan Nomor: 38/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.,

ada beberapa asas yang berlaku bagi hak jaminan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang Hak Jaminan terhadap para kreditor lainnya.
- b) Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor. Artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
- c) Hak jaminan memberikan hak *separatis* bagi kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d) Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapa pun juga benda beralih

kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak jaminan diatur dalam Pasal 528 KUHPer.

- e) Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan UU, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitor.
- f) Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publititas. Artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan Gadai. Hal ini dapat dimengerti oelh karena alaasan-alasan, sebagai berikut:

(1) Bagi sahnya hak jaminan gadai, benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu harus diserahkan kepada kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal apabila denda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut.

(2) Benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak.

(3) Pasal 1977 Ayat (1) KUHPer menentukan bahwa Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya.

Menurut Ny. Suparti Hadhyono,¹³³ sebelum adanya UU Fidusia, eksekusi benda bergerak yang diikat dengan fidusia pada umumnya tidak melalui lelang tetapi dengan mengefektifkan kuitansi kosong yang

¹³³ Ny. Suparti Hadhyono, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, tanggal 13 Februari 2002.

sebelumnya telah ditanda-tangani oleh pemilik benda jaminan atau debitor (Pemberi Fidusia). sesungguhnya pada waktu yang lalu pengikatan jaminan secara fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak diumumkan, akibatnya banyak pengikatan jaminan fidusia yang terkesan ragu-ragu, Hal ini terlihat dari banyaknya pengikatan pendamping jaminan fidusia seperti kuasa menjual, kuitansi kosong, pengakuan hutang dan sewa beli.

Dalam perkara kepailitan antara PT. BANK DAIWA PERDANIA, sebagai Pemohon dengan PT. MELVIN INTERNATIONAL SYNTHETICS, sebagai Termohon, yang pada akhirnya dicabut oleh Pemohon salah satu penyebabnya adalah Akta Pemindahan Hak milik Mutlak tersebut yang dibuat sebelum berlakunya UU Fidusia, sehingga pada waktu itu belum ada Kantor Pendaftaran Fidusia yang akan menerbitkan sertifikat fidusia. Dengan didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka secara yuridis kepemilikan benda jaminan tersebut berpindah kepada Penerima Fidusia

(Kreditor), sedangkan Pemberi Fidusia (Debitor) tidak lagi menguasai benda tersebut sebagai pemilik tetapi sebagai penyimpan/penyewa saja.

Dengan kata lain, Pemohon (PT. BANK DAIWA PERDANIA) mempunyai kedudukan sebagai Kreditor Separatis atau kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sedangkan dalam kasus perkara kepailitan PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk. dengan PT. DUTA FORT INDONESIA, Tbk., digolongkan dalam kreditor konkuren, hal ini dapat dilihat dalam kasus tersebut bahwa PT. DUTA KIRANA FINANCE, Tbk., sebagai Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pemohon adalah kreditor pemegang hak jaminan.

Dengan diterbitkan dan diserahkannya sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditor, maka kreditor pemegang Jaminan Fidusia akan mempunyai kedudukan yang kuat terhadap benda yang dijamin. sebagai

alat bukti adanya peralihan hak milik tersebut, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa Penerima Fidusia atau kreditor pemegang hak Jaminan Fidusia sebagai pemegang hak preferen yaitu hak yang mendahulu di antara kreditor-kreditor lainnya dapat mempertahankan benda yang menjadi jaminan fidusia meskipun Pemberi Fidusia dinyatakan pailit.

Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer. Berdasarkan peraturan-peraturan kepailitan itulah asas-asas sebagaimana tersebut dalam dua Pasal itu direalisasikan, oleh karena itu sumber kepailitan adalah KUHPer.

Menurut Pasal 1341 Ayat (2) KUHPer menjelaskan bahwa hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Pembeli yang beritikad baik ini dilindungi karena pembeli tersebut tidak mengetahui bahwa penjualan itu tidak sah.

Menurut Pasal 1977 KUHPer, pembeli boleh percaya bahwa untuk barang bergerak orang yang menguasai barang tersebut adalah pemiliknya.

Menurut Pasal 23 Ayat (2) UU Fidusia, ditentukan bahwa Pemberi Fidusia (debitor) dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda Jaminan Fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima Fidusia (kreditor).

Menurut Pasal 11 Ayat (1) UU Fidusia dinyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menurut Bambang Sulistyo Budi,¹³⁴ bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Hal ini menganut asas publikasi dan dengan dilakukannya pendaftaran dan pengumuman pembebanan Jaminan Fidusia ini dianggap semua orang mengetahuinya.

¹³⁴ Bambang Sulistyo Budi, *Wawancara Pribadi*, Ketua Bagian Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Semarang, tanggal 14 Januari 2002.

Menurut penulis, Pasal 1977 KUHPer hanya memberikan perlindungan bagi pembeli yang beritikad baik. Yang dimaksud dengan pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang pada saat membeli benda tersebut dengan kewaspadaan penuh dan sama sekali tidak mengetahui bahwa yang menguasai benda tersebut ternyata bukan pemiliknya. Sebelum berlakunya UU Fidusia Penerima Fidusia tidak dapat menuntut pembeli yang beritikad baik, melainkan dapat menuntut kepada Pemberi Fidusia yang menjual benda tersebut. Pemberi Fidusia dalam hal ini dianggap wanprestasi dan selanjutnya Penerima Fidusia yang dirugikan dapat meminta pembatalan atas perjanjian utang piutang serta mewajibkan Pemberi Fidusia melunasi utangnya sekaligus. Sesudah berlakunya UU Fidusia, dengan dilakukannya pendaftaran dan pengumuman pembebanan Jaminan Fidusia ini dianggap semua orang mengetahuinya. Setiap calon pembeli benda bergerak hendaknya wajib minta keterangan terlebih dahulu mengenai status benda tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia

mengenai status barang tersebut, kecuali ia beli dari toko (barang baru dari toko). Oleh karena adanya asas publikasi ini, Penerima Fidusia berhak menuntut untuk mengembalikan benda jaminan yang sudah berada di tangan pembeli tersebut.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang dimana objek jaminan fidusia ini beralih kepemilikannya secara yuridis dari pemilik barang atau debitor selaku Pemberi Fidusia kepada kreditor atau Penerima Fidusia, sedangkan secara fisik jaminan fidusia tersebut masih dikuasai dan dapat dipergunakan oleh debitor. Saat debitor wanprestasi atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka benda jaminan fidusia tersebut beralih hak kepemilikannya baik secara yuridis maupun secara fisik serta dapat dieksekusi secara langsung untuk memperoleh pelunasan utangnya. Benda tersebut terpisah dari boedel pailit karena Penerima Fidusia adalah pemilik

Kurator (pihak debitor). Kedudukan Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia terhadap benda Jaminan Fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia setelah pasca pernyataan pailit oleh pengadilan niaga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi hak separatis dari seorang kreditor (Penerima Fidusia) sebagai pemegang hak jaminan ialah bahwa benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan (Jaminan Fidusia) tidak termasuk harta pailit.

3. Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia berhak menuntut untuk pengembalian benda jaminan fidusia yang sudah berada di tangan pembeli atau pihak ketiga. Karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan tersebut berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan fidusia berlaku asas publititas. Artinya hak jaminan tersebut harus atau wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ada pada Kantor Pendaftaran

Fidusia terbuka untuk umum. Dengan dilakukannya pendaftaran dan pengumuman pembebanan Jaminan Fidusia ini dianggap semua orang mengetahuinya.

B. Saran-saran

1. Penerima Fidusia/Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat oleh kreditor dengan debitor dihadapan Notaris ke Kantor Pendaftaran Fidusia setempat, agar supaya mempunyai kepastian hak atas objek jaminan fidusia tersebut.
2. Hakim Pengawas, Kurator kepailitan, para kreditor dan debitor dalam melakukan tindakan apapun yang menyangkut kepailitan tersebut hendaknya dilakukan dengan jelas dan transparan, terutama dalam masalah pemberesan harta kekayaan si debitor pailit, sehingga semua pihak jelas dan mengetahui segala tindakan yang dilakukan dalam proses kepailitan. Hal ini penting agar tidak ada manipulasi atau tindakan yang menyimpang, yang akan merugikan semua pihak.

5. Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus kasus perkara kepailitan diharapkan menggunakan pendekatan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dan harus mempunyai kemampuan dalam memproses putusan pailit, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Ali, Chaidir, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, 1982.

Anderson, Ronald. A., *Bussines Law*, South Western Publishing, Co. Edisi kesebelas, 1981.

Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, April 2001, cetakan pertama.

_____, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Asser's - Beekhuis, *Handleiding tot de beoefening Van het Nedrland burgerlijkrecht, Ze deel Zakenrecht*, Wej Tjeenk Willink, Zwolle, 1957.

_____, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijkrecht*, Alumni Bandung, 1982.

Barnes, A. James, *A Guide to Bussines Law*, Learning Systems Company, Richard. D. Irwin, INC. Home-Wood, Illionis.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994.

_____, *Bab-bab Tentang Credietverband, gadai, dan fidusia*, Bandung, Alumni, 1979.

_____, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 11, 2000.

_____, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

_____, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991.

_____, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991.

Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionry*, 5th Edition, Minnesota: West Publishing, 1979.

Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Gautama, S, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ketiga, jilid kedua, Cetakan ketiga, Bandung: PT. Eresco, 1988.

Guromo, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan*, Cetakan I, tahun 1988.

Hadiwidjojo, BPH Hapsoro, *Bahan Kuliah, Hukum Acara Perdata, Membaca Dan Mengerti HIR*, Edisi Revisi, RMJ Koosmargono dan Mochammad Dja'is, Semarang: Seksi Hukum Perdata Undip, 1994.

Hamzah, A & Senjum Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co., 1987.

Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 1988.

Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selecta Hukum Perusahaan*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, tahun 2000.

Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

- Hartono, Siti Soemanti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta, 1981.
- Hoey Tiong, Oey, *Fidusia Sebagai Jaminan: Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Diktat: Politik Hukum*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Undip, 2001.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 1991.
- Manullang, A. Hamzah & Senjum, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta Ind-Hill Co, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mochamad, Amin, *Hukum Kepailitan dan Surceance*, Universitas Brawijaya, tahun 1984.
- Muladi, *Suatu Analisis tentang Peranan Formal Kekuasaan kehakiman Termasuk Permasalahan Peradilan Terpadu*, Semarang, tanpa penerbit, 2001.

- Muladi, *Suatu Analisis tentang Peranan Formal Kekuasaan
kehakiman Termasuk Permasalahan Peradilan Terpadu*,
Semarang, tanpa penerbit, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, terjemahan dari
Bussines Law, oleh SB. Marsh dan J. Soulsby,
Bandung, Alumni, 1980.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*,
Tarsito, Bandung, 1966.
- Oven, Van, *Byzondere, Tweede Stuk, Zekerheidsrechten*,
Zwolle, 1974.
- Patrik, Purwahid, dan Kashadi, *Hukum Jaminan (Edisi
Revisi Dengan UUHT)*, Semarang: FH. Undip, 1998.
- _____, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam
Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1986.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang &
Tentang Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan
Pembayaran*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- _____, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,
Cetakan II, Djambatan, tahun 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung:
Angkasa, 1981.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni,
1979.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
1991.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Raphael, Jesse.S., *The Collier Quick and Easy Guide to
Law*, Collier Books, New York, NY. Edisi pertama,
1962.

- Raphael, Jesse.S., *The Collier Quick and Easy Guide to Law*, Collier Books, New York, NY. Edisi pertama, 1962.
- Rasjidi, Lili, & Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Sanoesi, Achmad, *Pengantar Ilmu hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina cipta, Cetakan kedua, 1979.
- Situmorang, M. Victor & S. Henry, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, tahun 1998.
- Soebekti, R., *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- _____, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Adat, Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum*, Reader III, jilid I. Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, Alumni, 1978.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Soekanto, Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia-Kapita Selekta*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1980.

Soemitro, Hanityo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Cetakan V, Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 1994.

Soepratignja, P.J., *Pokok-pokok Hukum Perdata, Hukum Benda*, jilid II, Semarang: Seksi Hukum Perdata, FH. Undip, 1983.

Soemardjono, Maria, S.W., *Prinsip dasar dan Isyu di Seputar Undang-undang Hak Tanggungan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Kesiapan dan Persiapan Dalam rangka pelaksanaan UUHT, Bandung: Mei 1996.

Supomo, *Sisten Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan kedelapan, 1970.

Sofwan, Sri Soedewi Maschoen, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, 1980.

_____, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia didalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH-UGM, Bulaksumur, 1977.

Suherman, E., *Faillissement (Kepailitan)*, Jakarta: Bina cipta, 1988.

Sutanto, Retnowulan. & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.

Thain, Gerald. H., *A Basic Outline of The Law Of Secured Transaction*, Komponen Pelatihan Hukum, Elips Project, 1993.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.

Tumbuan, Fred BG, *Pokok-pokok Undang-undang tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 1998*, Jakarta, 1998.

Vollmar, HFA., *De Faillissementwet*, vierde Druk, HD., Tjeenk Willink & Zoon NV. Harlem, 1953.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Waluyo, Bernadette, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, tahun 1995.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1999.

Yani, Achmad & Wijaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis*, Cetakan I, PT. Raya Grafind Perdata, Jakarta, tahun 1999.

Artikel, Makalah:

Djohansah, *Pengadilan Niaga*, Makalah dalam Rangka Penataran Calon Hakim Niaga, Jakarta, tanggal 19 Januari 1998.

Effendi, Paulus Lotulung, *Pengadilan Niaga Sejauhmana Kesiapan SDMnya*, Makalah Calon Hakim Niaga, tahun 1998.

Elijana, *Eksekusi Jaminan Fidusia dan Kendalanya*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Jaminan Fidusia dan Tata Cara Pendaftarannya, Jakarta, 12 Oktober, 2000.

Firdaus, Asikin, *Kewajiban Perpajakan Sehubungan Kepailitan*, Kertas Kerja Pelatihan Kurator, Jakarta, tahun 1998.

Harahap, M. Yahya, *Lembaga Fidusia*, Makalah, Jakarta, 12 Oktober, 2000.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7 tahun 1999.

Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, *Pokok-pokok UU Kepailitan*, Makalah Seminar Dialog Nasional Perpajakan, UU kepailitan, Perpu No.1 Tahun 1998, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Otonomi Daerah, tahun 1998.

Manan, Bagir, *Perlindungan Debitur dan Kreditur dalam Kepailitan*, Kertas Kerja dalam Seminar Kepailitan, Jakarta, tanggal 17 Oktober 1998.

Muljadi, Kartini, *Objek Jaminan Fidusia*, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Jaminan Fidusia dan Tata Cara Pendaftarannya, Jakarta, 12 oktober, 2000.

Muljadi, Djojo, *Pengaruh Penanaman Modal Asing Atas Perkembangan persekutuan Perseroan Dagang (Vennootchapsrecht) Dewasa Ini*, Majalah Hukum dan Keadilan No. 5/6/, 1972.

Panggabean, *Penerapan Asas-asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7 tahun 1999.

Peter, *Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional, tahun 1998.

Prianto, Yuwono, *Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Era Hukum No. 1/th.I/1994.